LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Jl. Pemuda No. 294 Telepon 0272-321046
Fax. 0272 322567 Teleks 325637 Klaten 57424

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 disusun sebagai suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk: (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi Pemerintah Daerah (d) mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap isu yang berkembang.

Capaian kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022 ditandai dengan berbagai penghargaan di banyak bidang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Tentu, harus disertai rasa syukur dan tetap fokus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah untuk menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja jangka menengah Daerah, serta untuk mewujudkan: ***Masyarakat Kabupaten Klaten Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Klaten, 20 Februari 2023

BUPATI KLATEN,

Hj. SRI MULYANI, S.M.

Executive Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (*tiga puluh empat)* yang terdiri dari: 33 (*tiga puluh tiga*) indikator yang sifatnya progresif, dan 1 (*satu)* indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** ***(***atau interval nilai realisasi kinerja **≥ *90,01*)** sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 91,18%, diantaranya:

1) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya *(Ipoleksosbud)* yang diselesaikan;
2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
3) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI);
4) Peringkat/ Nilai SAKIP;
5) Opini Laporan Keuangan;
6) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN;

7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
8) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan;
9) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan;
10) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan;
11) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;
12) Persentase Peningkatan Investasi PMDN;
13) Persentase Peningkatan Investasi PMA;
14) Persentase jalan dalam kondisi mantap;
15) Persentase drainase dalam kondisi baik;
16) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
17) Persentase Capaian *Universal Access* (kumuh, air minum dan sanitasi);
18) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang;
19) Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*);
20) Harapan Lama Sekolah (HLS);
21) Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
22) Persentase Pemajuan Kebudayaan;
23) Usia Harapan Hidup (UHH);
24) Persentase PMKS yang tertangani;
25) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
26) Indeks Desa Membangun (IDM);
27) Indeks Kualitas Air;
28) Indeks Kualitas Udara;
29) Indeks Kualitas Lahan Tutupan;
30) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan
31) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja ***75,01 ≤ 90,00*** sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 2,94%, diantaranya:
1) Skor Kabupaten Layak Anak.

c. Ada 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mempunyai nilai kinerja baik di tahun 2021 sebesar 2,74 sehingga di tahun 2022 tidak diikutkan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena yang diikutkan dalam penilaian Indeks SPBE bagi instansi dengan nilai di bawah 2,60.

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Tercapai (Berhasil Menekan)***, atau interval nilai realisasi kinerja skala <50,00% sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Selanjutnya untuk mengimplementasikan sasaran jangka menengah Daerah, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun berkenaan, dan ditindaklanjuti dengan penetapan APBD tahun 2022 dengan sebanyak 137 program dengan 274 kegiatan dan subkegiatan 782 dengan dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp 3.020.031.884.691,28,- dan terserap sebesar Rp 2.524.601.172.404,28,- (atau 83,60 %).

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasar tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: dari 34 (tiga puluh empat) indikator sasaran dengan sebanyak 62 (enam puluh dua) program pendukung visi-misi bupati dan 1 (satu) program yang tidak dianggarkan yaitu Program Pengelolaan Permuseuman sehingga diperoleh hasil yang efisiensi sebanyak 55 (atau 88,71%) program dan yang tidak efisiensi sebanyak 7 (atau 11,29%) program. Tingkat efektifitas sumber daya, dengan perincian: 1. Sangat efektif sebanyak 31 (atau 91,18% dari 34 indikator sasaran), 2. Efektif sebanyak 2 (atau 5,88% dari 34 indikator sasaran), dan 3. Tidak ada hasil (N/A) 1 (atau 2,94% indikator sasaran).

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Mayor Kusmanto No.23 Telp. 321040 Kode Pos 57415
K L A T E N

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemda Kabupaten Klaten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

AGUS SETYAWAN P, S.STP, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 197706271997031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Pernyataan Telah Direviu iv
Eksekutif Summary v
Daftar Isi viii
Daftar Tabel ix
Daftar Grafik xiii
Daftar Gambar xv
Daftar Diagram xvi

BAB I PENDAHULUAN ..... I−1
1.1 Latar Belakang ..... I−1
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah ..... I−3
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah ..... I−15
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten ..... I−23
1.5 Isu Strategis ..... I−27

BAB II PERENCANAAN ..... II−1
2.1 Rencana Strategis ..... II−1
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 ..... II−9
2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran ..... II−11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... III−1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..... III−2
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ..... III−10
3.3 Akuntabilitas Anggaran III-163
3.4 Efektifitas Sumber Daya ..... III−197

BAB IV PENUTUP ..... IV−1
4.1 Kesimpulan ..... IV−1
4.2 Rencana Tindak Lanjut ..... IV−3

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2022.....	I-6
Tabel 1.2	Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	I-8
Tabel 1.3	Perkembangan Perbandingan IPM Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021.....	I-10
Tabel 1.4	Komponen Pembentukan IPM Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021.....	I-11
Tabel 1.5	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022……..	I-12
Tabel 1.6	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 (dalam Rp. Juta).....	I-17
Tabel 1.7	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 (dlm Juta Rupiah)……..	I-20
Tabel 1.8	Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	I-24
Tabel 1.9	ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022…….	I-25
Tabel 1.10	Manajemen Pengelolaan ASN Tahun 2018-2022……	I-25
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.....	II-6
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	II-9
Tabel 2.3	Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-11
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	III-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif.....	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022……	III-3
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat……...	III-11
Tabel 3.5	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2018-2022……	III-13
Tabel 3.6	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2018-2022……..	III-14
Tabel 3.7	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentramaan Umum Tahun 2018-2022.....	III-15

Tabel 3.8	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah…….….	III-20
Tabel 3.9	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018−2021……..	III-30
Tabel 3.10	Perkembangan Jumlah Jabatan ASN Tahun 2018-2022.....	III-35
Tabel 3.11	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar Tahun 2018−2022.....	III-37
Tabel 3.12	Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara ASN Tahun 2018-2022.....	III-38
Tabel 3.13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah.....	III-41
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi.....	III-45
Tabel 3.15	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Tahun 2018-2022……...	III-47
Tabel 3.16	Pertumbuhan dan Konstribusi Industri Terhadap PDRB Tahun 2018-2022……...	III-49
Tabel 3.17	Pasar Menurut Jenisnya Tahun 2018–2022……..	III-51
Tabel 3.18	Pertumbuhan dan Konstribusi Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2018-2022.....	III-52
Tabel 3.19	Lahan Pertanian dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha).....	III-54
Tabel 3.20	Luas Perubahan Pengunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha).....	III-55
Tabel 3.21	Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2018-2022……	III-56
Tabel 3.22	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2022.....	III-57
Tabel 3.23	Produksi Perkebunan Tahun 2018-2022.....	III-58
Tabel 3.24	Populasi Ternak Tahun 2018-2022…….	III-59
Tabel 3.25	Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2018-2022……..	III-60
Tabel 3.26	Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya Tahun 2018-2022……..	III-61
Tabel 3.27	Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Tahun 2018-2022.....	III-62
Tabel 3.28	Pertumbuhan dan Konstribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2018-2022.....	III-63
Tabel 3.29	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2018-2022.....	III-66
Tabel 3.30	Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	III-67

Tabel 3.31	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	III-68
Tabel 3.32	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Investasi Daerah.....	III-75
Tabel 3.33	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2018-2022.....	III-75
Tabel 3.34	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2018-2022.....	III-77
Tabel 3.35	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2018-2022.....	III-77
Tabel 3.36	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.....	III-80
Tabel 3.37	Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022…….	III-81
Tabel 3.38	Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022….	III-83
Tabel 3.39	Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	III-85
Tabel 3.40	Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI) Tahun 2018-2022.....	III-86
Tabel 3.41	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Capaian Universal Access (100-0-100).....	III-89
Tabel 3.42	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2018-2022……..	III-90
Tabel 3.43	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang.....	III-93
Tabel 3.44	Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2022.....	III-94
Tabel 3.45	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan……..	III-97
Tabel 3.46	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2018 – 2022.....	III-98
Tabel 3.47	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2018-2022.....	III-99
Tabel 3.48	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing…….	III-101
Tabel 3.49	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	III-103
Tabel 3.50	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021.....	III-104
Tabel 3.51	Perkembangan Kegiatan Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	III-110
Tabel 3.52	Jumlah Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2018-2022.....	III-111
Tabel 3.53	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	III-101
Tabel 3.54	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan…..	III-115
Tabel 3.55	Cakupan Komplikasi kebidanan yang Ditangani.....	III-116

Tabel 3.56	Cakupan Penanganan Gizi….....	III-117
Tabel 3.57	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk ……..	III-118
Tabel 3.58	Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk.....	III-120
Tabel 3.59	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran KinerjaMeningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.....	III-123
Tabel 3.60	Penduduk Usia Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2018-2022.....	III-128
Tabel 3.61	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	III-132
Tabel 3.62	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak…….	III-140
Tabel 3.63	Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021…….	III-143
Tabel 3.64	Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2017-2021……	III-144
Tabel 3.65	Indikator Indeks Pemberdayaan Gender.....	III-145
Tabel 3.66	Komponen Pembentuk IDG Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021…….	III-146
Tabel 3.67	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2018-2022	III-147
Tabel 3.68	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.....	III-150
Tabel 3.69	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3).....	III-155
Tabel 3.70	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.....	III-158
Tabel 3.71	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022…….	III-159
Tabel 3.72	Perkembangan Kejadian Bencana Tahun 2018-2022…….	III-162
Tabel 3.73	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	III-167
Tabel 3.74	Tingkat Efisiensi Sumber Daya.....	III-198
Tabel 3.75	Rasio Efektifitas Sumber Daya.....	III-223
Tabel 3.76	Efektifitas Sumber Daya.....	III-224

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2018-2022.....	I-9
Grafik 1.2	Perkembangan IPM Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	I-10
Grafik 1.3	Perkembangan Relevansi Tingkat Kemiskinan Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018 – 2022…….	I-13
Grafik 1.4	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2018-2022.....	I-14
Grafik 1.5	Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Klaten terhadap Jawa Tengah pada tahun 2018-2022.....	I-15
Grafik 1.6	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	I-16
Grafik 1.7	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah).....	I-22
Grafik 1.8	Profil Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	I-23
Grafik 3.1	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2022.....	III-21
Grafik 3.2	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021-2022.....	III-22
Grafik 3.3	Perkembangan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018-2022.....	III-42
Grafik 3.4	Perkembangan Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022…….....	III-84
Grafik 3.5	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022…….....	III-102
Grafik 3.6	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-104
Grafik 3.7	Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022, Update Terakhir 30 Januari 2023.....	III-105
Grafik 3.8	Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022, Update Terakhir 30 Januari 2023.....	III-107
Grafik 3.9	Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2022…….	III-108
Grafik 3.10	Usia Harapan Hidup (UHH) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022.....	III-114
Grafik 3.11	PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2018−2022.....	III-125

Grafik 3.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022.....	III-129
Grafik 3.13	Perkembangan IPG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2017-2021…….....	III-141
Grafik 3.14	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022…….	III-142
Grafik 3.15	Perkembangan IDG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2017 – 2021……...	III-146
Grafik 3.16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2022…..……..	III-152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan……	I-4
Gambar 3.1	Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja……..	III-127
Gambar 3.2	Peta Rawan Gerakan Tanah…….	III-160
Gambar 3.3	Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten.....	III-161

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026……..	II-8
Diagram 3.1	Peringkat Kinerja Sasaran Strategis.....	III-9
Diagram 3.2	Peringkat Kinerja Regresif.....	III-9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN, *terdiri dari:*
1.1 Latar Belakang
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten
1.5 Isu Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instasi pemerintah yang disampaikan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa untuk menjamin peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* dan *clean governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing Daerah.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun *grand-design* perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu penguatan pelaksanaan **otonomi daerah** dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja yang dihasilkan dari setiap sasaran strategis jangka menengah Daerah tahun 2021-2026.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk *akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi* yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah Daerah. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya ***Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*** disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah

1. Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara $7^0$32`19" Lintang Selatan sampai $7^0$48`33" Lintang Selatan dan antara $110^0$26`14" Bujur Timur sampai $110^0$47`51" Bujur Timur.

b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kabupaten Klaten sebesar 70.152,02 hektar atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, 3.689 RW dan 9.593 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY); dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

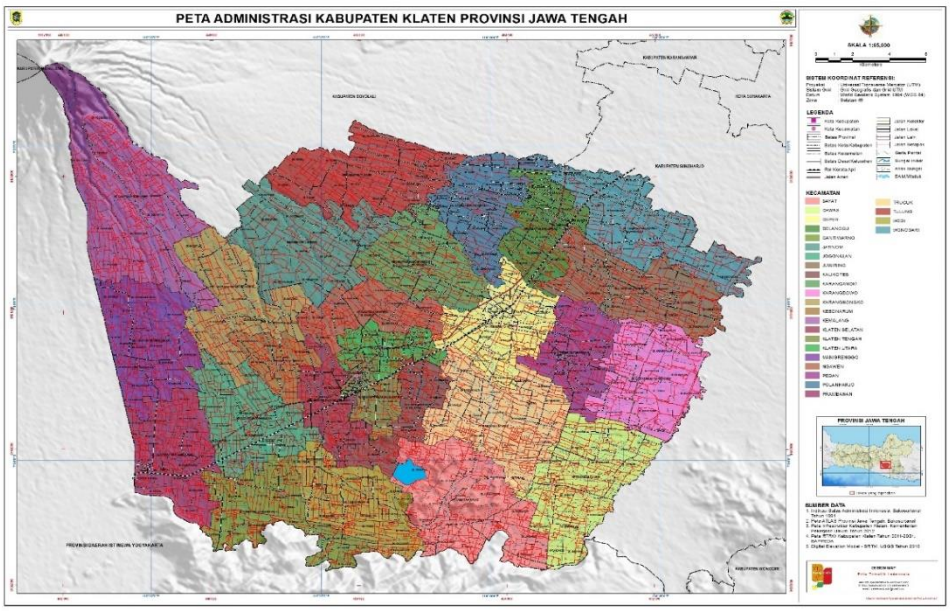

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

c. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017-2021 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah pada tahun 2017 sebesar 33.021 Ha, pada tahun 2018 turun menjadi sebesar 31.943 Ha, pada tahun 2019 menjadi 31.943 Ha, pada tahun 2020 menjadi 34.682,71 Ha dan pada tahun 2021 menjadi 34.682,71 Ha. Sedangkan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2017 seluas 45,761 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,2981 Ha, Industri 4,515 Ha, dan Jasa 0,948 Ha. Tahun 2018 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 61,840 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 47,356 Ha, Industri 13,744 Ha, dan Jasa 0,740 Ha. Tahun 2019 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 81,6 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 55,5 Ha, Industri 18,2 Ha, Perusahaan 0,5 Ha, dan Jasa 7,5 Ha. Pada tahun 2020 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian mencapai 93,180 Ha, dengan rincian peruntukan: Perumahan 56,1038 Ha, Industri 10,332 Ha, Perusahaan 25,516 Ha, dan jasa 1,228 Ha. Tahun 2021 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian mencapai 90,71418 Ha, dengan rincian: Perumahan 56,09 Ha, Industri:7,879 Ha, Perusahaan 25,516 Ha, dan jasa 1,228 Ha.

d. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2021 berdasarkan data bersih sebanyak 1.276.030 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,11% dan kepadatan penduduk 1.946 jiwa/km$^{2.}$, dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 1.277.455 jiwa (atau naik 1425 jiwa) dan kepadatan penduduk 1948,65 jiwa/km^2 Gambaran jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Luas wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk
		2018	2019	2020	2021	2022*)	2021-2022	2021-2022		
1	Prambanan	52.662	52.824	54.667	51.363	51.708	345	0,67	24,43	2116,58
2	Gantiwarno	40.609	40.696	44.262	38.642	38.642	-	0,00	25,64	1507,10
3	Wedi	54.681	54.507	57.338	52.039	52.061	22	0,04	24,38	2135,40
4	Bayat	65.148	65.649	69.554	63.486	63.734	248	0,39	39,43	1616,38
5	Cawas	61.359	60.690	62.222	57.548	57.675	127	0,22	34,47	1673,19
6	Trucuk	80.740	81.715	82.901	79.039	79.218	179	0,23	33,81	2343,03
7	Kalikotes	20.910	20.935	21.467	19.922	36.993	17.071	85,69	12,98	2850,00
8	Kebonarum	61.117	61.237	63.848	58.918	19.808	-39.110	-66,38	9,67	2048,40
9	Jogonalan	44.181	44.373	45.378	42.941	59.002	16.061	37,40	26,7	2209,81
10	Manisrenggo	38.247	38.096	39.087	36.760	43.232	6.472	17,61	26,96	1603,56
11	Karangnongko	66.963	67.619	70.048	65.094	36.805	-28.289	-43,46	26,74	1376,40
12	Ngawen	48.831	48.990	50.421	46.907	45.869	-1.038	-2,21	16,97	2702,95
13	Ceper	45.176	45.256	47.089	43.516	64.915	21.399	49,18	24,45	2655,01
14	Pedan	60.686	61.155	60.339	58.274	46.875	-11.399	-19,56	19,17	2445,23
15	Karangdowo	64.760	64.770	62.900	62.757	43.328	-19.429	-30,96	29,23	1482,31
16	Juwiring	43.248	43.661	42.267	42.124	58.363	16.239	38,55	29,79	1959,15
17	Wonosari	42.783	42.969	41.146	41.013	62.899	21.886	53,36	31,14	2019,88
18	Delanggu	47.585	47.602	46.270	46.270	42.122	-4.148	-8,96	18,78	2242,92
19	Polanharjo	55.283	55.419	53.634	53.696	40.949	-12.747	-23,74	23,84	1717,66
20	Karanganom	61.905	62.312	60.171	60.232	46.389	-13.843	-22,98	24,06	1928,05
21	Tulung	39.721	40.064	39.299	39.447	53.948	14.501	36,76	32	1685,88

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Luas wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk
		2018	2019	2020	2021	2022*)	2021-2022	2021-2022		
22	Jatinom	46.697	47.368	45.860	45.856	60.186	14.330	31,25	35,53	1693,95
23	Kemalang	37.943	38.116	37.083	37.108	39.602	2.494	6,72	51,66	766,59
24	Klaten Selatan	48.416	49.265	48.023	47.945	44.045	-3.900	-8,13	14,43	3052,32
25	Klaten Tengah	42.264	42.634	41.620	41.206	41.107	-99	-0,24	8,92	4608,41
26	Klaten Utara	44.965	45.687	43.908	43.927	47.980	4.053	9,23	10,38	4622,35
Jumlah		**1.308.712**	**1.316.880**	**1.330.802**	**1.276.030**	**1.277.455**	**1.425**	**0,11**	**655,56**	1948,65

Sumber: DISDUKCAPIL, Update per 12 Januari 2023.

**) Data DKB Semester 1 Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 1.1. sebagaimana tersebut di atas, data jumlah penduduk di Kabupaten Klaten telah dihitung berdasarkan konsolidasi bersih (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa diketemukan adanya data ganda dan/atau data tidak normal, sehingga perlu dilakukan dibersihkan/validasi administrasi data kependudukan. Pada tahun 2018 menjadi 1.316.880 jiwa, pada tahun 2019 menjadi 1.323.609 jiwa, tahun 2020 menjadi sebanyak 1.330.802 jiwa, pada tahun 2021 menjadi sebanyak 1.276.030 jiwa, dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 1.277.455 jiwa (Data DKB Semester I-2022, sedangkan data tahun 2022 masih *In proses*).

Tingkat kemajuan/kesejahteraan penduduk salah satunya diukur dengan Rasio Beban Tanggungan (RBT), dimana semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, begitu pula sebaliknya semakin rendahnya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Gambaran perkembangan RBT Tahun 2018-2022 disajikan Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Rasio Beban Tanggungan (RBT)
Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Persentase RBT
		0-14	15-64	65+		
1	2018	263.474	911.174	142.232	1.316.880	44,53%
2	2019	272.466	941.241	109.902	1.323.609	40,62%
3	2020	274.675	1.192.919	137.883	1.330.802	34,58%
4	2021	271.615	878.814	126.106	**1.276.535**	45,26%
5	2022	271.359	880.345	125.749	1.277.455	45,11%

Sumber : DISDUKCAPIL Update per 12 Januari 2023

Disamping RBT sebagaimana tersebut di atas, jumlah KK yang semula sejumlah 447.922 KK pada Tahun 2021 menjadi 447.943 KK pada Tahun 2022 (atau bertambah sebanyak 21 KK atau sebesar 0,0047%). Perkembangan jumlah KK ini juga dipengaruhi adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri) akan menambah dan/atau mengurangi jumlah KK Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 1.1.

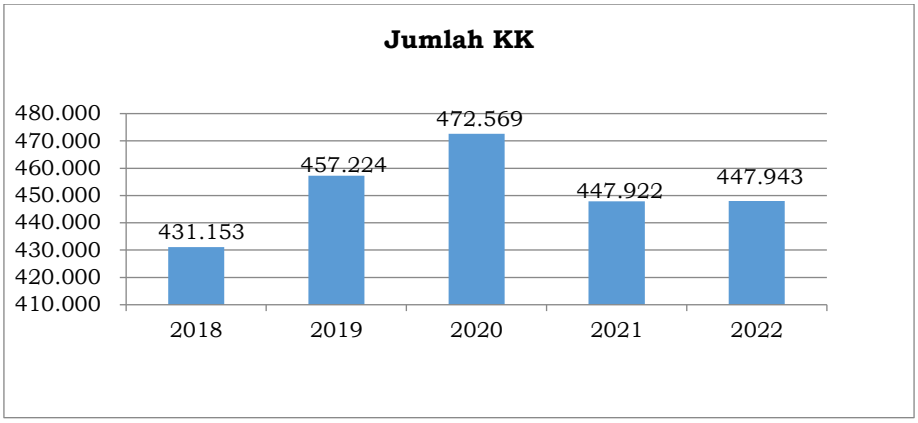

Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2018-2022

Sumber : DISDUKCAPIL, Update per 12 Januari 2023.

**) Data Tahun 2022-Semester I*

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM Klaten mengalami peningkatan setiap tahun, dan naik cukup signifikan sampai tahun 2021 yaitu dengan capaian 76,16 dan capaian IPM se Soloraya: Sukoharjo 77,13, Boyalali 74,40, Karanganyar 75,99, Sragen 74,41, Wonogiri 70,49, dan Kota Surakarta 82,62. Adapun perkembangan berbanding IPM antara Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 1.2.

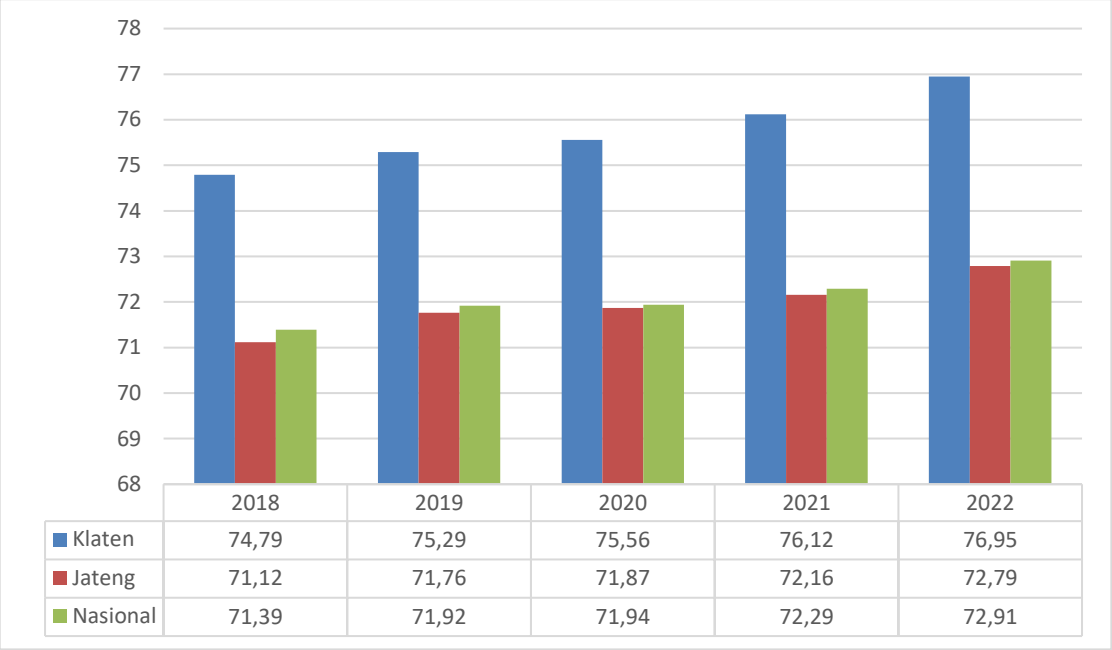

	2018	2019	2020	2021	2022
Klaten	74,79	75,29	75,56	76,12	76,95
Jateng	71,12	71,76	71,87	72,16	72,79
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Grafik 1.2. Perkembangan IPM Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.

Sumber: BPS, Update Terakhir 15 November 2022.

Berdasarkan Grafik 1.2 di atas tampak bahwa IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2022 masih lebih baik daripada capaian IPM Jawa Tengah (72,79) maupun IPM nasional (72,91). Hal ini mengindikasikan bahwa Klaten lebih baik dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dan perbandingan perkembangan IPM Menurut Jenis Kelamin antara Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Perkembangan Perbandingan IPM Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2017-2021

Uraian	IPM Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	75,97	76,71	77,21	77,46	78,08	73,34	73,64	74,15	74,49	74,97
Jateng	74,48	75,13	75,79	75,87	76,08	68,48	69,08	69,64	69,94	70,36
Nasional	74,85	75,43	75,96	75,98	76,25	68,08	68,63	69,18	69,19	69,59

Sumber: BPS, Maret 2022.

Berdasarkan Tabel 1.3. tampak bahwa IPM Kabupaten Klaten menurut jenis kelamin perempuan pada tahun 2021 sebesar 74,97 sudah di atas Jawa Tengah (70,36) maupun nasional (69,59). Pada tahun 2021, apabila dibandingkan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki di Klaten, tampak bahwa IPM perempuan 74,97 lebih rendah daripada IPM laki-laki sebesar 78,08. Hal yang sama dialami juga tingkat Jawa Tengah dan nasional. Sedangkan komponen pembentuk IPM antara Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenis Kelamin tahun 2021 disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Komponen Pembentukan IPM Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Komponen Pembentuk IPM	Klaten		Jawa Tengah		Nasional	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)		(3)		(4)	
Angka Harapan Hidup (AHH)	75,10	78,80	72,61	76,42	69,67	73,55
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,37	13,51	12,71	12,93	12,95	13,22
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,35	8,33	8,17	7,34	8,92	8,17
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rp/Orang/Tahun)	13 229	11 539	15 253	9 805	15 770	9 050
IPM	**78,08**	**74,97**	**76,08**	**70,36**	**76,25**	**69,59**

Sumber: BPS, Maret 2022.

Berdasarkan Tabel 1.4. tampak bahwa Komponen Pembentuk IPM Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Klaten menurut jenis kelamin perempuan pada tahun 2021 jauh lebih tinggi dari laki-laki, hal ini mengindikasikan bahwa perempuan secara alamiah memiliki pengharapan yang lebih baik dibanding laki-laki. Begitu juga secara rerata sudah di atas Jawa Tengah maupun nasional. Namun sebaliknya, untuk komponen rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan, hal ini

mengindikasikan bahwa mobilitas dan pengeluaran laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan.

Pada tahun 2021, apabila dibandingkan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki di Klaten, tampak bahwa IPM perempuan 74,97 lebih rendah dari IPM laki-laki sebesar 78,08. Hal yang sama dialami juga tingkat Jawa Tengah dan nasional.

3. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu: 1. Persentase penduduk miskin, dan 2. Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kreteria yang berbeda.

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk *Disdukcapil* (Jiwa)	Jumlah Penduduk *BPS* (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	1.314.781	1.171.411	151.730	12,96
2019	1.323.609	1.174.986	144.140	12,28
2020	1.330.802	1.178.501	151.800	12,89
2021	1.276.030	1.260.506	158.230	13,49
2022	1.277.455	1.267.272	144.870	12,33

Sumber : Badan Pusat Statistik, Update Data Terakhir 23 November 2022.

Pada tahun 2022 angka persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1,16% dibanding tahun 2021, hal ini didorong percepatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dari pemerintah turun tepat waktu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pengendalian inflasi dan lain-lain dalam mengatasi kemiskinan.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Klaten, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 1.3.

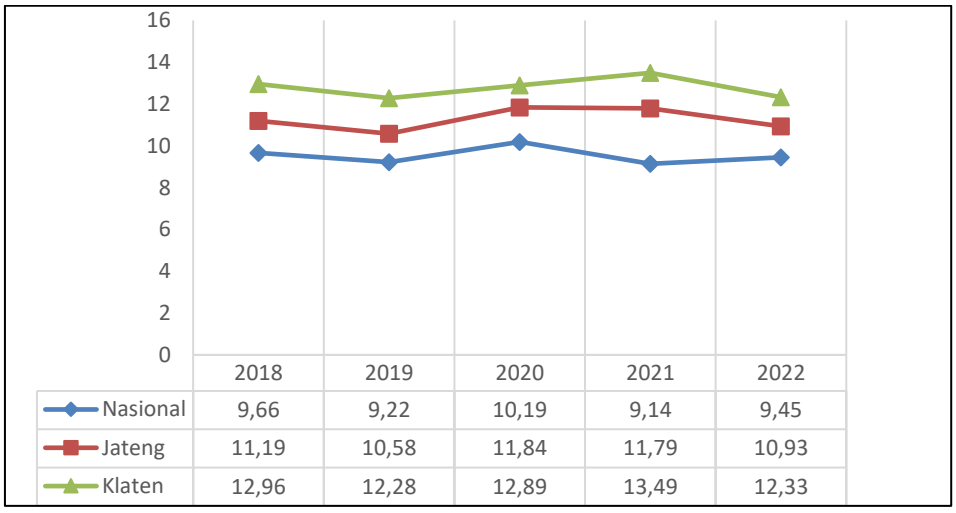

	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	9,66	9,22	10,19	9,14	9,45
Jateng	11,19	10,58	11,84	11,79	10,93
Klaten	12,96	12,28	12,89	13,49	12,33

Grafik 1.3.Perkembangan Relevansi Tingkat Kemiskinan Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018 – 2022.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Update Terakhir 23 November 2022.

Peningkatan angka kemiskinan terjadi baik di tingkat Nasional, hal ini dikarenakan dampak Pandemi *Covid-19*, sekalipun dukungan keberhasilan program penganggulangan kemiskinan lintas sektor dirasa cukup signifikan. Namun angka kemiskinan Kabupaten Klaten masih di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional, hal ini disebabkan kesulitan penurunan kemiskinan karena terjadinya *inclusion error* yaitu kesalahan sasaran penerimaan program. Masyarakat yang sebenarnya tidak berhak justru menerima bantuan alih-alih warga miskin. *"Ada exclusion error,* yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang

seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima, begitu pula sebaliknya. Orang tidak miskin malah dapat bantuan".

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik 1.4.

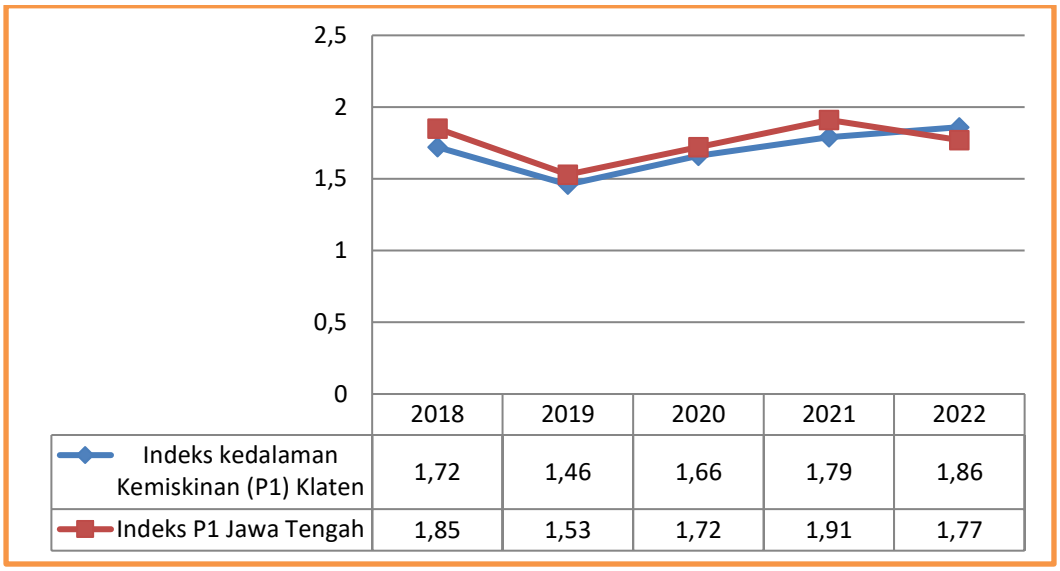

	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) Klaten	1,72	1,46	1,66	1,79	1,86
Indeks P1 Jawa Tengah	1,85	1,53	1,72	1,91	1,77

Grafik 1.4. Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Update Terakhir 23 November 2022.

Pada Grafik 1.4. ditunjukkan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar 1,79 posisinya di bawah Provinsi Jawa Tengah (1,91), dan pada tahun 2022 (P1) Kabupaten Klaten menjadi sebesar 1,86 posisinya di atas Provinsi Jawa Tengah (1,77).

c. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 1.5.

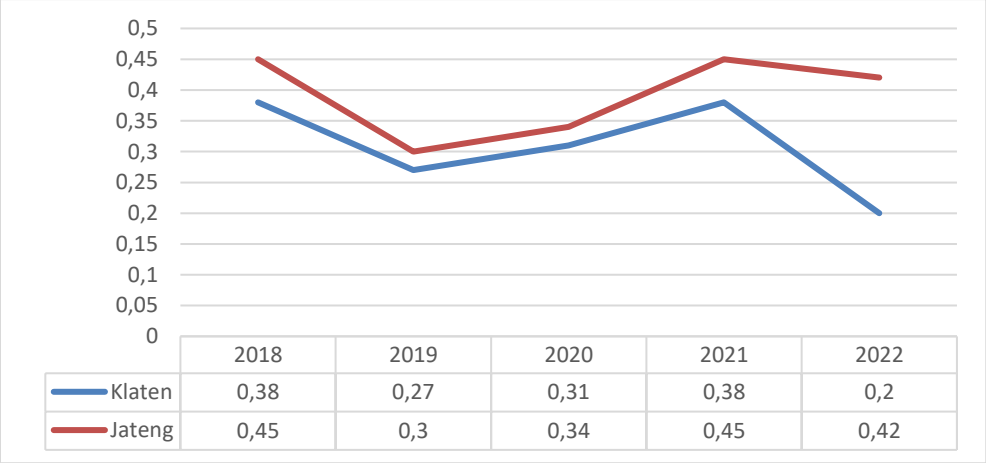

	2018	2019	2020	2021	2022
Klaten	0,38	0,27	0,31	0,38	0,2
Jateng	0,45	0,3	0,34	0,45	0,42

Grafik 1.5. *Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Klaten terhadap Jawa Tengah pada tahun 2018-2022.*

Sumber : Badan Pusat Statistik, Update Terakhir 23 November 2022.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2018-2022 terhadap perkembangan realisasi Provinsi Jawa Tengah, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten pada tahun 2021 (0,38) di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,45). Sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 0,2 dan dibawah rata-rata Jawa Tengah 0,42.

1.3. Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,44%, dan tahun 2019 menjadi 5,57% hal ini sebagai

dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor. Namun pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi di daerah sampai nasional mengalami kontraksi pada kisaran -3,49%. Namun karena adanya intervensi yang tepat, sehingga sampai Triwulan-III tahun 2022 menunjukkan kinerja positif.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Grafik 1.6.

	2018	2019	2020	2021	2022
Klaten	5,47	5,48	-1,17	3,82	3,82
Jateng	5,3	5,4	-2,65	3,32	5,23
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,72

Sumber : BPS, 2023 (diolah).

Grafik 1.6. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.

*) catatan angka kinerja tahun 2022 capaian TW-III tahun 2022.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2017-2021 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.908.070,61	2,21	2 923 116,92	0,52	2 985 130,18	2,12	3 019 021,65	1,14	3 067 581,68	1,61
2	Pertambangan dan Penggalian	685.313,55	3,18	706 900,93	3,15	705 045,28	-0,25	737 587,14	4,62	745 247,01	1,04
3	Industri Pengolahan	9.013,718,21	5,98	9 599 530,72	6,50	9 483 870,46	-1,20	9 832 836,19	3,68	10 217656,88	3,91
4	Pengadaan Listrik dan gas	47.094,12	6,43	49 644,40	5,42	51 883,91	4,51	55 806,25	7,56	58 214,24	4,31
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13.532,60	5,50	14 308,02	5,73	14 735,75	2,99	15 704,43	6,57	15 842,76	0,88
6	Konstruksi	1.635.233,26	6,67	1 742 475,03	6,56	1 708 276,48	-1,96	1 860 298,20	8,90	2 170 904,85	16,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.719.954,10	4,17	4 923 412,16	4,31	4 687 427,19	-4,79	4 952 335,78	5,65	5 152 052,25	4,03
8	Transportasi dan Pergudangan	625.692,51	4,79	656 720,86	4,96	470 525,49	-28,35	480 537,60	2,13	861 443,93	79,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.018.074,62	7,77	1 098 344,48	7,88	1 043 075,16	-5,03	1 134 935,21	8,81	1 304 463,97	14,94
10	Informasi dan Komunikasi	1.147.054,83	11,71	1 282 866,12	11,84	1 511 722,42	17,84	1 593 773,40	5,43	1 631 348,20	2,36

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	887.591,04	3,50	915 313,03	3,12	947 448,17	3,51	966 281,26	1,99	976 392,98	1,05
12	Real Estate	401.354,47	4,98	420 057,59	4,66	419 048,02	-0,24	428 221,51	2,19	447 907,47	4,60
13	Jasa Perusahaan	90.076,27	7,57	99 395,27	10,33	92 396,90	-7,04	95 374,60	3,22	100 208,70	5,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	631.265,14	3,34	641 455,60	1,61	633 375,54	-1,26	625 039,05	-1,32	631 525,93	1,04
15	Jasa Pendidikan	1.720.461,03	7,03	1 842 721,54	7,11	1 839 363,29	-0,18	1 841 649,34	0,12	1 875 510,34	1,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	307.894,68	9,06	336 313,36	9,23	364 377,77	8,34	365 587,92	0,33	373 418,09	2,14
17	Jasa Lainnya	508.328,89	8,97	553 417,66	8,87	522 657,38	-5,56	526 119,11	0,66	585 262,67	11,24
Produk Domestik Regional Bruto		26.360.649,93	5,47	27 805 993,69	5,48	27 480 359,39	-1,17	28 531 108,64	**3,82**	30 214 981,95	**5,90**

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Update Data Terakhir 1 Maret 2023

Berdasarkan Tabel 1.6. di atas, PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 24.993.103,27 juta pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 27.805.993,69 juta pada tahun 2019, namun demikian pada tahun 2020 tumbuh melambat menjadi sebesar Rp. 27.480.359,39 juta dikarenakan adanya dampak Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.531.108,64,- juta seiring dengan telah melandainya pandemi Covid-19.

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada Tahun 2021, kontribusi terbesar atas dasar harga konstan masih disumbang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 37,7% atau Rp. 9.832.836,19 juta. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun dimana tumbuh tidak saja ditunjukkan dengan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meskipun tumbuh melambat, tetapi apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7.
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten
Tahun 2018-2022 (dlm Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Nilai (juta Rp.)	(%)*	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.085.464,24	11,36	4 176 852,40	10,50	4 365 911,77	10,93	4 419 237,96	10,45	4 700 658,95	10,08
2	Pertambangan dan Penggalian	1.177.376,22	3,25	1 245 553,58	3,13	1 253 648,24	3,14	1 326 274,59	3,14	1 380 561,87	2,96
3	Industri Pengolahan	13.611.869,50	16,42	14 724 441,24	37,03	14 934 776,20	37,39	15 944 978,09	37,70	17 382 637,68	37,29
4	Pengadaan Listrik dan gas	55.741,58	0,15	58 861,29	0,15	61 152,53	0,15	65 392,96	0,15	68 547,02	0,15
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14.964,95	0,04	16 371,66	0,04	17 009,23	0,04	18 373,07	0,04	18 787,65	0,04
6	Konstruksi	2.333.361,55	6,13	2 547 897,54	6,41	2 515 483,15	6,30	2 850 689,73	6,74	3 550 391,35	7,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.000.014,15	16,48	6 430 015,48	16,17	6 145 077,58	15,38	6 575 704,50	15,55	7 113 418,13	15,26
8	Transportasi dan Pergudangan	729.681,82	2,02	779 971,91	1,96	576 288,34	1,44	604 748,01	1,43	1 146 856,59	2,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.284.456,54	3,45	1 404 195,46	3,53	1 357 399,84	3,40	1 519 957,83	3,59	1 790 230,75	3,84
10	Informasi dan Komunikasi	1.252.092,63	3,88	1 419 789,34	3,57	1 674 713,98	4,19	1 766 199,59	4,18	1 812 737,67	3,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.259.961,03	3,44	1 321 513,91	3,32	1 366 584,47	3,42	1 461 024,47	3,45	1 608 103,08	3,45
1,2 112	Real Estate	477.618,78	1,30	509 514,95	1,28	510 799,94	1,28	528 373,67	1,25	563 546,50	1,21

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Nilai (juta Rp.)	(%)*	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Jasa Perusahaan	126.797,73	0,34	143 271,72	0,36	135 864,52	0,34	141 787,85	0,34	155 720,76	0,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	882.410,22	2,47	908 656,78	2,28	910 583,18	2,28	890 528,77	2,11	922 851,09	1,98
15	Jasa Pendidikan	2.606.214,15	6,96	2 881 198,28	7,25	2 898 739,98	7,26	2 942 318,98	6,96	3 022 681,72	6,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	452.676,88	1,20	495 228,51	1,25	550 782,80	1,38	557 970,43	1,32	580 278,01	1,24
17	Jasa Lainnya	642.768,49	1,70	703 188,73	1,77	670 824,63	1,68	681 695,38	1,61	795 419,89	1,71
Produk Domestik Regional Bruto		36.993.470,46	100	39 766 522,78	100	39 945 640,38	100	42 295 255,88	100	46 613 428,71	100

Sumber: BPS Kabupaten Klaten. Update Data Terakhir Per 1 Maret 2023.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 34.174.819,85 juta pada tahun 2021, meningkat menjadi sebesar Rp. 42 295 255,88 juta (atau rerata selama tahun 2017-2021 naik 19,20%).

Jika dilihat Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2021, 3 (tiga) sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah:1) Industri Pengolahan sebesar Rp. 15 944 978,09 (dalam juta) atau 37,70%, 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp. 6 575 704,50 (dalam juta) atau 15,55%, dan 3) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 4 419 237,96 (dalam juta) atau 10,45%. Tiga sektor pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku, sekalipun terdampak karena Pandemi Covid-19, tetapi masih menunjukkan geliat pertumbuhan yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian.

Sedangkan sebagai gambaran Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (persen) Tahun 2018-2022, disajikan pada Grafik 1.7.

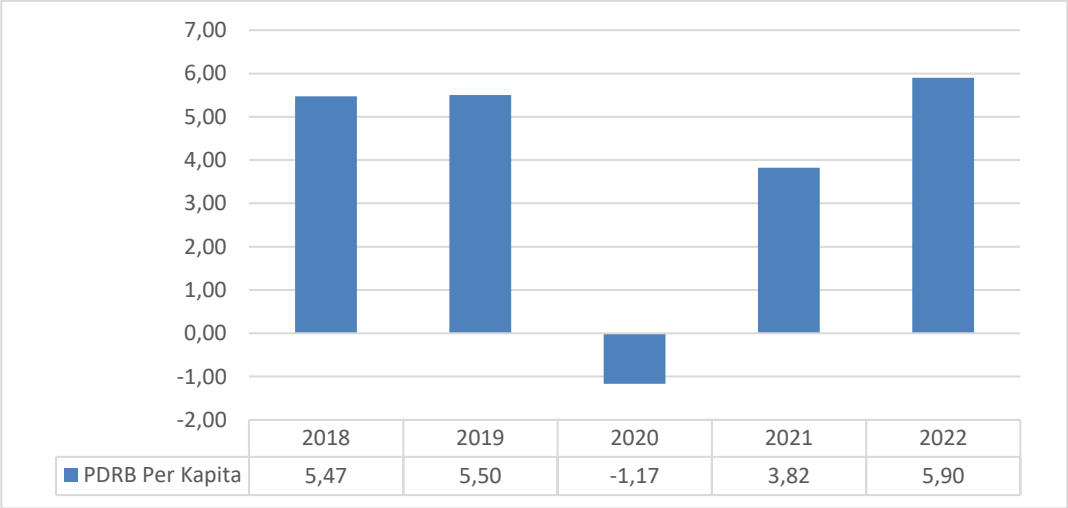

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Update Terakhir per 1 Maret 2023.

Grafik 1.7. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng (persen) Tahun 2018-2022.

Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten pada tiga tahun terakhir (2017-2019) sudah di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, hal ini menandakan perkembangan

perekonomian di Kabupaten Klaten jauh lebih baik dibanding rerata Provinsi Jawa Tengah, sekalipun pada tahun 2021 perkembangan perekonomian Klaten, maupun Jateng masih terkontraksi karena adanya pandemi *Covid-19.*

1.4. Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten

Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan jumlah ASN pada tahun 2021 sebanyak 9.112 orang, dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 8.211 orang (turun 901 ASN atau sebesar 9,89%). Penurunan jumlah ASN ini karena banyak yang memasuki purna tugas, sementara penambahan ASN sangat terbatas. Gambaran singkat profil jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2018-2022 disajikan dalam Grafik 1.8.

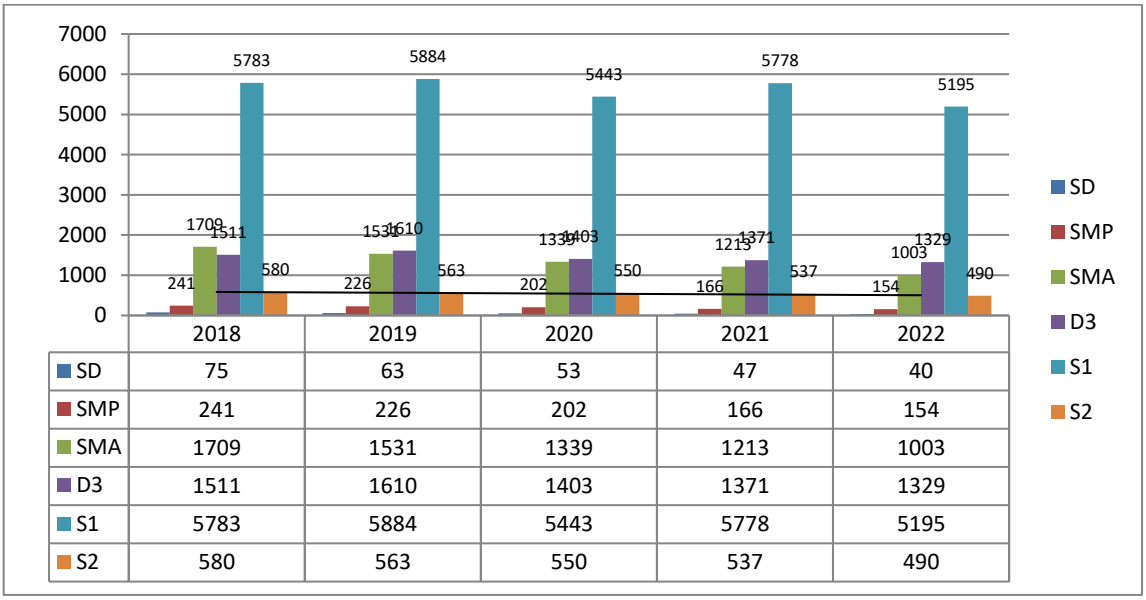

	2018	2019	2020	2021	2022
SD	75	63	53	47	40
SMP	241	226	202	166	154
SMA	1709	1531	1339	1213	1003
D3	1511	1610	1403	1371	1329
S1	5783	5884	5443	5778	5195
S2	580	563	550	537	490

Sumber : BKPSDM Update per 12 Januari 2023.

Grafik 1.8 Profil Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Berdasarkan Grafik 1.8. sebagaimana tersebut di atas, apabila dilihat dari peta penyebaran jumlah jabatan ASN Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8.
Jabatan ASN Kabupaten Klaten
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah	Orang	27	26	24	25	21
Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	Orang	2.935	2.855	2.664	557	376
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	Orang	6.963	6.940	6.449	6.007	5483
Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	Orang	-	-	-	2.523	2331

Sumber: BKPSDM Update per 12 Januari, 2023.

Berdasarkan Tabel 1.8. sebagaimana tersebut di atas, dari tahun ke tahun jumlah jabatan baik pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan pemangku jabatan fungsional tertentu cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu diantaranya jabatan struktural eselon III (Jabatan Administrator) dan eselon IV (Jabatan Pengawas) ke Jabatan Fungsional. Berikut ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9.
ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	99	116	11,26	19,37	42,78
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	52,46	60,25	60,13	0	0

Sumber: BKPSDM Update per 12 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 1.9. sebagaimana tersebut di atas, kondisi jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, maupun Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural setiap tahunnya cenderung menurun, hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat. Sedangkan manajemen pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 1.10.

Tabel 1.10.
Manajemen Pengelolaan ASN
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62	77,5	78,06	78,06	52,92
2	Indeks sistem Merit	Nilai	Na	Na	160,5	204,5	258
3	Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	99	116	42,93	155,86	42,78
4	Persentase layanan sumber daya aparatur	%	93,75	95	104,47	95,11	-
5	Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	52	56	100	103,03	-
6	Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	90	80	98	101,20	-
7	Persentase Pengembangan Aparatur	%	83 96	77,74	90,93	-	-
8	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	-	-	-	-	213
9	Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	-	-	-	-	94,14
10	Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	-	-	-	-	100
11	Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	247

Sumber: BKPSDM, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 1.10. sebagaimana tersebut di atas, kinerja kepegawaian menunjukkan trend positif, hal ini adanya pembinaan dan manajemen ASN sesuai dengan tata kelola ASN yang makin transformatif sesuai dengan peningkatan budaya kerja.

1.5. Isu Strategis

Isu strategis menjadi prioritas pembangunan jangka menengah Daerah yang menjadi skala prioritas untuk wajib ditangani permasalahannya, baik melalui intervensi kebijakan daerah maupun agenda aksi Pemerintah Kabupaten Klaten. Sedangkan isu strategis daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022, adalah:

a. Masih tingginya tingkat kesenjangan ekonomi yang ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang fluktuatif;
b. Belum meratanya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan termasuk tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kesehatan serta ketersediaan tenaga pendidik;
c. Adanya kesenjangan pemerataan kualitas infrastruktur yang dapat meningkatkan sektor-sektor pengembangan wilayah serta dampak dari bencana alam, iklim dan cuaca;
d. Adanya kondisi pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian serta peningkatan pengelolaan lingkungan yang berdampak pada kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk keselarasan dengan tata ruang;
e. Masih rendahnya upaya peningkatan iklim investasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah termasuk penguatan perekonomian desa dengan optimalisasi pengelolaan potensi-potensi lokal;
f. Berkurangnya kualitas, kuantitas, kapasitas dan partisipasi sumber daya manusia dalam rangka pembangunan daerah;
g. Perlu adanya peningkatan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung dari kapasitas kelembagaan dan ketatatlaksanaan Perangkat Daerah termasuk aparaturnya;
h. Adanya Pandemi Covid-19 selain mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan juga memberikan dampak yang luar bisa terhadap seluruh sektor-sektor pembangunan, utamanya dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi; dan

i. Kebutuhan untuk penguatan dan prioritas pembangunan utamanya dibidang kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi daerah dan jaring pengaman sosial akibat dampak Pandemi Covid-19.

BAB II
PERENCANAAN

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkankan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: "*Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur*". Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: "*Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari*". Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: "*Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya*". Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan

BAB II PERENCANAAN KINERJA, berisi :
- *2.1 Rencana Strategis*
- *2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022*
- *2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Tahun 2022*

kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah:

MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA

Dasar filosofi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, yakni:

1. ***Klaten*,** diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. ***Maju*,** yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.

3. ***Mandiri*,** yang dimaksud mandiri adalah kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

4. ***Sejahtera***, yang dimaksud sejahtera adalah kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial,

pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya

Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong-royong dan berwawasan kebangsaan.

Sasaran : Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Misi 2

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur dan Bersih, Transparan, Bertujuan dan Anti Korupsi

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance)*.

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi 3

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.

Sasaran 1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi.

Sasaran 2: Meningkatnya investasi daerah.

Misi 4

Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan infrastrukur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah.

Sasaran 2: Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100).

Sasaran 3: Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan.

Misi 5

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran.

Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing.

Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran 3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak.

Misi 6

Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sasaran 2: Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3).

Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ada sebanyak 9 indikator kinerja dan dijabarkan dalam 16 sasaran dan 34 indikator sasaran sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1.1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (*Ipoleksosbud*) yang diselesaikan
		1.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	2.1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)
		2.2	Peringkat/ Nilai SAKIP
		2.3	Opini Laporan Keuangan
		2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		2.5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN
3	Meningkatnya kualitas pelayanan public	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonom	4.1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
		4.2	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan
		4.3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
		4.4	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata
5	Meningkatnya investasi daerah	5.1	Persentase peningkatan investasi PMDN
		5.2	Persentase peningkatan investasi PMA
6	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	6.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap
		6.2	Persentase drainase dalam kondisi baik
		6.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
7	Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)	7.1	Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan sanitasi)
8	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	8.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang
9	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	9.1	Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*)
10	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	10.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)
		10.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
		20.3	Persentase pemajuan kebudayaan
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11.1	Usia Harapan Hidup (UHH)
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	12.1	Persentase PMKS yang tertangani
		12.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		12.3	Indeks Desa Membangun (IDM)
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	13.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		13.2	Skor Kabupaten Layak Anak
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	14.1	Indeks Kualitas Air
		14.2	Indeks Kualitas Udara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
		14.3	Indeks Kualitas Lahan Tutupan
15	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	15.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	16.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sumber: RPJMD Kabupaten Klaten 2021-2026.

2.1.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi bupati terpilih pada periode tahun 2021-2026 yakni ***Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*** dengan menetapkan 6 (enam) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan *ultimate goal*. Maka agar *ultimate goal* ini jelas sasarannya, dan dapat diimplementasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai *milestone* (sasaran antara) dalam mewujudkan visi.

Gambaran tema/agenda pembangunan dari tahun 2021-2026 dapat disajikan dalam Diagram 2.1.

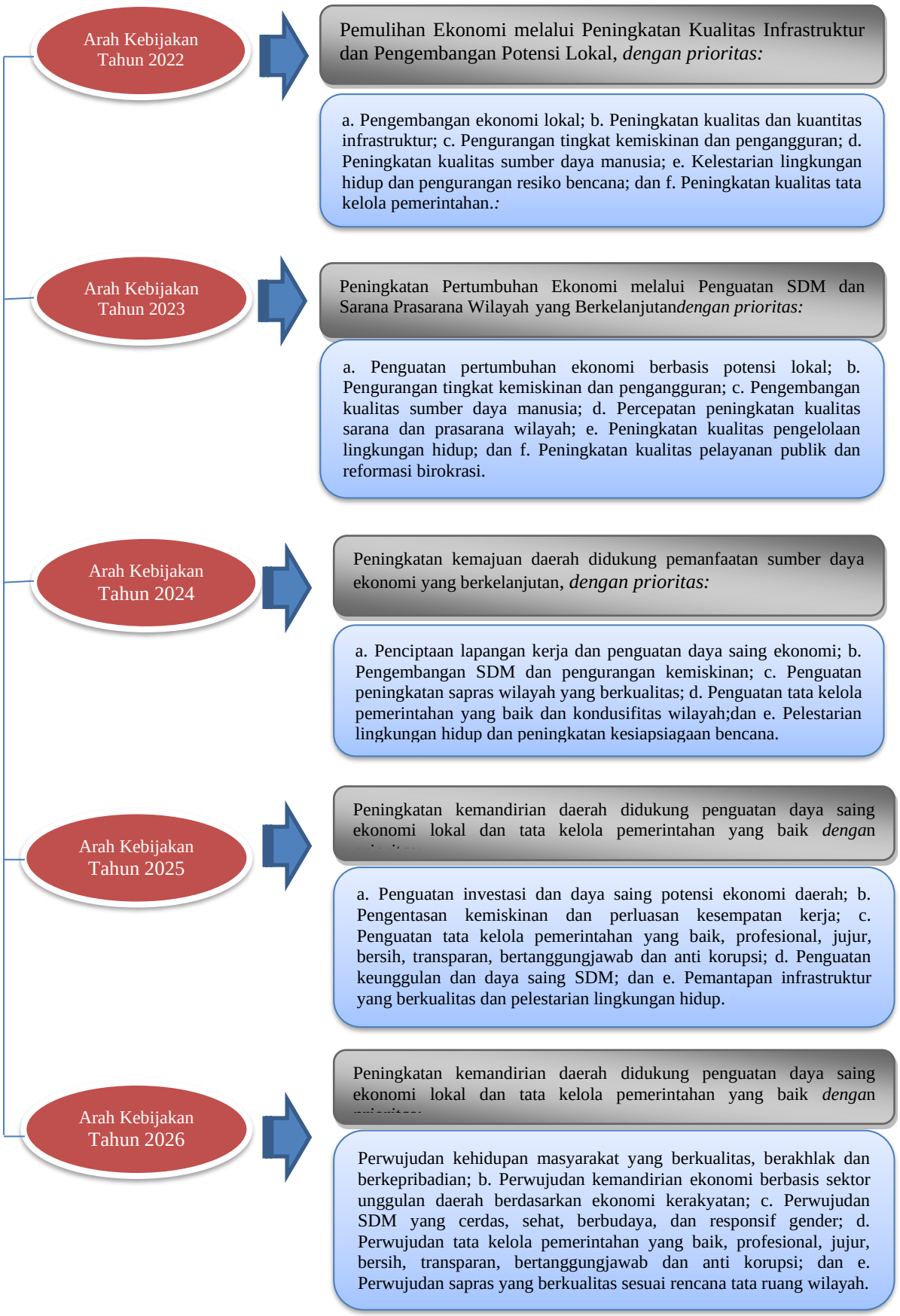

Diagram 2.1. Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditetapkan mengacu pada RKPD 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1.1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100
		1.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	2.1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71
		2.2	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62
		2.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
		2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2
		2.5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	202
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82
4	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonom	4.1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	1,47

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		4.2	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	1,24
		4.3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63
		4.4	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,13
5	Meningkatnya investasi daerah	5.1	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50
		5.2	Persentase peningkatan investasi PMA	%	1
6	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	6.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06
		6.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47
		6.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5
7	Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)	7.1	Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32
8	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	8.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,40
9	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	9.1	Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*)	Nilai	0,62
10	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	10.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52
		10.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85
		20.3	Persentase pemajuan kebudayaan	%	5
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76.84
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	12.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5
		12.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16
		12.3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7034
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	13.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,34
		13.2	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725
14	Meningkatnya kualitas lingkungan	14.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	36,63

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	hidup yang berkelanjutan				
		14.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,80
		14.3	Indeks Kualitas Lahan Tutupan	Indeks	42,90
15	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	15.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	16.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92

Sumber: RKPD Kabupaten Klaten 2022.

2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya untuk mencapainya kemudian dijabarkan kedalam program prioritas untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah Daerah. Adapun program prioritas untuk mendukung tercapainya sasaran, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Program Pendukung (Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Klaten Toleran	1
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Klaten Cekatan	6
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Klaten Cerdas	5

No	Sasaran Strategis	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Program Pendukung (Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonom	Klaten Mapan	6
5	Meningkatnya investasi daerah	Klaten Keren	7
6	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Klaten Mantap	4
7	Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)	Klaten Mantap	1
8	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Klaten Lestari	2
9	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	Klaten Mantap	1
10	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Klaten Tuntas	2
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Klaten Waras	2
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Klaten Laris Klaten Santer Klaten Subur Klaten Cetar Klaten Tangkis	5 3 1 4 6
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Klaten Tangkis	1
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Klaten Lestari	3
15	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Klaten Lestari	1
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Klaten Tangguh	2
		Jumlah	63

Sumber: RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan pembangunan Daerah.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan telah mampu mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA,
berisi :
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.3 Akuntabiiltas Anggaran
3.4 Efisiensi Sumber Daya

Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun

skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,01	Sangat Tinggi	
2	75,01≤ 90,00%	Tinggi	
3	65,01 ≤ 75,00%	Sedang	
4	50,01 ≤ 65,00%	Rendah	
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	< 50,00%	Sangat Tinggi	
2	50,01% - 65,00%	Tinggi	
3	65,01% - 75,00%	Sedang	
4	75,01% - 90,00%	Rendah	
5	> 90,01%	Sangat Rendah	

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, capaian indikator kinerja organisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1.1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya *(Ipoleksosbud)* yang diselesaikan	%	100	100	100,00
		1.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	95,89	95,89
2	Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71	75,91	106,92
		2.2	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62	65,14	105,06
		2.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100
		2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2	N/A	N/A
		2.5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	202	258	127,72
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	83,46	101,78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
4	Mengoptimalkan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	4.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,47	3,91	265,99
		4.2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	1,24	4,03	325
		4.3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63	1,61	98,77
		4.4	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	3,13	64,14	2049,20
5	Meningkatnya Investasi Daerah	5.1	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	50	158	316,00
		5.2	Persentase Peningkatan Investasi PMA	%	1	139	13900,00
6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	6.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06	91,11	100,05
		6.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47	61,99	100,85
		6.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5	44,91	108,22

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)	7.1	Persentase Capaian *Universal Access* (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32	97,68	99,35
8	Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang	8.1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,40	95,03	107,50
9	Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan	9.1	Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*)	Nilai	0,62	0,62	100,00
10	Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing	10.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52	13,40	99,11
		10.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85	9,09	102,71
		10.3	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	5	100,00
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	11.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,84	76,95	100,14
12	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	12.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5	87,39	129,46
		12.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16	4,31	116,50
		12.3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7034	0,7034	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
13	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	13.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,34	71,88	98,01
		13.2	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725	629,80	86,87
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	14.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	36,63	47,69	130,19
		14.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,80	87,85	112,92
		14.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,90	42,55	99,19
15	Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)	15.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95	56,08	93,54
16	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	16.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,94	102,17

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (*tigat puluh empat)* yang terdiri dari: 33 (*tiga puluh tiga*) indikator yang sifatnya progresif, dan 1 (*satu)* indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** ***(***atau interval nilai realisasi kinerja **≥ *90,01)*** sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 91,18%, diantaranya:

1) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan;
2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
3) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI);
4) Peringkat/ Nilai SAKIP;
5) Opini Laporan Keuangan;
6) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN;
7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
8) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan;
9) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan;
10) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan;
11) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;
12) Persentase Peningkatan Investasi PMDN;
13) Persentase Peningkatan Investasi PMA;
14) Persentase jalan dalam kondisi mantap;
15) Persentase drainase dalam kondisi baik;
16) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
17) Persentase Capaian Universal Access (kumuh, air minum dan sanitasi);
18) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang;

19) Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service);
20) Harapan Lama Sekolah (HLS);
21) Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
22) Persentase Pemajuan Kebudayaan;
23) Usia Harapan Hidup (UHH);
24) Persentase PMKS yang Tertangani;
25) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
26) Indeks Desa Membangun (IDM);
27) Indeks Kualitas Air;
28) Indeks Kualitas Udara;
29) Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
30) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan
31) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja ***75,01 ≤ 90,00*** sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 2,94%, diantaranya:
   1) Skor Kabupaten Layak Anak.

c. Ada 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mempunyai nilai kinerja baik di tahun 2021 sebesar 2,74 sehingga di tahun 2022 tidak diikutkan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena yang diikutkan dalam penilaian Indeks SPBE bagi instansi dengan nilai di bawah 2,60.

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan ***Skala Nilai Peringkat Kinerja*** sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan

Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1.

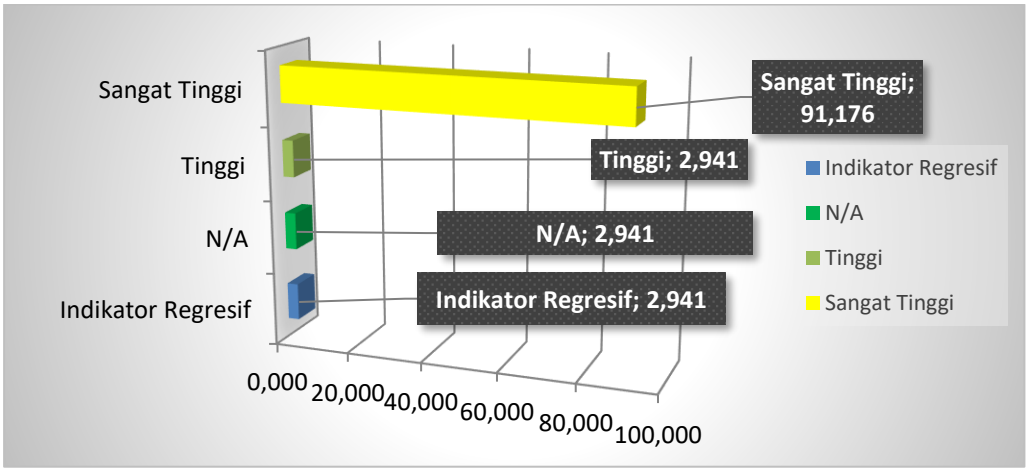

Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Sasaran Strategis

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *Tercapai (Berhasil Menekan) atau sangat tinggi*, dengan nilai realisasi kinerja skala <50,00% sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

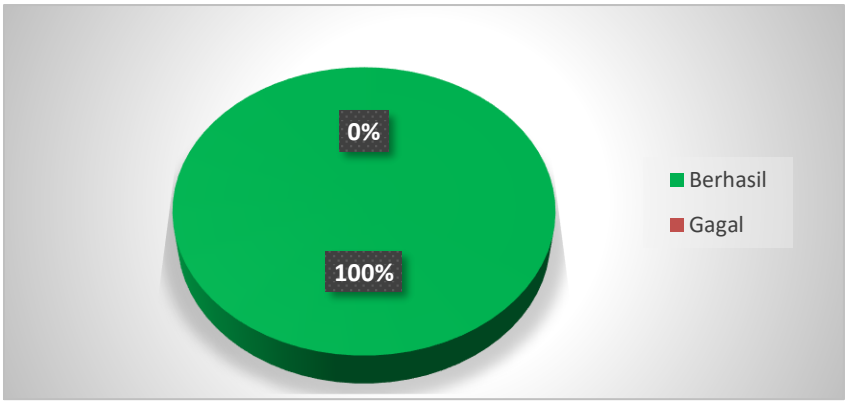

Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Regresif

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif* maka diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.2.

3.2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*

1. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu dukungan semua pihak dalam mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2022.

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur

Ukuran keberhasilan terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur dengan indikator:1) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (*Ipoleksosbud*) yang diselesaikan, dan 2) Persentase Perda dan Perkada

yang ditegakkan. Adapun capaian sasaran: ***Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*** disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92,00	92,24	91,60	100	95,89	95,89	100	95,80

Sumber: Bakesbangpol, dan Satpol PP, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan Capaian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tabel 3.4. di atas, persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang disesesaikan pada tahun 2022 adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Konflik yang terjadi di tahun 2022 adalah kenakalan remaja yang sebanyak 2 (dua) kali. Keduanya terjadi pada saat kerusuhan suporter sepakbola dengan waktu yang berbeda dan semuanya bisa diselesaikan. Meski bisa dikatakan konflik yang terjadi sedikit tetapi tetap

harus waspada mengingat mendekati Tahun 2024 adalah tahun politik, maka isu-isu negatif terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkat. Cakupan penegakan Perda pada tahun 2021 mencapai 92,00% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 95,89% (dari sebanyak 146 kasus penegakan Perda dan yang diselesaikan sebanyak 140 kasus), kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah sangat baik. Mengingat juga luas wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta untuk menekan Angka Kriminalitas menjadi penting dalam menjaga kondusivitas daerah.

Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya :

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkhohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban					
			PGOT		PSK/WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2018	15	8	6	10	78	18	7
2	2019	20	12	5	12	37	38	8
3	2020	16	17	15	6	54	31	17
4	2021	21	31	10	9	53	12	4
5	2022	16	9	15	11	23	4	4
S A N K S I								
- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan. - Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang. - Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna *assesment* dan tindak lanjut. - Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.								

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.5. sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat bersifat fluktuatif jumlahnya dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan:

a. Tingkat kesadaran hukum warga masyarakat yang rendah;
b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;

c. Gaya hidup dan kemajuan teknologi mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Sementara itu Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan

Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol

Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2018	0	0	0	0	0
2	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
3	2020	4	0	45 botol	18 botol	138 botol
4	2021	1	0	47 botol	0	44 botol
5	2022	1	0	10 botol	0	24 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu; - Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: SATPOL PP, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.6. sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkhohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya

masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya potensi ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja perlu dicegah, sebelum ancaman itu terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentramaan Umum
Tahun 2018-2022

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	-	1	-	1	-
2.	Konflik Sara	1	1	8	-	-
3.	Gerakan Radikalisme	2	1	-	-	-
4.	Kenakalan remaja	4	1	-	8	2

Sumber: BAKESBANGPOL, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.7. sebagaimana tersebut di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Gerakan radikalisme Kabupaten Klaten pada tahun 2022 tidak ada, karena intensifnya kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk meminimalisir permasalahan radikalisme. Namun kenakalan remaja masih ditemui, karena tingginya mobilitas sosial anak muda dan yang mudah lepas kontrol, mendorong untuk

berbuat asosial. Upaya yang dilakukan Bakesbangpol lebih bersifat persuasif atau mencegah sebelum permasalahan ketentraman umum terjadi.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: *Jumlah kriminalitas tertangani/jumlah penduduk X 10.000 (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)* maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut:

a. Tahun 2018 :1,89.
   Jumlah kriminalitas tertangani 248 kasus dibagi jumlah penduduk 1.314.781 jiwa dikali 10.000
b. Tahun 2019 : 2,73
   Jumlah kriminalitas tertangani 361 kasus dibagi jumlah penduduk 1.323.609 jiwa dikali 10.000
c. Tahun 2020 : 1,19
   Jumlah kriminalitas tertangani 158 kasus dibagi jumlah penduduk 1.330.802 jiwa dikali 10.000.
d. Tahun 2021 : 1,80
   Jumlah kriminalitas tertangani 230 kasus dibagi jumlah penduduk 1.276.030 jiwa dikali 10.000.
e. Tahun 2022 : 1,75
   Jumlah kriminalitas tertangani 223 kasus dibagi jumlah penduduk 1.277.455 jiwa dikali 10.000.
   Sumber BAKESBANGPOL, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang, sehingga penanganannya pun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari ataupun tidak. 3). Selain itu

rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparatur penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: ***Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*** dengan dukungan program, diantaranya:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan:
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Permasalahan:

1) Total pelanggaran K3 pada tahun 2022 sebanyak 1.282 pelanggaran, diantaranya: pelanggaran reklame, perijinan usaha, Menara telekomunikasi, PKL dan bangunan liar;
2) Belum optimalnya rasio petugas Satuan Polisi Pamong Praja, pada tahun 2022 sebesar 0,3 per 10.000 penduduk dengan jumlah penduduk sebanyak 1.267.272 jiwa; dan
3) Menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dan semakin meningkatnya penyebaran ajaran anti Pancasila.
4) Menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat dengan adanya kejadian terorisme setiap tahunnya, meski kejadiannya tidak

terjadi di wilayah Kabupaten Klaten namun warga Klaten menempati peringkat pertama dalam jumlah eks napiter terbanyak di Indonesia.

Solusi:

Adapun faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi guna menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mentaati peraturan daerah yang belaku melalui program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
3) Pembumian nilai-nilai Pancasila (usia sekolah dan masyarakat umum) secara masif dan berkesinambungan/berkelanjutan dan kerjasama dengan semua stakeholder, untuk sedini mungkin memberi pemahaman yang komprehensif tentang bahaya ajaran radikalisme.
4) Sosialisasi moderasi beragama dan pluralisme budaya Indonesia, baik di sekolah maupun masyarakat umum untuk menangkal paham-paham intoleransi yang mengarah pada perbuatan terorisme.

2. Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benefit akan kelihatan pada capaian progres kinerjanya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ***Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*** upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan, disamping perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang transparan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan indikator:1) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI), 2) Peringkat/Nilai SAKIP, 3) Opini Laporan Keuangan, 4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan 5) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah*** tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,54	N/A	N/A*	71	75,91	106,92	83,00	91,46
2	Peringkat/Nilai SAKIP	62,88	61,32	62,07	62	65,14	105,06	65	100,22
3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	3	3	3,2	N/A	N/A	4	N/A
5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	78	77,5	78	202	258	127,72	260	99,23

Sumber : ITDA, Setda Bagian Organisasi, BPKPAD, Diskominfo, BKPSDM. Update Terakhir 12 Januari 2023.

Capaian sasaran: *Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah* yang diukur dengan indikator tersebut dapat diuraikan sebagai-berikut:

1) Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar

untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Pemerintah Daerah, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan *expert*/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh *(trading in influence)*, pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah tersebut, juga semakin baik. Adapun Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh Pemerintah Daerah tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2019-2022 disajikan pada Grafik 3.1.

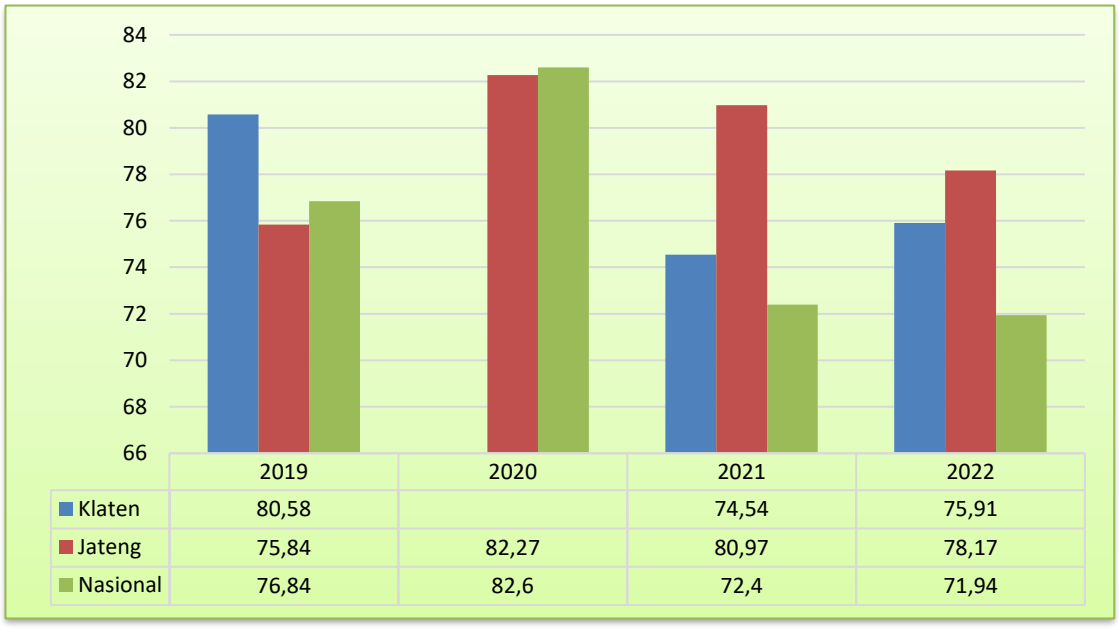

	2019	2020	2021	2022
Klaten	80,58		74,54	75,91
Jateng	75,84	82,27	80,97	78,17
Nasional	76,84	82,6	72,4	71,94

Grafik 3.1. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2022

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2023.

*) SPI Klaten Tahun 2020 ditiadakan oleh KPK-RI sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh K/L/PD di Eks-Karesidenan Surakarta pada tahun 2021-2022 diperoleh hasil sebagaimana Grafik 3.2.

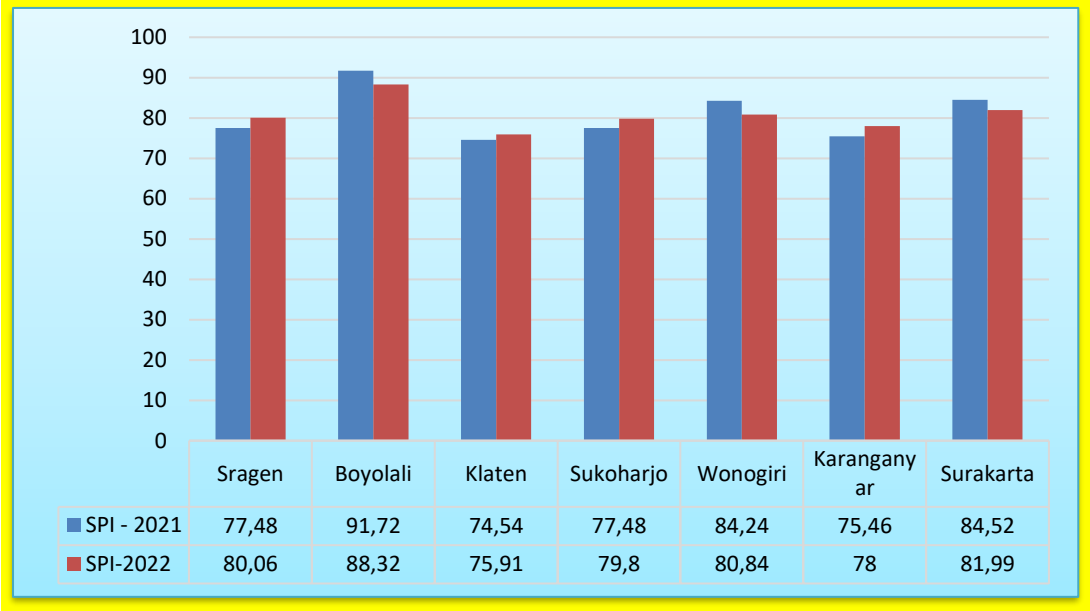

Grafik; 3.2 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021-2022

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2023.

Berdasarkan Grafik 3.2. sebagaimana tersebut di atas, posisi capaian SPI-2021 Klaten (74,54) berada paling bawah di antara capaian SPI-2021 se eks-karesiden Surakarta, dan di bawah rata-rata capaian SPI-2022 Klaten (75,91), Jateng (78,17), dan di atas capaian SPI-2022 Nasional (71,94). Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Klaten Tahun 2022 yang dilakukan KPK-RI dengan rekomendasi sebagai-berikut:

1) Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.

2) Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/ pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan relatif rendah. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
3) Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjalanan dinas tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
4) Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan *vendor* tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari *vendor* pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
5) Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/ golongan/organisasi.
6) Risiko perdagangan pengaruh *(trading in influence)* berada dalam tingkat sedang. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
7) Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi perlu tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan,

melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.

8) Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
9) Kalangan eksternal menilai setidaknya ada satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan yang masih memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakukan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/ melaksanakan tugas.
10) Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Berdasarkan pada temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Klaten dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

1) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
2) Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.

3) Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
4) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Penggunaan vendor management system. (5) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
6) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan intervensi yang tidak sesuai aturan berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Adanya larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Kebijakan,regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Upaya peningkatan integritas bagi calon

pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.

7) Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.
8) Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik.
9) Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan halhal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru untuk melaksanakan tugas. (3) Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/ pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat. (5) Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait kinerja indikator Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan dukungan program, diantaranya:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengawasan adalah sebagai berikut:

a) Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
b) Proses perencanaan, pengangangaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan amplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
c) Profesionalitas dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; dan
d) Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Solusi:

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang pengawasan adalah sebagai berikut:

a) Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan; dan
b) Mensinergikan atau mengintegasikan perencanaan, pengangangaran, sampai laporan kinerja dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dan menghubungkan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.

2) Peringkat/Nilai SAKIP.

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021−2026 mengupayakan pentingnya ***Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih*** yang dijabarkan ke dalam sasaran jangka menengah Daerah, yakni ***Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah***.

Capaian kinerja SAKIP telah menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 sesuai dengan ranwal RPJMD 2021-2026 sebesar 62, dengan realisasi sebesar 62,88 (dengan Kategori B) dan target pada tahun 2022 dengan nilai 62 dengan realiasasi nilai sebesar 65,14 (dengan Kategori B), sehingga meningkat sebesar 2,26 poin.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 65,14 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
   - Perencanaan Kinerja nilai 21,30
   - Pengukuran Kinerja nilai 18,56
   - Pelaporan Kinerja nilai 10,73
   - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 14,55
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;

a) Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
b) Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.

b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
a) Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
b) Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.

c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan

d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3) Opini Laporan Keuangan

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),* kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, tranparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018−2021 disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2018−2021

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2018	WTP	*Paragraf penjelas berupa:* pengendalian rekening pengelolaan KAS dan mekanisme pembayaran langsung masih lemah. Pengelolaan piutang PBB perdesaan dan perkotaan tidak tertib.
2019	WTP	*Paragraf penjelas berupa:* 1. Pengelolaan Rekening Pemkab dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya Rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemkab Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib. 2. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemkab belum optimal, diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.
2020	WTP	*Paragraf penjelas berupa:* 1. Belanja dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp.5,11 Milyar, diantaranya terdapat realisasi Belanja Honor bagi ASN senilai Rp,3,83 Milyar dan terdapat realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi kepada ASN dan pegawai di sekolah senilai Rp.1,28 Milyar. 2. Pengendalian pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta sistem informasi persediaan belum memadai, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melaksanakan penatausahaan dan pencatatan persediaan secara tertib dan sistem informasi persediaan

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
		pada OPD Puskesmas, instalansi Farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras belum memadai. 3. Penataan usahaan dan pengamanan aset tetap pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal diantaranya terdapat tujuh bidang tanah milik desa masih tercatat pada KIB A. 12 tanah dan 24 ruas jalan lingkungan belum masuk SK Bupati, serta terdapat aset tetap milik sekolah swasta dan SMA/SMK yang masih tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
2021	WTP	*Paragraf penjelas berupa:* 1. Aset pasar rakyat berupa kios yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM digunakan oleh pedagang yang tidak berhak, dan digunakan untuk tempat tinggal. 2. Ketidakjelasan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT KBBP dalam pengelolaan Pasar Delanggu, berakibat penerimaan dan kontribusi kerjasama tidak tertagih.

Sumber: BPKPAD, Update Terakhir 11 Januari 2023.
Catatan: Opini BPK tahun 2022 In Proses.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.9. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsif akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait indikator Opini Laporan Keuangan dengan dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengelolaan keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan masih diketemukan beberapa temuan penggunaan keuangan Daerah yang belum efektif dan efisien;
b) Penyajian laporan keuangan yang dilakukan belum lengkap atas dasar prinsip akuntabilitas dan estimasi yang signifikan; dan
c) Proporsi PAD terhadap APBD tahun 2021 sebesar 12,27%, dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 13,92% (atau naik 0,65%).

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan keuangan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan koordinasi semua pihak pengelola barang dan jasa daerah;
b) Optimalisasi sumber-sumber pedapatan daerah lainnya;
c) Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten tidak termasuk *checklist* Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang tertuang pada Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 untuk wajib mengikuti pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2022.

Pemantauan dan evaluasi tahun 2022 hanya wajib bagi IPPD dengan Indeks SPBE tahun 2021 kurang dari 2,60 (Posisi Kabupaten Klaten pada 2021 Indeks SPBE mencapai 2,74). Kandidat IPPD dengan Indeks SPBE tahun 2021 lebih dari 2,60 dan mendaftarkan pengajuan/usulan dengan pertimbangan jika tersedia kuota, tetapi lebih diprioritaskan pada IPPD dengan Indeks SPBE Tahun 2021 kurang dari 2,60.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait pencapaian indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan dukungan program, diantaranya:

a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; dan
b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

a) Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan website Daerah; dan
b) Belum optimalnya persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan tahun 2022 menjadi sebesar 18,18%

Solusi:

Faktor **penentu** keberhasilan untuk memperbaiki Komunikasi antara lain sebagai berikut:

a) Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD; dan
b) Melakukan inisiasi, pembinaan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

5) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

Pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil

dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dasar hukum pelaksanaan sistem merit adalah:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
e. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN meliputi 8 (delapan) Aspek terdiri dari:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
b. Pengadaan Pegawai
c. Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi
d. Mutasi, Rotasi dan Promosi
e. Manajemen Kinerja
f. Penggajian, penghargaan dan disiplin
g. Perlindungan dan pelayanan ASN
h. Sistem Pendukung Pelaksanaan

Penilaian Mandiri Sistem Merit di Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 hasil yang diperoleh dengan skor 160,5 (atau dengan kategori buruk). Pada tahun 2021 hasil Penilaian Sistem Merit diperoleh hasil dengan skor 204,5 (atau dengan kategori kurang).

Hasil penilaian sistem merit untuk tahun 2022 Kabupaten Klaten mendapatkan anugerah meritokrasi dari KASN karena keberhasilan capaian nilai Penerapan Sistem Merit pada kategori III "BAIK" dengan nilai 258 (dua ratus lima puluh delapan). Direncanakan hasil penilaian Merit Sistem Kabupaten Klaten sesuai RPJMD 2021-2026 akan bernilai baik pada tahun 2025. Berbagai komponen pendukung penilaian sistem Merit yang dilakukan, diantaranya:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun 2022 menurun jika dibandingkan tahun 2021, penurunan disebabkan banyaknya PNS yang memasuki pensiun tetapi formasi penggantinya belum terisi. Sebagai catatan untuk tahun 2018 s/d 2022 data Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum) digabungkan dengan data Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah. Adapun perkembangan jumlah jabatan ASN pada periode tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10.

Perkembangan Jumlah Jabatan ASN

Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	27	26	24	25	21
2	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	2.935	2.855	2.664	557	376
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	6.963	6.940	6.449	6.007	5483
4	Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	Orang	-	-	-	2.523	2331

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, Update Terakhir 11 Januari 2023

b. Pengadaan CPNS

Secara umum proses pengadaan CASN formasi 2022 di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan PPPK Guru untuk mengisi kekurangan formasi 585 telah berproses sebagi berikut :
   a. Pengumuman seleksi 31 oktober 2022
   b. Pendaftaran peserta 31 oktober s.d 13 November 2022
   c. Seleksi observasi 27 November s.d 29 November 2022
   d. Penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM 3 s.d 4 Desember 2022
   e. Tahapan pengolahan penilaian kesesuaian hasil masih menunggu dari Panselnas.
2. Tahapan pelaksanaan PPPK Tenaga Kesehatan untuk mengisi 89 formasi :
   a. Pengumuman seleksi 3 s.d 17 November 2022;
   b. Pendaftaran seleksi 3 s.d 22 November 2022;
   c. Seleksi Administrasi 3 s.d 23 November 2022;
   d. Seleksi kompetensi 14 s.d 15 Desember 2022;
   e. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 30 Desember 2022;
   f. Hasil seleksi kompetensi terisi 75 formasi.
3. Tahapan pelaksanaan PPPK Tenaga Teknis untuk mengisi 75 Formasi:
   a. Pengumuman seleksi 21 Desember 2022;
   b. Seleksi Administrasi 22 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023;
   c. Pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pengumuman hasil seleksikompetensi pada tahun 2023.

c. Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi

Pengembangan karier dan peningakatan kompetensi sumber daya aparatur dilakukan dengan mengikuti: diklat, bimtek dan seminar bagi ASN. Total jumlah ASN di Kabupaten Klaten tahun 2022 sebanyak

8.211 orang, sebanyak 3.513 ASN (42,78%) sudah pernah mengikuti diklat, bimtek dan seminar. Adapun perkembangan jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.

Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar

Tahun 2018−2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	Orang	450	353	20	198	-
2	Diklat Teknis Fungsional	Orang	312	5.648	5.050	4.720	-
3	Bimbingan Teknis	Orang	58	-	-	-	-
4	Seminar dan sejenisnya	Orang	-	-	2	-	-
5	Diklat Teknis	Orang	-	-	-	-	293
6	Diklat Jabatan (Diklat latsar, Diklatpim, dan diklat fungsional)	orang	-	-	-	-	3.220
	Jumlah	Orang	820	6.001	5.072	4.918	3.513

Sumber:BKPSDM, Update Terakhir 11 Januari 2023

Pelaksanaan diklat, bimtek dan seminar yang dibiayai APBD pada tahun 2022 sebanyak 3513 atau sebesar 42,78 % dari total kesuluruhan jumlah ASN sebanyak 8211 ASN.

d. Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya aparatur melalui berbagai program/kegiatan yang mendukung *Performance appraisal* aparatur. *Performance appraisal* atau sering juga disebut sebagai *performance review*, *performance evaluation*, atau *employee appraisal* adalah sebuah metode dimana kinerja seorang karyawan didokumentasikan dan dievaluasi. Adapun Manajemen pengelolaan

Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.

Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara ASN

Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62	77,5	78,06	78,06	52,92
2	Indeks sistem Merit	Nilai	Na	Na	160,5	204,5	258
3	Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	99	116	42,93	155,86	42,78
4	Persentase layanan sumber daya aparatur	%	93,75	95	104,47	95,11	-
5	Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	52	56	100	103,03	-
6	Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	90	80	98	101,20	-
7	Persentase Pengembangan Aparatur	%	83 96	77,74	90,93	-	-
8	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	-	-	-	-	213
9	Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	-	-	-	-	94,14
10	Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	-	-	-	-	100
11	Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	247

Sumber:BKPSDM, Update Terakhir 11 Januari 2023.

Berdasarkan data informasi manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) disampaikan beberapa hal, diantaranya:

a. Terkait tingginya persentase kualifikasi Calon ASN sesuai formasi dikarenakan lonjakan adanya penyelesaian formasi PPPK ditahun 2021 sebanyak 1.977 dari formasi yang harus diselesaikan sebanyak 2.500 PPPK dan dari CPNS sebanyak 149 CPNS. Tahun 2022 target sebesar 1000 CASN tercapai 2.126 CASN atau 212,6%;
b. Tingginya Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah disebabkan oleh tingginya penyelesaian mutasi pengangkatan CPNS ke PNS, mutasi pengangkatan Jabatan fungsional guru, Mutasi penempatan PPPK.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait capaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit ASN dengan dukungan program, diantaranya:

1) Program Kepegawaian Daerah; dan
2) Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a) Masih rendahnya peningkatan pengembangan kompetensi (diklat dan sejenisnya); dan
b) Masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Kabupaten Klaten yaitu 52,92.

Solusi :

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk mengembangkan kompetensi ASN;

b) Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN (diklat dan sejenisnya) lewat berbagai cara (diklat dan sejenisnya) secara daring, pengembangan kompetesi kerjasama dengan instansi vertikal, pengembangan kompetensi yang diselenggarakan langsung oleh OPD (workshop, seminar, sosialisasi, magang, PKS dll);

c) Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk mendukung SIASN BKN dalam rangka perbaikan nilai IPASN.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benefit akan kelihatan pada capaian progres kinerjanya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik*** dilakukan dengan mendorong transparansi penggunaan

anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan yang ketat, disamping perlunya laporan pertanggungjawaban yang transparan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik*** tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,17	81,31	81,88	82	83,46	101,78	84,00	99,36

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa ***Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)*** merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pada 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah

ditentukan. Atribut kepuasan SKM dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur layanan, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk, kompetensi, perilaku, maklumat, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama tahun 2018-2022 Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan hasil Capaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 3.3.

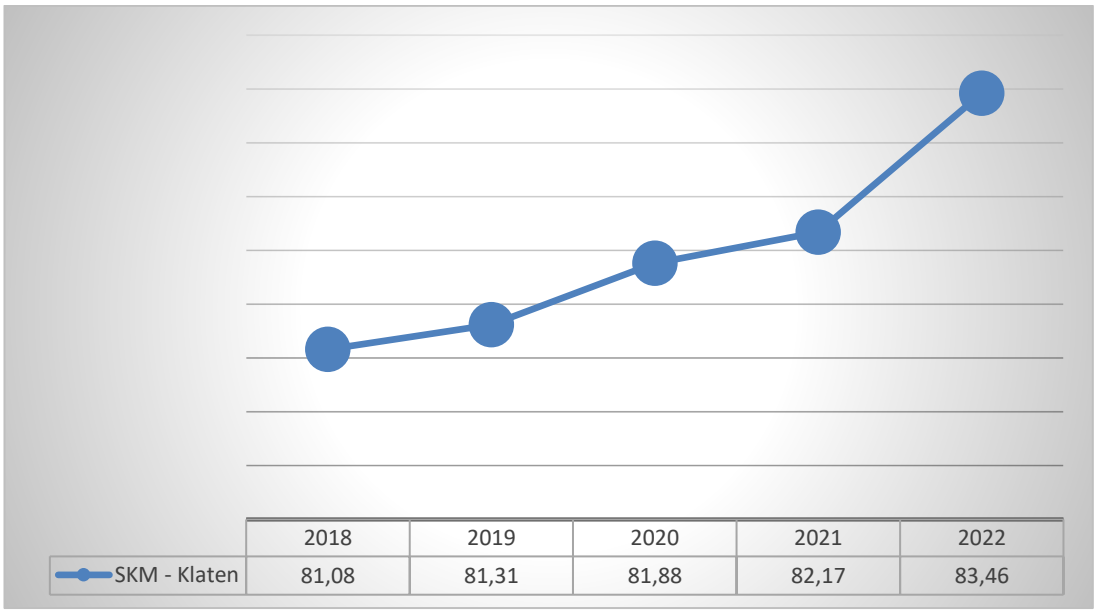

Grafik 3.3. Perkembangan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018-2022
Sumber: Setda Bagian Organisasi, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa IKM dari tahun 2018-2022 menunjukkan trend meningkat, hal ini disebabkan penilaian pada setiap unsur pelayanan juga meningkat. Peningkatan signifikan didapatkan dari unsur biaya/tarif, karena pada pelayanan publik di Kabupaten Klaten sebagaian besar tidak dipungut biaya (gratis). Meskipun beberapa masih ada pelayanan yang dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti layanan perizinan tertentu. Unsur lainnya yang mempengaruhi kenaikan nilai IKM adalah unsur sarana prasarana yang dinilai baik oleh masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik* dengan dukungan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan:

a. Terbatasnya inovasi pelayanan, untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.
b. Terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan di Unit Pelayanan dengan menempelkan Maklumat Pelayanan terutama di lingkungan penyelenggara pendidikan dan kesehatan.
c. Belum optimalnya peningkatan kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja pelayanan serta melayani pemohon sesuai dengan prioritas permasalahan.
d. Belum maksimalnya peningkatkan mutu pelayanan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana yang memadai bagi pengguna pelayanan (misalnya penyediaan *Running Tape* tentang Kondisi wilayah, kawasan rawan bencana untuk memonitor situasi).

Solusi:

Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya melakukan inovasi dan melengkapi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat. Meskipun sudah dinilai baik, perlu dilakukan upaya yang lebih optimal guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga nilai IKM ***B (Baik): 76,61 - 88,30*** bisa ditingkatkan setiap waktu.

4. Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Sektor perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Sedangkan sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor penyangga utama terhadap kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat, apalagi ditopang menguatnya sektor industri, perdagangan, perikanan dan pariwisata sebagai andalan perkembangan daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi** upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi Daerah.

Ukuran keberhasilan mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator: 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, 2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan, dan 4) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata. Adapun capaian sasaran: ***Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi*** disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,68	6,50	-1,20	1,47	3,91	265,99	4,09	95,60
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,65	4,31	-4,79	1,24	4,03	325	3,96	101,77
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	1,14	0,52	2,12	1,63	1,61	98,77	3,14	51,27
4	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	3,12	31,03	-47,35	3,13	64,14	2.049,20	4,58	1400,44

Sumber: Disperinaker, DKUKMP, DKPP, Disbudporapar, Update Terakhir 16 Januari 2023.

*) angka sementara

Capaian sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* yang diukur dengan indikator: Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata sebagaimana Tabel 3.14. di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang

besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 37,70% (15.944.978,09 juta) pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 37,29% (17.382.637,68 juta).

Berdasarkan basis sebaran kecamatan, sektor industri manufaktur berdasarkan kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan. Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu, Kemalang, Wonosari, Wedi dan Prambanan. Industri kertas dan percetakan terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. Industri kayu dan furniture terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen dan Klaten Utara.

Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui Pola Klaster, dimana sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari : (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, dan Prambanan; (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan. Trucuk, Juwiring dan Karangdowo; (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karanganom dan Wonosari; (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu, dan Wonosari; (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat; (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, dan Kemalang; (7) Klaster Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang; (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring; (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan,

Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang; (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo; (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen. Untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karanganom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper.

Adapun perkembangan jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Tahun 2018−2022 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.

Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha

Tahun 2018-2022

Kelompok Industri			Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
I	Industri Besar					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)		90	7.607	337.874.160	1.742.048.134
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		49	5.110	250.955.188	1.157.048.530
Jumlah Sub I		2022	139	12.717	588.829.348	2.899.096.664
		2021	139	12.717	591.773.495	2.913.592.147
		2020	139	12.845	588.829.188	2.899.096.664
		2019	138	12.839	588.538.936	2.897.649.286
		2018	137	12.832	588.244.960	2.896.201.908
II	Industri Kecil, dan Menengah					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)		17.606	71.661	546.177.519	2.277.622.656
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		17.092	69.605	446.074.985	1.861.496.473

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
Jumlah Sub II	2022	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
	2021	33.657	137.028	962.436.429	4.014.945.555
	2020	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
	2019	34.692	141.238	992.004.183	4.138.549.952
	2018	34.686	141.210	991.805.862	4.138.094.610
Jumlah Sub I + II	2022	34.837	153.983	1.581.031.852	7.038.215.793
	2021	33.796	149.745	1.554.209.924	6.928.537.702
	2020	34.837	154.111	1.581.031.692	7.038.215.793
	2019	34.830	154.077	1.580.543.119	7.036.199.238
	2018	34.823	154.042	1.580.050.822	7.034.296.518

Sumber: Disperinaker, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Nilai produksi industri besar pada tahun 2021 sebesar Rp.2.913.592.147,- (dalam Jutaan Rp.) dengan jumlah unit sebanyak 139 unit, dan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.2.899.096.664,- (dalam Jutaan Rp.) dengan jumlah unit usaha sebanyak139 unit.

Sedangkan untuk industri kecil dan menengah pada tahun 2021 nilai produksinya sebesar Rp 4.014.945.555,- dengan jumlah unit usaha sebanyak 33.657 unit, sedangkan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 4.139.119.129,- unit usaha sebanyak 34.698 unit. Industri mebel dari sejumlah 1.322 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) baru sedikit. Sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan di dorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan eksport mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya.

Di sisi lain, dari 34.830 IKM yang memiliki daya saing juga masih sedikit, sehingga masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten. Sehingga untuk menjaga keberlangsungan usaha dan produksi bagi Industri Kecil

Menengah (IKM), berkurangnya alih transfer teknologi secara umum, produktivitas sentra industri menurun, terganggunya supply bahan baku serta berkurangnya permintaan pasar diperlukan pelatihan industri klister, pembinaan sentra-sentra industri daerah, perlunya diterapkan teknologi industri yang tepat guna serta peningkatan daya saing industri melalui fasilitasi SNI dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Adapun perkembangan perindustrian berdasarkan pertumbuhan dan konstribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.

Pertumbuhan dan Konstribusi Industri Terhadap PDRB

Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Industri	%	0,03	1,47	8,03	1,62	0,48
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,19	37,03	37,39	37,70	37,29

Sumber: BPS, Update Terakhir 28 Februari 2023.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2018-2022 cenderung tetap walaupun di tahun 2019 meningkat, namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1). meningkatkan koordinasi pembangunan industri dengan dinas/lembaga lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan fiskal dan pembiayaan sektor industri; 2). implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); 3). perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi pemberian insentif investasi; dan 4) penguatan daya beli masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan perindustrian untuk mendukung sasaran:

Mengoptimalkan *sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

a) Belum pulihnya kondisi perindustrian akibat Pandemi Covid-19, pada tahun 2021 pertumbuhan industri 1,62%, dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,48%;
b) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung stagnan pada kisaran angka 37,29 pada tahun 2022;
c) Masih rendahnya unit usaha mebel yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salahsatu syarat ekspor mebel ke eropa; dan
d) Masih rendahnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing sehingga masih diperlukan upaya meningkatkan daya saing IKM.

Solusi:

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perindustrian adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
b) Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
c) Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
d) Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang peranannya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 di sektor perdagangan menyebabkan omset penjualan menurun dikarenakan banyaknya UMKM yang tutup dan tidak beroperasi lemahnya tingkat perlindungan konsumen. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya. Hal ini dapat diantisipasi dengan fasilitasi pameran untuk produk UMKM, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih Cintai Produk Lokal, menerapkan Sistem Penjualan Sistem Online, fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha. Gambaran pasar menurut jenisnya disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17.

Pasar Menurut Jenisnya

Tahun 2018–2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Toko Swalayan	Toko	556	573	604	705	759
2	Pasar Umum/Rakyat	Pasar	85	85	85	85	91
3	Pasar Hewan	Pasar	12	12	12	12	10
4	Pasar Buah	Pasar	1	1	1	1	1
5	Pasar Sepeda	Pasar	4	4	4	4	1
6	Pasar Ikan	Pasar	1	1	1	1	0
7	Lain-Lain/Pasar Burung	Pasar	3	3	3	3	2
8	Pasar Klitikan	Pasar	1	1	1	1	1
	Jumlah		662	679	710	811	865

Sumber: DKUKMP, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Disamping itu dari sejumlah 51 pasar tradisional milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum direvitalisasi sampai dengan tahun 2021 baru 20 pasar (39,21 % dari 51 pasar tradisional milik pemerintah daerah).

Adapun perkembangan perdagangan berdasarkan pertumbuhan dan konstribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18.

Pertumbuhan dan Konstribusi Perdagangan Terhadap PDRB

Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Perdagangan	%	4,17	4,31	-4,79	5,65	4,03
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,48	16,17	15,38	15,55	15,26

Sumber: BPS, 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan perdagangan untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
c) Program Pengembangan Ekspor;
d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

a) Menurunnya cakupan pembinaan kelompok dan bina usaha informal mulai tahun 2021 hanya pada kisaran 1,99 %, sementara peningkatan jumlah toko swalayan pada tahun 2022 naik sebanyak 6,98% (atau dari 705 unit usaha pada tahun 2021 menjadi 759 unit usaha tahun 2022) akan menjadi ancaman bagi toko klontong; dan
b) Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif, dengan indikasi persentase pasar rakyat/tradisional yang direvitalisasi sampai dengan tahun 2021 baru 20 pasar (39,21 % dari 51 pasar tradisional milik pemerintah daerah).

Solusi:

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah; dan
b) Revitalisasi pasar-pasar tradisional milik pemerintah daerah.

3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 70.152 Km2. Pada Tahun 2021 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 31.708,4 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.573,2 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 31.870,4 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 18.628,5 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 9.627,16 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 1.991,6 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.615,7 Ha. Kondisi Lahan Pertanian Menurut Kecamatan Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19.
Lahan Pertanian dan Luas Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha)

No	Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
		Sawah	Bukan Sawah		
a	b	d	c	e	f
1	Prambanan	1.214,2	11,7	1.383,6	2.609,5
2	Gantiwarno	1.607,2	155,0	882,3	2.644,5
3	Wedi	1.538,7	18,0	1.069,0	2.625,7
4	Bayat	807,9	784,1	2.617,8	4.209,8
5	Cawas	2.135,1	46,0	1.412,4	3.593,5
6	Trucuk	1.869,2	2,0	1.597,4	3.468,6
7	Kalikotes	707,1	8,0	695,8	1.410,9
8	Kebonarum	701,7	2,0	337,9	1.041,6
9	Jogonalan	1.464,1	1,0	1.294,2	2.759,3
10	Manisrenggo	1.428,0	138,3	1.494,0	3.060,3
11	Karangnongko	722,8	850,5	1.375,9	2.949,2
12	Ngawen	1.016,3	8,0	821,2	1.845,5
13	Ceper	1.400,5	7,0	1.169,2	2.576,7
14	Pedan	833,5	444,3	722,1	1.999,9
15	Karangdowo	2.043,7	69,0	968,0	3.080,7
16	Juwiring	1.930,2	12,0	1.147,9	3.090,1
17	Wonosari	2.122,0	14,0	1.204,1	3.340,1
18	Delanggu	1.248,5	1,0	753,5	2.003,0
19	Polanharjo	1.730,0	92,0	699,6	2.521,6
20	Karanganom	1.621,7	11,0	929,0	2.561,7
21	Tulung	1.664,9	466,3	1.312,8	3.444,0
22	Jatinom	570,1	1.540,4	1.600,5	3.711,0
23	Kemalang	25,1	1.847,8	4.146,2	6.019,1
24	Klaten Selatan	760,4	2,9	745,8	1.509,1
25	Klaten Tengah	273,0	1,0	685,5	959,5
26	Klaten Utara	272,5	39,9	805,0	1.117,4
Jumlah 2021		31.708,4	6.573,2	31.870,4	70.152,0
2020		31.771,1	6.574,5	27.210,4	65.556,0
2019		31.863,0	6.578,0	27.115,0	65.556,0
2018		31.943,0	6.579,0	27.034,0	65.556,0
2017		33.021,0	6.581,0	25.954,0	65.556,0

Sumber: DKPP, Update Terakhir 30 Januari 2023.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Adapun Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20.
Luas Perubahan Pengunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
Menurut Kecamatan dan Penggunaannya
di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha)

No	Kecamatan	Dari Sawah dan Tegalan	Peruntukan Bangunan Tanah				Jumlah
			Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	5,86	4,55	1,12		0,19	5,86
2	Gantiwarno	0,33	0,33	-			0,33
3	Wedi	2,40	2,18			0,22	2,40
4	Bayat	0,56	0,56				0,56
5	Cawas	0,97	0,57			0,40	0,97
6	Trucuk	1,13	0,78	0,33		0,02	1,13
7	Kalikotes	0,96	0,96				0,96
8	Kebonarum	0,63	0,63				0,63
9	Jogonalan	2,93	2,93				2,93
10	Manisrenggo	1,82	1,82				1,82
11	Karangnongko	0,14	0,14				0,14
12	Ngawen	2,84	2,84				2,84
13	Ceper	2,66	1,12	1,35		0,18	2,66
14	Pedan	2,71	1,99	0,72			2,71
15	Karangdowo	0,22	0,21			0,01	0,22
16	Juwiring	4,52	2,33	2,19			4,52
17	Wonosari	4,83	3,65	1,18			4,83
18	Delanggu	5,95	5,49	0,46			5,95
19	Polanharjo	2,88	2,82		0,06		2,88
20	Karanganom	2,79	2,79				2,79
21	Tulung	1,02	0,87	0,15			1,02
22	Jatinom	2,67	2,64		0,03		2,67
23	Kemalang	25,78	0,36		25,42		25,78
24	Klaten Selatan	6,05	6,05				6,05
25	Klaten Tengah	4,35	4,14			0,21	4,35
26	Klaten Utara	3,73	3,35	0,38			3,73
	Jumlah	**90,71**	**56,09**	**7,88**	**25,52**	**1,23**	**90,71**

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023.

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB.

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Tahun 2018-2022

No	Jenis Komoditas	2018		2019		2020		2021		2022	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	76.029	73.627	74.964	73.962	73.266	70.916	73654	73.313,30	73802	72067
2	Jagung	9.682	9.549	11.713	11.085	12.430	11.087	10746	10,966,70	10207	10003
3	Kedelai	1.935	1.523	2.562	2.234	561	544	1468	1275	1311,4	1251,8
4	Kacang Tanah	1.224	1.067	955	909	855	876	710	713,90	696,7	630,8
5	Kacang Hijau	350	299	240	228	1978	1843	1043	1042,40	1110,6	1077
6	Ubi Kayu	822	685	435	395	1193	997	958	625,40	686,6	843,7
7	Ubi Jalar	24	20	26	21	27	25	21	19,50	46,9	12,9

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023.

Sedangkan Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.

Perkembangan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Pangan Tahun 2018-2022

No	Jenis Komoditas	2018		2019		2020		2021		2022	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Padi	426.028	57,87	380.268	51,41	449.093	63,33	480024	65,58	475550	65,26
2	Jagung	72.583	74,97	90.343	81,50	99.088	89,38	88538	80,73	99663	99,63
3	Kedelai	2.759	18,12	4.440	19,87	1.040	19,12	1998	15,67	2636	21,06
4	Kacang Tanah	1.784	14,58	1.527	16,79	1.158	13,21	1087	15,23	1297	20,55
5	Kacang Hijau	260	8,72	285	12,50	1.985	10,77	1542	14,79	1558	14,47
6	Ubi Kayu	32.224	392,11	9.778	224,99	27,296	273,81	15155	242,32	23816	282,28
7	Ubi Jalar	356	143,55	251	119,28	333	134,77	266	136,66	118	91,5

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023

Berdasarkan Tabel 3.21 dan Tabel 3.22. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Sedangkan Produksi Perkebunan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23.

Produksi Perkebunan Tahun 2018-2022

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tembakau Rajangan	1.147,27	1.750,30	1,558,79	1567,45	1601,16
2	Tembakau Asepan	1.037,05	2.595,30	2.308,72	1270,83	1307,68
3	Tembakau Vorstenland	135.535	55.144	-	-	-
4	Kelapa Dalam	3.976,64	4.048.189	4.322,36	3674,01	3905,5
5	Kelapa Hibrida	49.073	29.340	29,94	26,95	35,93
6	Kelapa Deres	87.149	87,15	78,84	63,07	80,84
7	Kopi Arabica	43,32	43.320	162,20	145,98	169,25
8	Kopi Robusta	9,82	9,82	12,94	36,46	36,7
9	Cengkeh	36,5	36,5	49,75	237,73	29,95
10	Lada	9,78	11,4	17,70	19,50	19,5
11	Tebu	3.258,9	3.195,97	2.902,92	2.882,67	2.484,93

Sumber: DKPP, Update per Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.23. sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 1.750,30 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 2.595,30 ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2018−2022 disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24.

Populasi Ternak Tahun 2018-2022

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi Potong	100,259	102.431	104.312	105.734	70.559
2	Sapi Perah	6,284	6.433	6.807	6.783	4.618
3	Kambing	9,596	101.402	105.782	108.932	97.114
4	Domba	45,204	46.963	47.562	51.278	49.947
5	Ayam Bukan Ras	2,245,443	2.532.676	2.109.668	2.789.664	3.531.257
6	Ayam Pedaging	2,475,187	3.896.788	2.489.800	3.268.129	3.867.566
6	Ayam Petelur	746,422	832.764	900.342	784.621	804.568
7	Itik	425,473	430.329	397.012	213.877	267.528
8	Burung Puyuh	519,566	535.244	363.563	327.829	427.829

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.24. sebagaimana tersebut di atas, hal yang menjadi catatan khusus pada tahun 2022 adalah adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berakibat populasi sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba turun dibanding tahun 2021. Sebaliknya untuk populasi ayam bukan ras, ayam pedaging, ayam petelur dan burung puyuh mengalami peningkatan. Sedangkan produksi susu, daging sapi potong dan telur pada Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25.

Produksi Susu, Daging, dan Telur

Tahun 2018-2022

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Susu (Liter)	4.266.718	4.978.442	4.456.373	4.630.000	4.547.617
2	Daging Sapi Potong (Kg)	2.643.076	2.775.643	2.649.317	2.267.819	2.170.370
3	Telur (Butir)	108.782.824	154.784.416	154.567.112	123.875.702	135.356.460

Sumber: DKPP, Update per 16 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.25. sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, dan daging pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, hal ini dipengaruhi kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). Sedangkan pada tahun 2022 produksi susu turun sebanyak 4.547.617 liter dibanding tahun 2021 (atau turun 1,81%), produksi daging turun sebanyak 2.170.370 kilogram dibanding tahun 2021 (atau turun 4,49%), dan produksi telur naik sebanyak 135.356.460 butir dibanding tahun 2021 (atau naik 8,48%).

Kelautan dan Perikanan

Sumber daya air yang melimpah di Kabupaten Klaten mendorong petani dan masyarakat untuk berbudidaya ikan. Areal objek perikanan di Kabupaten Klaten dikelompokan menjadi 6 jenis, yaitu kolam, sawah, keramba, waduk, sungai dan genangan air. Adapun luas areal objek perikanan di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26.

Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya

Tahun 2018-2022

Tahun	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2018	42,60	12,25	1,61	180	178,90	1.737,79	2.153,15
2019	46,27	0	0,314	180	178,90	1.737,79	2.143,27
2020	46,27	0	0,314	189	178,90	1.737,79	2.152,27
2021	46,27	0	0,31	190	178,90	1737,79	2.153,27
2022	46,27	0	0,31	190	178,90	1737,79	2.153,27

Sumber: DKPP, Update per Januari 2023. .

Produksi perikanan di Kabupaten Klaten mengalami kondisi yang fluktuatif, capaian di tahun 2021 menjadi 2.153,27 ton, dan tahun 2022 mengalami peningkatan/penurunan menjadi 2.153,27 ton. Peningkatan produksi perikanan dipengaruhi oleh adanya bantuan benih ikan, sedangkan penurunan produksi, salah satu penyebab yaitu adanya bencana banjir yang melanda lahan pembudidaya. Perkembangan tingkat konsumsi ikan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebesar 21,88 Kg/kapita/Tahun meningkat menjadi 21,88 Kg/kapita/Tahun di tahun 2022. Adapun perkembangan produksi perikanan dan konsumsi ikan Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27.

Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan

Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produksi benih ikan	Ekor	132.814.750	137.635.312	109.000.000	113.986.913	92.923.284
Produksi perikanan (budidaya)	Ton	26.680,87	28.229,38	27.603,83	30.109,31	30.300,49
Produksi perikanan (tangkap)	Ton	516	153	184	311,82	372,86
Konsumsi ikan	kg/kapita / tahun	19,18	20,04	20,28	21,88	21,88

Sumber: DKPP, Update per Januari 2023.

Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan sebagaimana Tabel 3.27, Pemerintah Kabupaten Klaten menaruh perhatian besar terhadap tingkat kesejahteraan nelayan, yakni dengan meningkatkan cakupan bina kelompok nelayan. Pokdakan (Kelompok Budidaya Ikan) pada tahun 2022 sebanyak 299 Pokdakan.

Perkembangan sektor pertanian dan perikanan berdasarkan pertumbuhan dan konstribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28.

Pertumbuhan dan Konstribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB

Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan pertanian dan perikanan	%	2,21	0,52	2,12	1,14	1,61
2	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	11,36	10,50	10,93	10,45	10,08

Sumber: BPS Kabupaten Klaten. Update Data Terakhir Per 1 Maret 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
d) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
e) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
f) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
g) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
h) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
i) Program Penyuluhan Pertanian.

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a) Luas lahan pertanian semakin menurun setiap tahunnya, karena beralih fungsi menjadi lahan terbangun/ lahan bukan pertanian;
b) Menurunnya populasi sapi potong, sapi perah, domba, dan kambing karena adanya wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
c) Menurunnya produktivitas padi dari 480.024 ton pada tahun 2021 menjadi 475.550 ton di tahun 2022;
d) Menurunnya produksi bibit ikan dari 113.986.913 ekor pada tahun 2021 menjadi 92.923.284 ekor pada tahun 2022;
e) Belum terpenuhinya standar minimal berupa sarana prasarana dan sumberdaya manusia pendukung di Agro Techno Park (ATP) Humo sebagai pusat atau pilot project pengembangan konsep pertanian terpadu, agrowisata dan agropolitan, sehingga konsep tersebut belum dapat diaplikasikan dan dilaksanakan di lapangan atau di kawasan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;
f) Belum optimalnya cakupan bina kelompok nelayan yang capainnya tetap selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 6 kelompok nelayan; dan
g) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di kalangan masyarakat, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2021 sebesar 19,63 %, sedangkan pada tahun 2022 menjadi sebesar 21,88.%.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
b) Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas–varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;

c) Menenkan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature)*;
d) Penciptaan sinergitas antara program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan; dan
e) Peningkatan pembinaan kepada kelompok nelayan meliputi pembinaan kualitas bibit ikan, pelatihan pengolahan hasil perikanan dan pembuatan pakan ikan.

4) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan: pada tahun 2020 sebanyak Rp.8.530.240.214,- dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak Rp.8.804.783.428,- (atau naik sebanyak 3,21%). Pada tahun 2022 menjadi sebanyak Rp. 14.452.269.721,- (atau naik sebanyak 64,14%). Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29.

Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	900	1.500
2021	82	1.632.548	463	1	1	Na	Na
2022	89	4.777.338	60.461	1	1	1.000	1.500

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per 15 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.29. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar

Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30.

Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD

Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD total (%)		4,03	2,59	3,12	4,13
Total PAD	395.884.244.135	311.648.401.655	329.963.261.898	300.013.085.037	349.607.225.927
PAD Sektor Pariwisata	8.668.908.216	12.569.036.829	8.530.240.214	8.804.783.428	14.452.269.721
Pajak	7.454.495.216	10.184.639.829	7.478.277.694	7.967.183.669	12.265.976.721
Pajak Hotel	1.114.743.863	1.330.988.059	730.525.400	889.869.463	1.302.383.278
Hotel Bintang 3	871.100.135	1.020.244.671	587.067.925	762.651.635	1.136.795.371
Hotel Melati/Motel	243.643.728	310.743.388	143.457.475	127.217.828	165.587.907
Pajak Restoran	5.385.531.695	7.121.660.015	6.270.989.397	6.786.815.356	9.933.095.026
Rumah Makan	1.838.547.695	2.073.823.349	1.916.032.221	2.777.678.048	4.418.592.021
Catering	3.546.984.000	5.047.836.666	4.354.957.176	4.009.137.308	5.514.503.005
Pajak Hiburan	954.219.658	1.731.991.755	476.762.897	290.498.850	1.030.498.417
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	206.144.658	318.541.880	19.419.537	23.754.600	346.457.502
Permainan Ketangkasan	224.998.625	550.467.500	222.192.310	145.883.750	278.295.615
Pajak Hiburan/Pertandingan Olahraga	523.076.375	862.982.375	235.151.050	108.790.500	356.336.000
Pajak Panti Pijat,Spa,Fitnes Center				12.070.000	49.409.300
Retribusi	**1.214.413.000**	**2.384.397.000**	**1.051.962.520**	**837.599.759**	**2.186.293.000**
Retribusi Objek Wisata	1.214.413.000	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759	**2.186.293.000**

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per 15 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.30. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2021 sebanyak Rp.8.804.783.428,- pada tahun 2022 menjadi sebanyak Rp. 14.452.269.721,- (atau naik sebanyak 64,14%).

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31.

Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya

di Kabupaten Klaten Tahun 2022

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bukit Sidoguro	wisata pemandangan alam khas dataran tinggi dengan hiasan beberapa ornamen cantik yang cocok menjadi spot foto	Bayat
2	Makam Pandanaran	kompleks pemakaman, dan sebuah masjid tua yang sampai sekarang masih berfungsi dan digunakan untuk beribadah sholat para peziarah	Bayat
3	Bukit Cinta	spot pemandangan alam di perbukitan bayat	Bayat
4	Batu Putih	Kolam renang dan pemandangan alam	Bayat
5	Kawah Putih	Pemandangan dan spot selfy	Bayat
6	Desa Wisata Jarum	Desa wisata yang terkenal dengan sentra pembuatan batik dengan pewarna alami dan potensi kesenian budaya lainnya	Bayat
7	Desa Wisata Ngerangan	Kampung Tradisional Cikal Bakal Angkringan , kampung pecel, Joglo Tumiyono, Kampung Dolanan	Bayat
8	Makam Ki Ageng Gribig	Makam yang sekarang difungsikan sebagai tempat ziarah, yang biasanya ramai dikunjungi pada malam Jumat legi dan Jumat kliwon	Jatinom
9	Umbul Gendaren	Kolam renang alami	Jatinom
10	Jombor Permai	Rawa alami yang dipenuhi oleh wisata kuliner warung pemancingan air tawar	Jogonalan
11	Tirta Pelangi	Kolam renang buatan	Kalikotes
12	Pemandian Jolotundo	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Karanganom
13	Tugu Waseso Dan Menoro Baskoro	Wisata Sejarah dan budaya peninggalan Ir. Soekarno	Karanganom
14	Candi Merak	peninggalan purbakala berupa kompleks percandian di Dukuh Candi, Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi ini berada di sebelah barat laut dari wilayah Klaten, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman. Candi Merak berdiri di atas lahan seluas 1.480 meter persegi. Kompleks candi terdiri atas satu bangunan induk dan tiga candi perwara. Candi ini didirikan	Karangnongko

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		sekitar abad ke-9-10, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram Kuno	
15	Umbul Brintik	kolam pemandian yang terbuka untuk umum	Kebonarum
16	Umbul Brondong	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah dan terdapat pohon gayam yang rindang	Kebonarum
17	Umbul Pluneng Tirtomulyani	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Kebonarum
18	Umbul Pluneng Tirtomulyono	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Kebonarum
19	Kalitalang	Pemandangan Gunung Merapi dan Track Downhill	Kemalang
20	Girpasang	Wisata alam pemandangan gunung merapi dan desa terpencil dengan menggunakan gondola	Kemalang
21	Kolam Renang Tirta Indah	Kolam Renang buatan	Klaten Selatan
22	Kr Tirta Yudha Bakti	Kolam renang buatan	Klaten Selatan
23	Kolam Renang Moon	Kolam Renang Indoor	Klaten Utara
24	Kr Prilon Park	Kolam renang buatan dengan konsep resort	Klaten Utara
25	Pemandian Umbul Susuhan	wisata kolam pemandian untuk segala kalangan	Ngawen
26	Umbul Ponggok	mata air yang biasa dimanfaatkan sebagai pemandian dan snorkeling. ada dasar kolam terdapat ikan dan batu-batuan sehingga kolam Umbul Ponggok kerap digunakan sebagai lokasi foto dibawah air.	Polanharjo
27	Kampung Dolanan Sidowayah	Kampung dolanan sidowayah adalah salah satu objek wisata edukasi dan wahana outbond yang memadukan antara permainan outbond dengan permainan tradisional yang berada di kabupaten klaten.	Polanharjo
28	Umbul Siblarak	Umbul Siblarak adalah tempat wisata dengan kolam renang buatan yang dibangun di tengah kompleks persawahan	Polanharjo
29	Kolam Renang Bale Tirta	Kolam Renang Buatan dengan gaya seperti resort di bali, airnya berasal dari mata air alami	Polanharjo
30	Kolam Renang Tirta Kamandanu	Kolam renang buatan dengan standar nasional untuk event kejuaraan renang, mata airnya berasal dari sumber mata air alami	Polanharjo
31	Umbul Besuki	Kolam renang alami dengan konsep di pedesaan dan di tepi sungai dengan tempat yang rindang	Polanharjo
32	Umbul Kemanten	Kolam mata air alami berair jernih yang dikelilingi pepohonan tinggi ini adalah tempat populer untuk berenang.	Polanharjo
33	Umbul Sigedang - Kapilaler	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Polanharjo

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
34	Kolam Renang Pancingan 100	Kolam Renang buatan, pancingan dan resto	Polanharjo
35	Rivermoon Tubing	Susur sungai menggunakan Ban dengan safety yang baik	Polanharjo
36	D'wangen/Ketjeh Resto	Resto dengan konsep dialiran sungai yang tidak deras	Polanharjo
37	Ponggok Ciblon	Kolam renang buatan dan terdapat resto	Polanharjo
38	Pusur Tubing	Wisata tubing di sungai pusur menyusuri sungai dengan alat tubing	Polanharjo
39	Kr Sumber Mina	Wisata kuliner dan tersedia kolam pemancingan dengan suasana pedesaan	Polanharjo
40	Kr Omah Iwak	Wisata Kuliner berupa rumah makan dan pemancingan dengan fasilitas kolam renang	Polanharjo
41	Kr Pancingan 47	Wisata memancing sebagai tempat menyalurkan hobi memancing dan tersedia fasilitas kolam renang dan rumah makan	Polanharjo
42	Kr Pancingan Luminto 1001	Wisata memancing, tempat makan, dan waterboom sebagai destinasi wisata dengan fasilitas lengkap	Polanharjo
43	Candi Plaosan	candi ini dibuat oleh Rakai Pikatan yang merupakan Raja dari Dinasti Syailendra untuk istrinya yang bernama Pramodyawardani. Spot terbaik untuk berburu sunset	Prambanan
44	Candi Sojiwan	Candi Sojiwan atau Candi Sajiwan adalah sebuah candi Buddhis yang terletak di desa Kebon Dalem Kidul, kecamatan Prambanan, kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebuah ciri khas candi ini ialah adanya sekitar 20 relief di kaki candi yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India.	Prambanan
45	Taman Wisata Candi Prambanan	candi Hindu yang terbesar di Indonesia dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya	Prambanan
46	Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo	Kolam Renang buatan	Prambanan
47	Desa Wisata Bugisan	Desa wisata dengan potensi kesenian budaya sebagai produk utamanya dan terdapat situs sejarah berupa Candi Plaosan.	Prambanan
48	Desa Wisatakebondalem Kidul	Desa wisata budaya yang memiliki potensi budaya berupa situs peninggalan sejarah Candi Sojiwan, seni pertunjukan, batik, adat istiadat dan tradisi masyarakat	Prambanan
49	Makam Ronggowarsito	sebuah kompleks kuburan kuno seluas kurang lebih 100 meter persegi. Makam seorang tokoh pujangga dan peramal ulung yang sangat disegani oleh para raja-raja yang ada di tanah Jawa	Trucuk

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
50	Kolam Renang Tirta Kencana Miri	Kolam renang buatan	Trucuk
51	Obyek Mata Air Cokro (Omac)	Kawasan wisata yang lokasinya sejuk, bermata air jernih dan pemandangan alur sungai yang indah	Tulung
52	Umbul Pelem	wisata pemandian dan kolam renang umum	Tulung
53	Pesona Alam Tirta	Kolam Renang Buatan dengan gaya seperti resort di bali, airnya berasal dari mata air alami	Tulung
54	Umbul Asri	Kolam renang buatan dan terdapat tempat pemancingan dan resto	Tulung
55	Aqua Regia	Kolam renang buatan	Tulung
56	Semego	Griyo dahar dan spot selfy kapal	Tulung
57	Umbil Nilo	Kolam renang alami	Tulung
58	Desa Wisata Melikan	Desa wisata melikan memiliki produk unggulan berupa gerabah dan keramik dengan ciri khas warna gerabah yang kehitaman	Wedi
59	Makam Perwito	Makam Ki Ageng Perwito, putera Syech Alim Akbar III yang bergelar Sultan Trenggono (Raja Demak Bintoro) yang merupakan senopati perang dari Kerajaan Pajang	Wonosari
60	Desa Wisata Ponggok	Umbul Ponggok, Umbil Besuki, Umbul Sigedang Kapilaler	Polanharjo
61	Desa Wisata Ngrundul	Umbul Brondong, Kerajinan Kemoceng Bulu Ayam, Bulusan	Kebonarum
62	Desa Wisata Tegalmulya	Sapu Angin, Gua Jepang	Kemalang
63	Desa Wisata Tlogowatu	Bendungan Karangkendal, Kali Manggal	Kemalang
64	Desa Wisata Pokak	Sendang Sinongko, Kolam renang, pemancingan	Ceper
65	Desa Wisata Malangjiwan	Umbul Brintik, Umbul Bethek, Sungai Tanon	Kebonarum
66	Desa Wisata Gununggajah	Bukit Cinta, Puncak Arjuna	Bayat
67	Desa Wisata Tanjung	Kerajinan Lukisan Payung	Juwiring
68	Desa Wisata Sidowayah	Umbul Siblarak, Kampung Dolanan OASE	Polanharjo
69	Desa Wisata Krakitan	Rowo Jombor, Taman Nyi Ageng Rakit, Bukit Sidoguro	Bayat
70	Desa Wisata Jimbung	Taman Bulusan, Jimbung Tebing Gebyok (JTG)	Kalikotes
71	Desa Wisata Nglinggi	Edupark Nglinggi, Pemancingan, Desa Damai	Klaten Selatan
72	Desa Wisata Karangnongko	Candi Merak, Candi Karangnongko, Embung Gayam Sewu	Karangnongko
73	Desa Wisata Glagah	Kelompok Wanita Tani Susu, Edukasi Peternakan dan Perah Susu Sapi	Jatinom
74	Desa Wisata Pasung	Agrowisata Buah Tropis, Wisata Kuliner, Pemancingan	Wedi
75	Desa Wisata Mranggen	Umbul Kroman, Kali Tempur, Sendang Gotan, Embung	Jatinom
76	Desa Wisata Soropaten	Tugu Waseso, Menoro Baskoro	Karanganom
77	Desa Wisata Kupang	Bukit Wijil, Makam Religi, Wisata Kuliner	Karangdowo
78	Desa Wisata Manjungan	Umbul Susuhan	Ngawen
79	Desa Wisata Krikilan	Embung Krikilan, Camping Ground	Bayat

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
80	Desa Wisata Karangduren	Taman Jlengut	Karangnongko
81	Desa Wisata Karangasem	Embung Karangasem	Cawas
82	Desa Wisata Sidowarno	Tatah sungging wayang, Jemparingan, Kerajinan payet	Wonosari
83	Desa Wisata Kalikotes	Taman Hidroponik, Bumi Perkemahan, Mini Ka'bah	Kalikotes
84	Soko Alas	Kolam Renang, Resto	Polanharjo
85	Janti Park	Kolam Renang, Resto, Spot Selfi	Polanharjo
86	Candramaya	Kolam Renang, Resto	Tulung
87	Munggur Park	Taman Hiburan	Delanggu
88	Kali Pancur	Kolam Renang	Ceper
89	Kr Kwanen	Kolam Renang	Manisrenggo

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.31. sebagaimana tersebut di atas, jumlah Obyek Wisata (OW) di Kabupaten Klaten sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lokasi obyek wisata, dan tersebar di beberapa kecamatan, serta jenis wisatanya pun sangat beragam. Sehingga potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwo di Deles.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan pariwisata untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2) Program Pemasaran Pariwisata;
3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a) Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta dari sebanyak 89 jumlah obyek wisata masih didominasi wisatawan lokal;
b) Rata-rata lama tinggal Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) hanya 1 (satu) hari; dan
c) Belum terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif, rencana induk pembangunan ekonomi kreatif, pendataan ekonomi kreatif serta fasilitas sarana prasarana pendukung ekonomi kreatif.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
b) Peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

5. Meningkatnya Investasi Daerah

Perekonomian Kabupaten Klaten sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Klaten ditandai menguatnya globalisasi ekonomi dunia dan pembentukan zona ekonomi regional di beberapa negara. Fenomena ini akan mengakibatnya kompetisi yang semakin ketat dalam hal menarik investasi, perdagangan dan pariwisata antar negara. Sedangkan dari faktor internal, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten adalah perkembangan investasi daerah.

Investasi daerah merupakan instrumen utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dalam pengelolaan potensi investasi daerah agar memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif. Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan investasi daerah upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi Daerah. **Ukuran keberhasilan mengingkatnya investasi daerah** diukur dengan indikator: 1) Persentase peningkatan investasi PMDN, dan 2) Persentase peningkatan investasi PMA. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatkan Investasi Daerah*** disajikan pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatkan Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	733	97	-64	50	158	316,00	50	156,00
2	Persentase Peningkatan Investasi PMA	319	272	-59	1	139	13900,00	5	1.340

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Capaian sasaran: Meningkatkan Investasi Daerah yang diukur dengan indikator: persentase peningkatan investasi PMDN, dan persentase peningkatan investasi PMA sebagaimana Tabel 3.32. di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

Kondisi perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat mempengaruhi kondisi perkembangan perekonomian, dan sebagai gambaran perkembangan jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022, disajikan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33.

Jumlah Investasi PMA dan PMDN

Tahun 2018-2022

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2018	3.091.400	41.211.500.000	39	-70	229.788.500.000	67	27
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733
2020	4.721.429	66.100.000.000	5	-59	698.896.464.253	4743	-64
2021	19.794.968	277.129.545.937	18	319	1.377.467.139.785	3984	97
2022	44.066.045	660.990.668.832	23	139	3.549.341.388.731	6273	158

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 12 Januari 2023

.

Berdasarkan Tabel 3.33. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN maupun PMA selama tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif, pada tahun 2021 nilai investasi PMA sebesar Rp 277.129.545.937,00, tahun 2022 naik menjadi sebesar Rp 660.990.668.832,00, atau naik 139%. Begitu juga dengan pada tahun 2021 nilai investasi PMDN sebesar Rp. 1.377.467.139.785,- pada tahun 2022 naik menjadi sebesar Rp. 3.549.341.388.731,- (naik 158%). Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infratruktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34.

Perkembangan Realisasi PMDN

Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	67	870	4743	3.984	6.237
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.793	16.772	12.980	32.845	38.441
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	229.788.500	1.914.915.766 .	698.896.464	1.377.467.139.785	3.549.341.388.731

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 12 Januari 2023

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif. Adapun perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35.

Perkembangan Realisasi PMA

Tahun 2018-2022

No	**Uraian**	**Satuan**	**PMA**				
			2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	39	15	5	18	23
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	561	2.087	59	4153	6.804
3	Nilai Investasi	Rp	41.211.500.000	160.872.497.498	66.100.000.000	277.129.545.937	660.990.668.832

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 12 Januari 2023.

.

Berdasarkan Tabel 3.34. dan Tabel 3.35. sebagaimana tersebut di atas,dapat dilihat dari jumlah unit usaha, jumlah serapan tenaga kerja, serta nilai investasi mengalami peningkatan di tahun 2022. Hal ini

disebabkan mengeliatnya sektor investasi pasca Pandemi, serta adanya kemudahan perizinan berusaha bagi sektor menangah, mikro dan kecil serta adanya kebijakan penanaman modal berupa insentif dan disinsentif. Capaian kinerja DPMPTSP ini didukung dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi dan berakibat investor akan mengalami risiko investasi biaya tinggi (*high cost investation*) ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan Lahan Sawah Dilindung;
b. Belum tersedianya informasi dan fasilitasi terkait ketersediaan lahan terutama untuk investasi industri besar; dan
c. Penyesuaian teknis pelaksanaan perizinan di daerah dengan regulasi dari pusat.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Klaten memaksimalkan kinerja Satgas Percepatan Realisasi Investasi dalam bentuk fasilitasi permasalahan dan kendala yang dialami perusahaan dalam proses realisasi investasi;
b. Implementasi kebijakan penanaman modal berupa insentif dan disinsentif;

c. Kepastian tata ruang untuk para pelaku usaha terutama industri besar;
d. Penguatan regulasi untuk menjamin kepastian dan kenyamanan berinvestasi;
e. Penyusunan peta potensi dan peluang investasi;
f. Memaksimalkan strategi promosi dan kerjasamainvestasi;
g. Memaksimalkan Mal Pelayanan Publik; dan
h. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

6. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Konektivitas merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perencanaan atau pembangunan wilayah. Suatu wilayah dapat

berkembang dengan baik apabila sistem konektivitas wilayahnya juga baik. Oleh karena itu perlunya penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu hukum yang berwujud struktur ruang ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur Daerah diukur dengan indikator: 1) jalan dalam kondisi mantap, 2) drainase dalam kondisi baik, dan 3) irigasi Kabupaten dalam kondisi baik. Adapun capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: ***Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah*** disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36.

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	90,86	86,02	90,08	91,06	91,11	100,05	91,86	99,18
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	61,45	61,21	61,44	61,47	61,99	100,85	61,52	100,76
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40,89	33,47	36,17	41,5	44,91	108,22	46,2	97,21

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: "*Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah"* diukur dengan indikator: Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap, Persentase Drainase dalam kondisi baik, dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik sebagaimana Tabel 3.36. di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

1) Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap

Pada tahun 2022 jalan dalam kondisi mantap sebesar 91,11% dari panjang jalan 715,89 km sedangkan total panjang jalan Kabupaten Klaten dikelompok ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: jalan negara sepanjang 33,52 km, jalan provinsi sepanjang 41,36 km, dan jalan kabupaten sepanjang 715,89 km. Serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa indikator yang harus diperhatikan dalam SPM Jalan Umum harus meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata dengan penjelasan sebagai-berikut:

a. ***Aksesibilitas***, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
b. ***Mobilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Angka mobilitas tahun 2022 sebesar 5,61 km/ 10.000 jiwa.***
c. ***Keselamatan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendaraan dengan selamat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, tingkat keselamatan lalu lintas pada tahun 2021 hingga 2022 sebesar 99,80%.***

d. ***Kondisi jalan,*** dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Adapun perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Klaten dapat disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37.

Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten

Tahun 2018-2022

Uraian		Status Jalan						
		Tahun						
		2022	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		Nasional	Provinsi	Kabupaten				
I	Jenis Permukaan							
	a. Aspal/ Hotmix/ Lapen/ *Sandsheet* (km)	33,52	41,36	725,29	689,66	605,19	605,19	594,92
	b. Berbatu/ Macadam (km)							
	c. Hotmix (km)							
	d. Kerikil (km)			2,9	2,1	11,55	11,55	7,69
	e. Tanah / Jalan Belum Tembus (km)							
	d. Beton (km)			41,44	77,87	99,14	99,14	113,29
Jumlah I		33,52	41,36	769,63	769,63	715,89		
II	Kondisi Jalan							
	a. Baik (km)	3,9	25,76	517,27	533,56	474,26	437,36	186,35
	Persentase (%)			67,20	69,33	66,25	61,09	26,03
	b. Sedang (km)	29,62	15,61	140,34	128,47	170,64	223,65	465,87
	Persentase (%)			18,23	16,69	23,84	31,24	65,08
	c. Rusak Ringan (km)			56,86	52,04	59,44	46,20	55,98
	Persentase (%)			7,39	6,76	8,3	6,45	7,82
	d. Rusak Berat (km)			55,16	55,56	11,55	8,68	7,69
	Persentase (%)			7,17	7,22	1,61	1,21	1,07
Jumlah II		33.52	41,37	769,63	769,63	715,89	715,89	715,89
III	Kelas Jalan							
	Kelas I (km)							
	Kelas II (km)							
	Kelas III (km)							
	Kelas III A (km)		41,36					
	Kelas III B (km)	33,52						
	Kelas III C (km)			769,63	769,63	715,89	715,89	715,89
	Kelas IV (km)							
	Kelas Tidak Dirinci							
Jumlah III (km)		***33.52***	***41,36***		***769,63***	***715,89***	***715,89***	***715,89***

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Dengan berlakunya SK Bupati Klaten Nomor 611.51/208 Tahun 2020 tentang status Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Klaten, yang semula ditetapkan sebanyak 361 ruas jalan dengan SK Bupati tersebut ditetapkan menjadi 338 ruas jalan dengan panjang jalan dari 769,63 km menjadi 715,89 km. Seiring dengan berlakunya SK Bupati tersebut, jumlah jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten juga mengalami perubahan kriteria. Jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten yaitu jembatan dengan panjang bentang minimal 4 meter. Adapun jumlah dan kondisi jembatan disajikan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38.

Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten

Tahun 2018-2022

Uraian		Status Jembatan				
		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a	Baik (buah)	308	311	200	202	6
	Persentase (%)	90,59	91,47	63,9	64,54	1,92
b	Sedang dan Ringan (buah)	29	29	113	110	281
	Persentase (%)	8,53	8,53	36,1	35,54	89,77
c	Rusak Berat/kritis (buah)	3	0	0	1	26
	Persentase (%)	0,89	0	0	0,32	4,15
Jumlah		340	340	313	313	313

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Berdasarkan kondisi jembatan sebagaimana Tabel 3.38. di atas, kondisi jembatan pada tahun 2021: baik sebanyak 202 buah (atau 64,54% dari total jumlah jembatan), sedang dan ringan sebanyak 110 buah (atau 35,54% dari total jumlah jembatan), dan rusak berat

sebanyak 1 buah (atau 0,32% dari total jumlah jembatan). Sedangkan pada tahun 2022 kondisi jembatan menjadi: baik sebanyak 6 buah (atau 1,92% dari total jumlah jembatan), sedang dan ringan sebanyak 281 buah (atau 89,77% dari total jumlah jembatan), dan rusak berat/kritis sebanyak 26 buah (atau 4,15% dari total jumlah jembatan).

2) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2018-2022 di Kabupaten Klaten menunjukan peningkatan. Indikator drainase dalam kondisi baik dengan aliran air yang tidak tersumbat tahun 2021 sebesar 61,45%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 61,99%. Saluran drainase ini merupakan salah satu bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi mengalirkan air sehingga badan jalan tetap kering. Adapun perkembangan persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat selama tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 3.4.

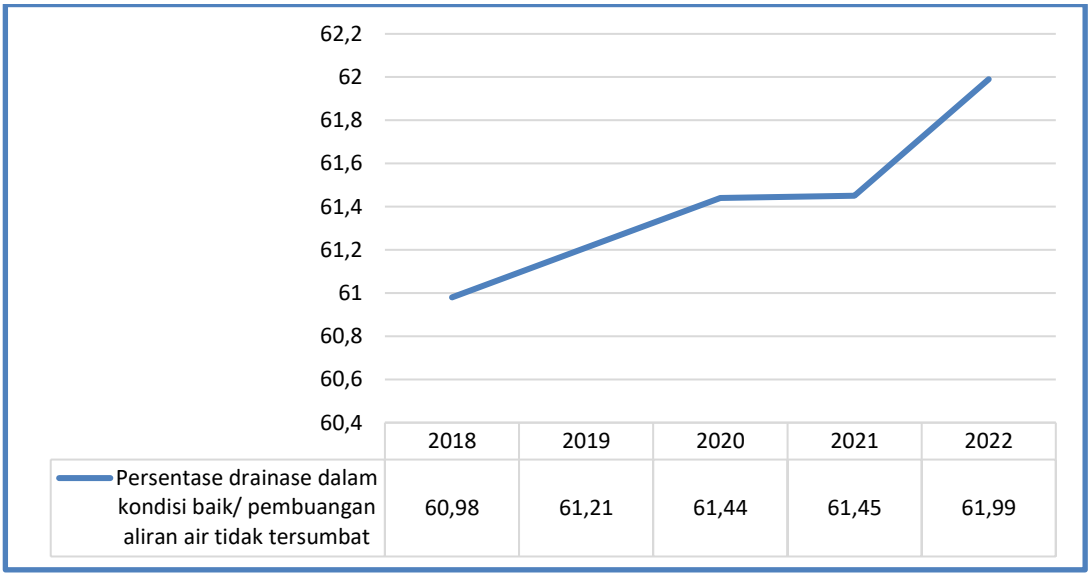

	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,98	61,21	61,44	61,45	61,99

Grafik 3.4. Perkembangan Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022
Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Perkembangan drainase dalam kondisi baik berangsur-angsur ada peningkatan selama tahun 2018-2022, hal ini disebabkan adanya

peningkatan jalan dan pemihakan anggaran. Kondisi drainase tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39.

Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Uraian		Kondisi Drainase				
		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a	Baik (Kilo Meter)	403,69	405,22	406,74	406,83	410,37
	Persentase (%)	60,98	61,21	61,44	61,45	61,99
b	Tidak Baik (kilo Meter)	258,32	256,79	255,27	255,18	251,65
	Persentase (%)	39,02	38,79	38,56	38,55	38,01
Jumlah		662,01	662,01	662,01	662,01	662,01

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Drainase dalam kondisi baik pada tahun 2022 sepanjang 410,37 KM (atau 61,99% dari total panjang drainase 662,01 KM), sedangkan drainase dalam kondisi tidak baik sepanjang 251,65 KM (atau 38,01% dari total panjang drainase 662,01 KM).

3) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten mencakup luasan sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Berdasarkan kewenangan penanganan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 2 (dua) DI, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Sehingga Sungai di Kabupaten Klaten yang sering menimbulkan banjir (Sungai

Dengkeng dan beberapa anak sungainya) merupakan kewenangan Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai/BBWS) sehingga untuk penanganannya Klaten berkoordinasi dengan BBWS.

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air selain digunakan untuk keperluan irigasi, juga diarahkan untuk penanganan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabiltasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Selain itu juga dengan penguatan talud/ tebing sungai, sesuai dengan kewenangan Kabupaten. Perkembangan Kondisi daerah Irigasi (DI) Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40

Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI)

Tahun 2018-2022

Uraian		Status Irigasi				
		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a	Baik (Ha)	9.499	9.945	10.747	12.149	13.344
	Persentase (%)	31,97	33,47	36,17	40,89	44,91
b	Sedang dan Ringan (Ha)	14.019	13.822	15.261	12.477	11.579
	Persentase (%)	47,18	46,52	51,36	41,99	38,97
c	Rusak Berat (Ha)	6.195	5.946	3.705	5.087	5.384
	Persentase (%)	20,85	20,01	12,47	17,12	18,12
	Jumlah (Ha)	29.713	29.713	29.713	29.713	29.713

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Pengelolaan irigasi dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan kondisi irigasi dalam kondisi baik. Hal ini mengingat pengelolaan sistem irigasi selalu memperhatikan kondisi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia yang wajib mendapat perhatian.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah* dengan dukungan program, diantaranya:

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
b) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
e) Program Pengembangan Permukiman;
f) Program Penataan Bangunan Gedung;
g) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; dan
h) Program Penyelenggaraan Jalan;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut;

a. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Klaten, dilihat dari tingkat kerusakan jalan, pada tahun 2022 jalan rusak berat yang perlu ditangani sebesar 1,07% (7,69 km) serta 7,82% (55,98km) jalan dalam kondisi rusak sedang dan ringan yang perlu ditingkatkan kualitasnya;
b. Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak berat /kritis tahun 2022 sebanyak 4,15% (25 unit) serta jembatan dalam kondisi rusak sedang dan ringan yang perlu segera mendapat penanganan sebanyak 89,77% (281 unit);

c. Masih terdapat daerah irigasi dalam kondisi rusak berat sebanyak 18,12% (5.384 Ha) dan daerah irigasi kondisi rusak sedang dan ringan yang perlu ditingkatkan sebanyak 38,97% (11.579 Ha) di tahun 2022.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten, diantaranya:

a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara bertahap untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).

7. Meningkatnya Capaian *Universal Access* (100-0-100)

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Ukuran keberhasilan a meningkatnya capaian *Universal Access (100-0-100)* diukur dengan indikator: Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi). Adapun capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: *Meningkatnya Capaian Universal Access (100-0-100)* disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Capaian *Universal Access* (100-0-100)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan sanitasi)	97,76	N/A	97,21	98,32	97,68	99,35	100	97,68

Sumber: DPUPR, dan Diperakim, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Capaian tahun 2021 sebesar 92,62% meningkat menjadi 93,19% ditahun 2022 dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 93,50% dan

wilayah perdesaan sebesar 84,98%. Perolehan capaian persentase capaian universal access berdasarkan perhitungan rata-rata akumulasi cakupan akses Kumuh (99,86%), air minum (93,19%) dan sanitasi (100%). Adapun perkembangan cakupan akses Kumuh, air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42.

Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi

Tahun 2018-2022

No	Sektor	Skala	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Air Minum	Kabupaten	1.193.028	1.195.297	1.218.317	1.181.835	1.190.459
		%	89,15	91,14	81,77	92,62	93,19
		Perkotaan	464.778	483.169	487.910	462.103	1.125.360
		%	92,48	95,03	95,06	93,66	93,50
		Pedesaan	728.250	719.495	731.327	720.819	62.754
		%	87,15	88,71	89,81	92,10	84,98
2	Sanitasi	Kabupaten	1.282.234	1.339.762	1.327.577	1.327.577	1.277.455
		%	95,82	100	100	100	100
		Perkotaan	485.515	502.572	513.253	493.395	1.203.610
		%	96,61	100	100	100	100
		Pedesaan	796.719	839.925	814.324	782.637	7.3845
		%	95,35	100	100	100	100
3	Akses Kumuh	Kabupaten	30.354,07	30.397,78	30.473,35	30.473,35	30.473,35
		%	99,47	99,62	99,86	99,86	99,86
		Perkotaan	10.319,07	10.319,07	10.319,07	10.319,07	10.319,07
		%	98,46	98,46	98,46	98,46	98,46
		Pedesaan	19.935,00	19.935,00	19.935,00	19.935,00	19.935,00
		%	100	100	100	100	100

Sumber : DPUPR, Terakhir 16 Januari 2023, Disperakim, 21 Februari 2023

Sesuai RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, cakupan pelayanan air minum 100% ditargetkan tercapai pada tahun 2026. Untuk cakupan pelayanan sanitasi pada tahun 2022, Kabupaten Klaten sudah mencapai akses (dasar/ layak) 100%, dan ditargetkan untuk peningkatan dari akses layak menjadi akses aman air limbah domestik, yaitu fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Capaian Universal Access (100-0-100)* dengan dukungan program, diantaranya:

a) Program Kawasan Permukiman:
b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

Permasalahan:

Terdapat permasalahan dalam pemenuhan akses air minum yaitu sulitnya mencari sumber air di daerah lereng Merapi yang mencakup Desa Tlogowatu, Desa Tegalmulyo, Desa Sidorejo, Desa Tangkil, Desa Kendalsari dan Desa Talun yang terletak di Kecamatan Kemalang. Kemudian ada wilayah yang sumber airnya berasa asin berada di Kecamatan Cawas (Desa Bogor, Desa Pogung), Kecamatan Bayat (Desa Krikilan, Desa Ngerangan), Kecamatan Juwiring (Desa Gondangsari), Kecamatan Karangdowo (Desa Tumpukan, Desa Demangan, Desa Tambak, Desa Munggung) dan Kecamatan Pedan (Desa Kalangan, Desa Kaligawe).

Solusi:

Upaya pemenuhan target terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi dana desa dan alokasi dana desa, CSR, DAK, hibah air minum, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya. Untuk mendukung peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pengadaan truk tinja, pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jomboran, serta layanan lumpur tinja terjadwal yang akan segera direalisasikan.

8. Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang

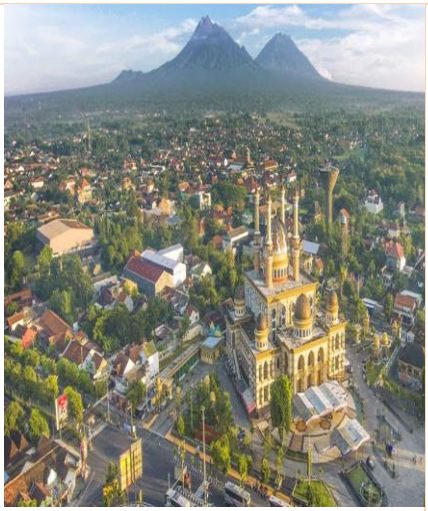

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang, setidaknya harus memperhatikan empat hal yaitu : (1) penduduk dan sosial; (2) ekonomi; (3) lingkungan dan (4) teknologi.

Sosial

Jumlah penduduk dan proyeksi jumlah penduduk ke depannya mempengaruhi banyak hal, termasuk penyedian perumahan dan fasilitas lainnya (sekolah, pasar, rumah sakit dll).

Ekonomi

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Pengembangan

potensi ekonomi yang berbeda memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda pula.

Lingkungan

Dengan pembangunan yang lebih terencana, maka kondisi lingkungan dapat lebih terjaga. Selain itu, perlu selalu diingat bahwa Indonesia terletak pada kawasan *ring of fire*, sehingga setiap daerah memiliki karakteristik kebencanaan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana yang berbeda pula untuk jenis bencana yang berbeda.

Teknologi

Perkembangan teknologi menyebabkan perilaku dan mobilitas manusia berubah.

Ukuran keberhasilan terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang diukur dengan indikator: Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang. Adapun capaian sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang** disajikan pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88,20		88,00	88,40	95,03	107,50	89,20	106,54

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Capaian sasaran: "**Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang**" diukur dengan indikator ***Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang*** sebagaimana Tabel 3.43. di atas Ketidak sesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang di Kabupaten Klaten sebesar 4,97 sehingga untuk kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang adalah 100 dikurangi 4,97 sama dengan 95,03.

Peraturah Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 telah disahkan. Penetapan RTRW ini akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/ Kota. Pada aspek pengendalian tata ruang, dari tahun 2018-2022 menunjukkan trend penurunan simpangan pemanfaatan ruang dari 8,22 % di tahun 2021 menurun menjadi 4,97 % pada tahun 2022. Hal ini menjadi pertanda baik, bahwa kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang semakin baik.

Adapun perkembangan hasil Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44

Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang

Tahun 2018-2022

Uraian		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas rencana lahan pertanian	6	0,23	0,23	0,235	0,228
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah	5.98	0,1	0,1	0,095	0,104
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman	25,06	25	25	25	2,19
4	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah	15.82	11	11	11	0,97

Uraian		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Persentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai. mata air. dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai. mata air. dan Rel KA	61.36	12	12	12	25,62
6	Persentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah	11.9	1	1	1	0,69
	Rata-rata Simpangan (%)	21.02	12,12	12,12	8,22	4,97

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2023.

Mulai tahun 2022 Penghitungan Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman dan Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah didasarkan pada kebutuhan pola ruang dalam RTRW, sedangkan Persentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air, dan Rel Kereta Api terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air, dan Rel Kereta Api, ada penambahan penghitungan simpangan sepadan Rel KA dan simpangan sempadan sungai sehingga angka menjadi besar. Pada tahun 2021 sebesar 12%, dan pada tahun 2022 menjadi 25,62%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang** dengan dukungan program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Permasalahan:

Masih adanya simpangan pemanfaatan ruang (8,22%) di tahun 2021, dan menjadi sebesar 4,97% pada tahun 2022.

Solusi:

Masih tingginya simpangan pemanfaatan ruang, maka diperlukan adanya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang holistik-integratif,

serta perlu peningkatan peran kelembagaan Forum Koordinasi Penataan Ruang Daerah (FKPRD).

9. Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Perhubungan menjadi pelayanan non dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Ukuran keberhasilan terwujudnya meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan yang efektif dan efisien diantaranya diukur dengan indikator: Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan** disajikan pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*)	0,52	0,52	0,52	0,62	0,62	100	0,54	114,81

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Capaian sasaran: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan diukur dengan indikator Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*) sebagaimana Tabel 3.45. di atas, capaian sasaran indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota sebesar 0,62 dan tingkat realisasi sebesar 100%. Angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,62. Tercapainya target dan indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan didukung oleh kualitas kerjasama antara bidang – bidang yang menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsi.

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus, dan angkutan publik. Perkembangan Fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 berdasarkan kebutuhan dan yang terpasang disajikan pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan

Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	%
				2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rambu lalu lintas biasa	3.979	buah	100	227	227	0	98	3.533	77,31
2	Rambu RPPJ	200	buah	13	0	0	0	10	150	75,00
3	Rambu Tipe F	100	buah	5	0	0	0	6	49	49,00
4	Marka Jalan	34.965	M^2	9.925	465	5715	0	2650	5848	74,86
5	Traffic Light	40	Unit	0	2	0	0	0	31	93,94
6	Guardrail	3.000	Meter	468	200	104	0	48	3288	77,55
7	Paku marka/ mata kucing	97.125	Buah	0	0	0	0	0	1685	77,12
8	Traffic cone	500	Buah	0	0	0	0	0	40	8,00
9	Deliniator	10.000	buah	0	0	0	0	0	0	0
10	Cermin Tikungan	50	buah	10	30	22	0	15	100	47,62
11	Zona Selamat sekolah	50	buah	0	5	0	0	1	9	30,00
12	Lampu kedip	20	buah	0	6	0	0	0	11	42,31
13	Rambu elektronik	40	unit	0	0	0	0	0	8	61,54
14	Water Barrier	100	buah	26	20	20	0	0	66	34,55
15	Penerangan jalan umum	14.318	unit	0	0	0	523	38	5539	38,69

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Sedangkan perkembangan kondisi sarana perhubungan/transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47.

Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)

Tahun 2018-2022

No	Kendaraan	Terpasang				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Barang	8.878	8.591	8.072	6.829	7.233
2	Mobil Bus:	495	525	488	433	456
	Umum:	384	408	391	399	397
	Besar	*97*	*88*	*91*	*84*	87
	Sedang	*248*	*268*	*215*	*230*	234
	Kecil	*39*	*52*	*85*	*85*	76
	Bukan Umum	111	117	97	34	59
3	Kendaraan Khusus / Alat Berat	13	24	10	17	8
	Jumlah	9.386	9.140	8.570	7.279	7.697

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan dengan dukungan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengelolaan subterminal Tipe C, kondisi terminal yang dikelola di tahun 2022 rata-rata sebesar 75-80%;
b. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari capaian rambu lalu lintas biasa yang terpasang baru 77,31% dari total kebutuhan; traffic light baru 31 unit yang terpasang (93,94%) dari total kebutuhan; rambu RPPJ terpasang 150 unit dari 200 unit kebutuhan; rambu tipe F terpasang 49 unit (49%) dari 100 unit kebutuhan yang harus terpasang;

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan perhubungan diantaranya:

a. Peningkatan perawatan subterminal type C menuju kondisi baik;
b. Optimilisasi pemasangan perlengkapan jalan (marka jalan, APILL, rambu, guadril, cermin tikungan, lampu penerangan jalan umum);
c. Peningkatan jumlah *Traffic Light ATCS* yang telah terkoneksi dengan *CCRoom*.

10. Sasaran Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing.

Mengacu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*

Serta untuk mencapai tujuan pendidikan nasional didasarkan pada pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup *(Life-skill),* 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing diukur dengan indikator: Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Persentase Pemajuan Kebudayaan. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* pada tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.48.

Tabel 3.48.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,39	13,24	13,25	13,52	13,40	99,11	13,94	96,13
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81	8,31	8,58	8,85	9,09	102,71	8,96	101,45
3	Persentase Pemajuan Kebudayaan	N/A	N/A	10,9	5	5	100	25	20,00

Sumber: BPS Jateng, Up date per 23 November 2022.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing*, pada tahun 2022, khusus indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagaimana Tabel 3.48. dapat dijelaskan sebagai-berikut:

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah peduduk untuk umur yang sama

saat ini. Adapun perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 3.5.

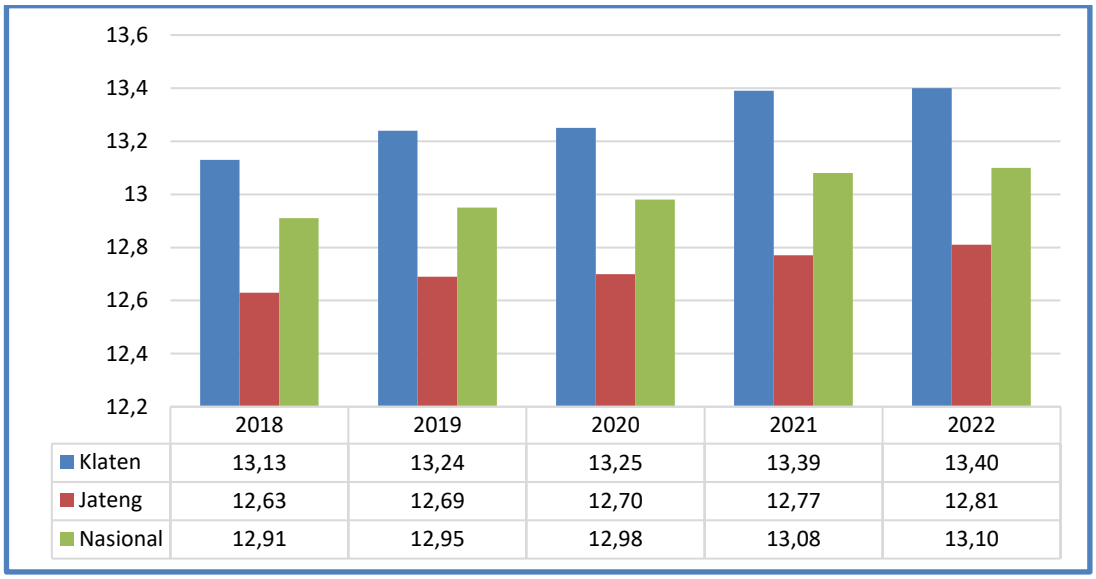

	2018	2019	2020	2021	2022
Klaten	13,13	13,24	13,25	13,39	13,40
Jateng	12,63	12,69	12,70	12,77	12,81
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Grafik 3.5. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Jateng. Update Terakhir 23 November 2022.

Dari grafik tersebut di atas tampak bahwa pada Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 naik cukup signifikan, mulai 13,13 sampai 13,40, atau naik sebesar 0,27 poin capaian kinerja ini di atas rata-rata Jawa Tengah dengan Angka Harapan Lama Sekolah 12,81. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 3.49.

Tabel 3.49.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut Jenis Kelamin Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tahun 2017-2021

Uraian	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	12,61	12,97	13,08	13,09	13,37	13,34	13,35	13,46	13,50	13,51
Jateng	12,52	12,62	12,64	12,70	12,71	12,63	12,64	12,66	12,79	12,93
Nasional	12,78	12,84	12,87	12,93	12,95	12,93	12,99	13,03	13,04	13,22

Sumber: BPS, Update Terakhir 4 Maret 2022.

Berdasarkan Tabel 3.49. Angka Harapan Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin selama tahun 2017-2021 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 3 tahun, sehingga lama pendidikan dasar selama 9 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Adapun perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 3.6.

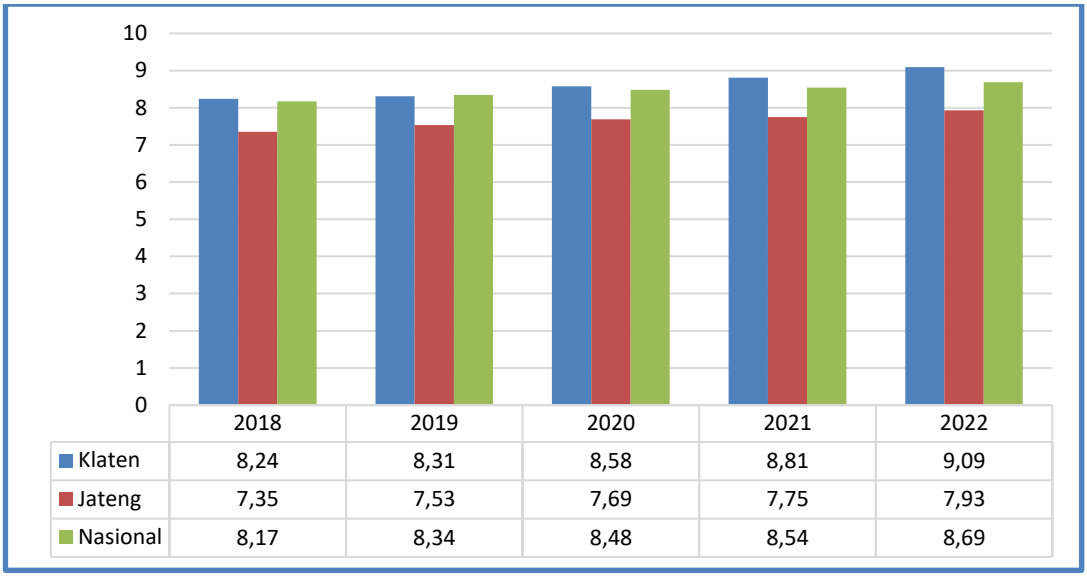

Grafik 3.6. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber : BPS, Update Terakhir 18 November 2022.

Dari grafik tersebut di atas tampak bahwa pada Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 naik cukup signifikan, mulai 8,24 pada tahun 2018 sampai 9,09 pada tahun 2022, atau capaian kinerjanya di atas rata-rata Jawa Tengah maupun nasional. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	8,92	8,93	8,94	9,17	9,35	7,62	7,65	7,77	8,07	8,33
Jateng	7,79	7,86	8,06	8,16	8,17	6,78	6,87	7,03	7,24	7,34
Nasional	8,56	8,62	8,11	8,90	8,92	7,65	7,72	7,89	8,07	8,17

Sumber: BPS, Update Terakhir 4 Maret 2022.

Berdasarkan Tabel 3.50. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin selama tahun 2017-2021 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing*, pada tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja program pada urusan pendidikan, diantaranya:

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2021 sudah mencapai 83,91%, naik menjadi 84,15% pada tahun 2022. Begitu juga dengan Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2021 sudah mencapai 72,11%, turun menjadi 68,12% pada tahun 2022 hal ini dipicu karena penduduk usia 13-15 tahun tidak semuanya berada di jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B. Sedangkan perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2022 disajikan pada Grafik 3.7.

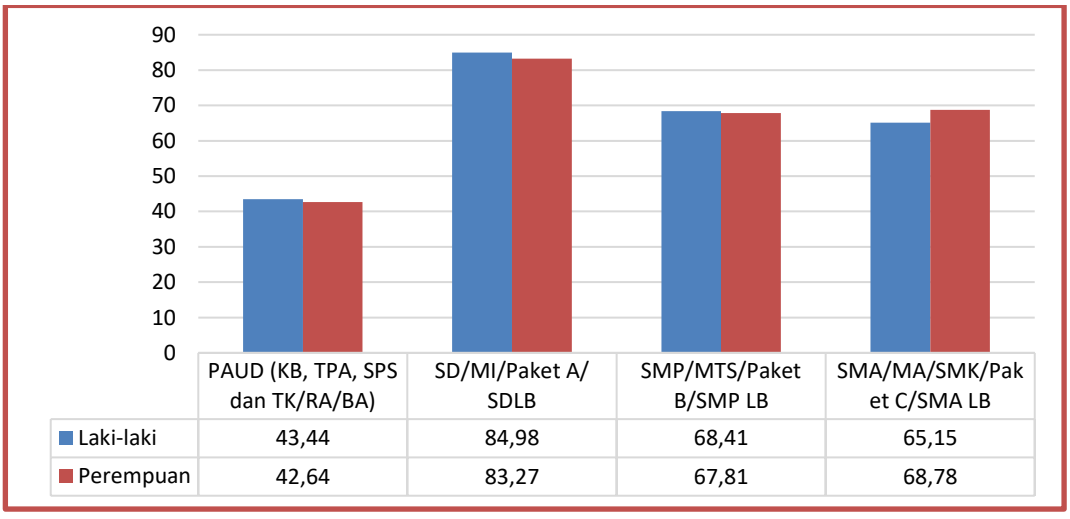

	PAUD (KB, TPA, SPS dan TK/RA/BA)	SD/MI/Paket A/ SDLB	SMP/MTS/Paket B/SMP LB	SMA/MA/SMK/Paket C/SMA LB
Laki-laki	43,44	84,98	68,41	65,15
Perempuan	42,64	83,27	67,81	68,78

Grafik 3.7. Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022, Update Terakhir 30 Januari 2023.

Berdasarkan Grafik 3.7. APM menurut jenjang Pendidikan dan jenis kelamin untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2022 APM perempuan lebih tinggi dibanding APM laki-laki kecuali jenjang SMA/MA/SMK/Paket C/SMA LB. APM PAUD (KB, TPA, SPS, dan TK/RA/BA) APM laki-laki lebih rendah dibanding APM perempuan, hal ini disebabkan anak usia 5-6 tahun yang berjenis kelamin perempuan lebih mempunyai kecenderungan untuk ingin sekolah PAUD. Sedangkan APM SD/MI/Paket A/SDLB APM laki-laki lebih tinggi dibanding APM perempuan. Sedangkan APM menurut jenjang Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMK/Paket C/SMA LB, APM laki-laki lebih rendah dibanding APM perempuan, hal ini disebabkan anak usia 13-18 tahun anak laki-laki sudah mengenal dunia kerja, mereka ingin bekerja.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2018-2022 perkembangannya bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2021 mencapai 91,65%, namun pada tahun 2022 menjadi 91,50%. Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 98,62% pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 menjadi 93,55%. Penurunan capaian kinerja di tahun 2022 belum sepenuhnya mencerminkan suatu hal yang negatif terhadap akses layanan dasar. Penurunan ini disebabkan anak usia sekolah dasar yang menempuh pendidikan di pondok pesantren, ada juga karena mengikuti orang tua yang merantau bekerja di luar daerah sehingga anak-anak tersebut tidak terdata pada layanan pendidikan dasar di Kabupaten Klaten. Namun juga diakui masih terdapat anak yang tidak sekolah karena berbagai alasan (anak berkebutuhan khusus, tidak mau sekolah, dan anak yang bekerja). Kondisi tersebut cukup mempengaruhi capaian kinerja layanan pendidikan dasar di Klaten. Sedangkan

perkembangan APK tahun 2022 menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin disajikan pada Grafik 3.8.

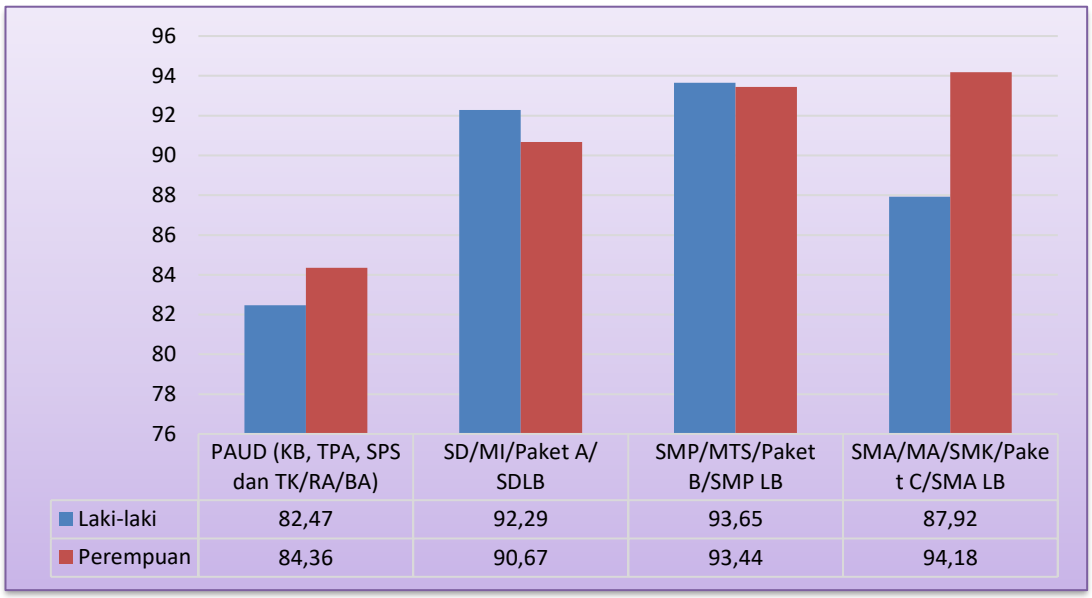

Grafik 3.8. Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022, Update Terakhir 30 Januari 2023.

Berdasarkan Grafik 3.8. APK menurut jenjang Pendidikan dan jenis kelamin untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2022 APK perempuan lebih tinggi dibanding APK laki-laki kecuali SD/MI/SDLB/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B/SMP LB. APK PAUD (KB, TPA, SPS, dan TK/RA/BA) APK laki-laki lebih rendah dibanding APK perempuan, dan APK SMA/MA/SMK/Paket C/SMA LB, hal ini disebabkan anak usia 5-6 tahun yang berjenis kelamin perempuan lebih mempunyai kecenderungan untuk ingin sekolah PAUD dan untuk jenjang angka melanjutkan (AL) SMA/MA/SMK/Paket C/SMA LB lebih banyak.

c. Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 3.9.

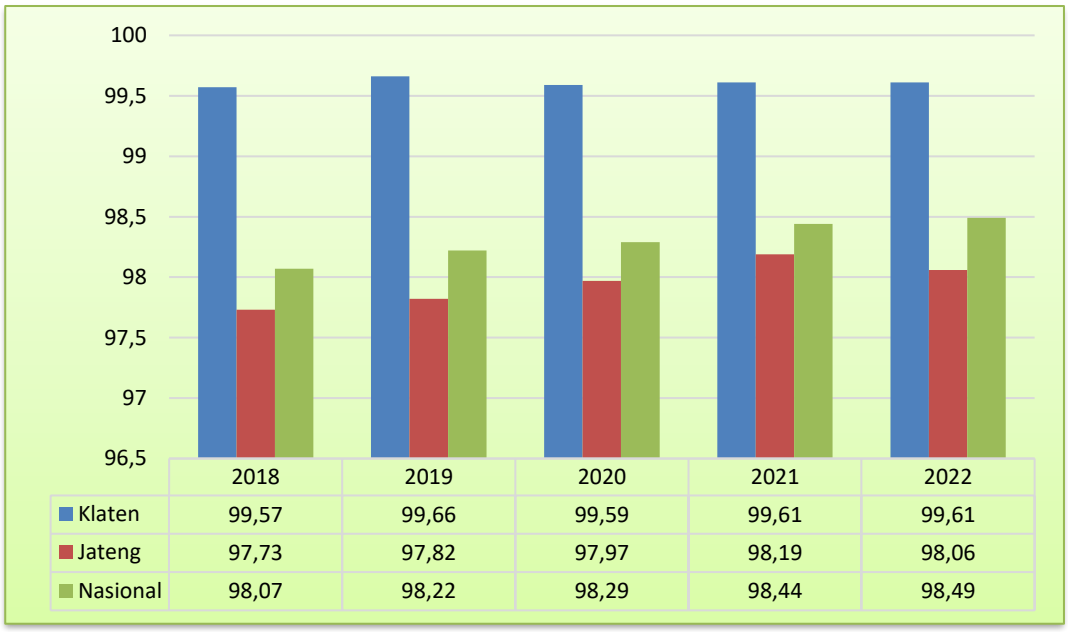

	2018	2019	2020	2021	2022
Klaten	99,57	99,66	99,59	99,61	99,61
Jateng	97,73	97,82	97,97	98,19	98,06
Nasional	98,07	98,22	98,29	98,44	98,49

Grafik 3.9. Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2022.

Sumber: BPS, Update Terakhir 21 Desember 2022.

Berdasarkan Grafik 3.9. Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun posisi Klaten sudah di atas rata-rata Jawa Tengah maupun nasional penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, dan hal ini terkait dengan mobilitas penduduk dan kondisi masyarakat.

Capaian kinerja *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* didukung dengan program:

1) Program Pengelolaan Pendidikan;
2) Program Pengembangan Kurikulum;
3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
4) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Permasalahan :

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

a. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini, diukur dari capaian APK PAUD pada tahun 2021 mencapai angka 79,40%, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 83,38%;
b. Pelaksanaan pendidikan dasar belum optimal, diukur dari capaian APM SD/MI/Paket A pada tahun 2021 sebesar 83,91%, pada tahun 2022 mencapai 84,14% dan jenjang Pendidikan SMP/MTs/paket B pada tahun 2021 sebesar 72,11%, sedangkan tahun 2022 turun menjadi 68,12%.
c. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi layak, tahun 2021 sekolah SD/MI kondisi bangunan baik baru 71,36%, tahun 2022 mencapai 67,10%. Sedangkan sekolah SMP/ MTs dan SMA/SMK/MA bangunan baik pada tahun 2021 sebesar 88,01%, tahun 2022 mencapai 82,70%; dan
d. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang Pendidikan, dilihat dari guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV tahun 2021 baru 89,79%, sedangkan tahun 2022 mencapai 90,11%.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, diantaranya sebagai berikut:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan pelatihan dan *workshop* dalam rangka peningkatan kapasitas guru;
c. Pengisian Kepala Sekolah dengan program guru penggerak;
d. Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* pada tahun 2022, khusus indikator *Persentase Pemajuan Kebudayaan* sebagaimana Tabel 3.48. dapat dijelaskan sebagai-berikut:

a) Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Kabupaten Klaten terkenal dengan seni dan budaya yang khas seperti seni tari, ketoprak, wayang, dan lainnya. Selama ini untuk meningkatkan kegiatan seni dan budaya serta kreativitas masyarakat di bidang seni dan budaya kegiatan pelestarian seni dan budaya tetap dilakukan. Selengkapnya perkembangan indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 dapat disajikan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51

Perkembangan Kegiatan Seni Budaya Kabupaten Klaten

Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	31	40	7	1	5
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lokasi	93	98	132	149	149
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	0	0	1	1	14
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	0	0	3	3	3
Jumlah event yang dilaksanakan dengan pihak lain	Event	0	0	0	2	8

Jumlah Pembinaan Sanggar seni	Klpk	0	0	0	10	10
Jumlah Situs Cagar Budaya yang di Kelola Dinas	Situs	0	0	0	4	4
Jumlah Objek Cagar budaya yang di Kelola Dinas	obyek	0	0	0	26	87
Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang ditetapkan	Sertifikat	0	0	0	2	7

Sumber : Disbudporapar, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Pada tahun 2022 kegiatan seni dan budaya mulai mendapat porsi/perhatian kebijakan untuk pengembangan seni dan budaya seiring dengan memulihnya situasi masyarakat dari masa pandemi. Hal ini dilakukan untuk menghibur sekaligus mengejar target misi pemajuan kebudayaan Daerah.

b) Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Mengingat Klaten sebagai pusat perpaduan peradaban antar kerajaan, tidak mengherankan apabila beberapa tahun terakhir ini adanya penemuan benda, situs dan kawasan cagar budaya. Sebagai langkah pelestarian benda cagar budaya, pada tahun 2021 telah dilakukan penetapan Monumen Juang 45 Klaten sebagai Taman Budaya yang didalamnya terdapat museum sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewadahi pelaku seni dalam berkarya.

Tabel 3.52.

Jumlah Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Seni Budaya

Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Budaya Kabupaten Klaten	Lokasi	0	0	0	1	1
Museum Daerah	Lokasi	0	0	0	1	1

Sumber : Disbudporapar, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Mulai tahun 2021 dengan penetapan Taman Budaya sebagai tempat untuk kegiatan seni budaya serta sebagai tempat penyimpanan, memamerkan dan memberikan edukasi tentang sejarah perkembangan peradaban di Kabupaten Klaten. Ke depan masalah pemajuan kebudayaan akan menjadi agenda Daerah dalam mewujudkan daya saing Daerah.

Capaian kinerja *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* dengan indikator pemajuan kebudayaan didukung dengan program:

1) Program Pengembangan Kebudayaan;
2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
3) Program Pembinaan Sejarah; dan
4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Permasalahan :

Urusan Kebudayaan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

a. Terbatasnya revitalisasi cagar budaya; dan
b. Belum semua cagar budaya dikelola secara terpadu sampai dengan tahun 2022 masih sebanyak 3 cagar budaya.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kebudayaan, dengan peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya secara masif.

11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan, bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.*

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan pelindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,86	76,68	76,78	76,84	76,95	100,14	77,02	99,91

Sumber: BPS Jateng, Up date per 23 November 2022.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*, pada tahun 2022, sudah di atas rata-rata capaian Jawa Tengah yakni 74,57 tahun. Adapun kondisi Usia Harapan Hidup (UHH) eks-karesidenan Surakarta pada tahun 2022 dapat disajikan pada Grafik 3.10.

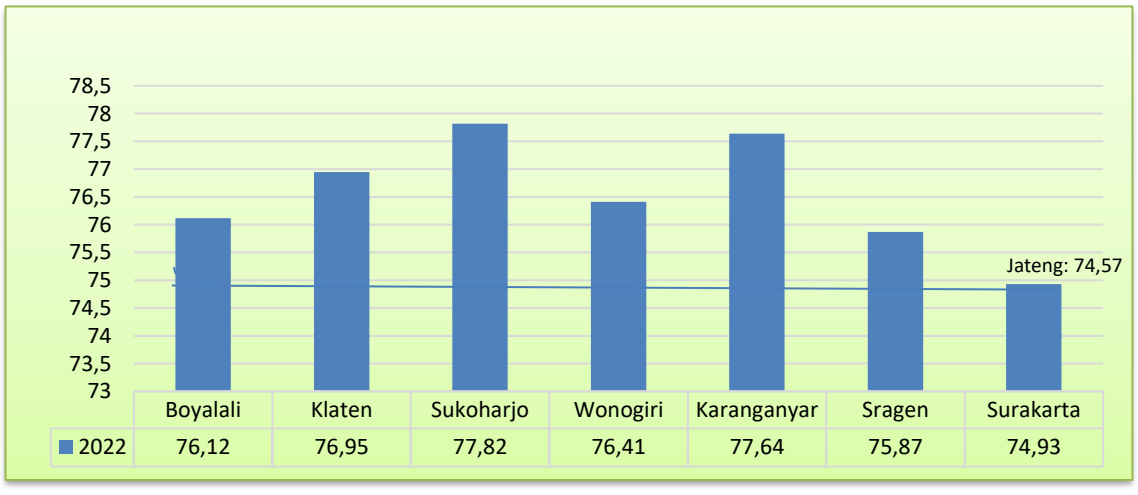

Grafik 3.10. Usia Harapan Hidup (UHH) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022

Sumber: BPS Jawa Tengah, Update Terakhir 23 November 2022.

Capaian kondisi Usia Harapan Hidup di Klaten ditunjang beberapa indikator kunci, diantaranya:

1. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasarana serta tenaga kesehatan di Kabupaten Klaten sebagai salah satu indikator untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita pada setiap tahunnya meningkat dikarenakan adanya pertambahan jumlah posyandu. Sedangkan rasio puskesmas, RS, dokter, dan tenaga medis disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54.

Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio posyandu per satuan balita	27,63	27,99	28,00	29,01	30,17
2	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,896	0,237	0,026	0,06	0,05
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,253	0,074	0,05	0,03	0,71

Sumber: Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Disamping Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan sebagaimana Tabel 3.54. tersebut di atas, untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

2. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2022 sebesar 76,18%. Cakupan ini masih dibawah target karena dengan adanya pandemi banyak ibu hamil yang takut memeriksakan

kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga komplikasi kebidanan tidak terdeteksi. Sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan. Berikut perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.

Tabel 3.55.

Cakupan Komplikasi kebidanan yang Ditangani

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	89,01	83,28	84,40	82,61	76,18
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,98	98,99	99,99	100	99,99

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Disamping cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebagaimana Tabel 3.55. tersebut di atas, untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan penanganan gizi.

3. Cakupan Penanganan Gizi

Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Dapat dilihat dari tabel bahwa Cakupan desa UCI di Kabupaten Klaten sudah tercapai 100%. Perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.56.

Tabel 3.56.

Cakupan Penanganan Gizi

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
2	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	32,6

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Disamping cakupan penanganan gizi yang memiliki kompetensi kebidanan sebagaimana Tabel 3.56. tersebut di atas, untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan pelayanan kesehatan penduduk. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan pada tahun 2022 sebesar 32,6% hal ini dikarenakan untuk definisi operasional ada perbedaan. Untuk tahun 2022 yang dimaksud Balita Gizi Buruk mendapat perawatan adalah Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan sesuai dengan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT). Untuk kasus gizi buruk yang mendapat penanganan sesuai PGBT baru sekitar 32,6%. Hal ini disebabkan karena baru 2 (dua) Puskesmas yang terlatih PGBT, sedangkan 32 (tiga puluh dua) puskesmas lainnya baru mendapatkan orientasi saja belum pelatihan secara keseluruhan. Kasus balita gizi buruk akan mendapatkan penanganan sesuai PGBT setelah ada pendampingan oleh dokter spesialis anak dan diteruskan oleh puskesmas.

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Cakupan pelayanan kesehatan penduduk di Tahun 2022 hampir semua mengalami penurunan, sehingga untuk kedepan diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya difokuskan untuk Covid-19, tetapi juga perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan

terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penduduk selama tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,67	11	9,09	12,63	11,7
2	Cakupan kunjungan bayi	%	98,36	98,07	96,89	68,13	96,93
3	Cakupan puskesmas	%	130	130	130	130	130
4	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
5	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	92,51	93,27	93,33	95,24	93,15
6	Cakupan pelayanan nifas	%	97,54	97,55	96,92	98,47	98,54
7	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	53,47	56,03	55,63	57,57	64,33
8	Cakupan pelayanan anak balita	%	96,17	95,77	92,71	67,75	95,97

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Berdasarkan tabel 3.57, cakupan kunjungan bayi di Tahun 2022 sudah di atas target yang ditetapkan yang artinya sasaran bayi telah dilakukan pelayanan kunjungan bayi sesuai standar dimana dipantau pertumbuhan sebanyak minimal 8 kali, dipantau perkembangan sebanyak 2 kali dan diberikan pelayanan standar pada bayi.

Cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2022 sebesar 93,15 %, yang artinya masih ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pertama kali lebih dari 12 minggu dan masih ada ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga saat hamilnya tidak dipantau oleh tenagakesehatan.

Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2022 sebesar 98,54 % dan kinerja ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya tenaga Kesehatan sudah memberikan pelayanan nifas lengkap dari kunjungan nifas1, 2 dan 3 sesuai dengan standar pelayanan kunjungan nifas.

Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani pada tahun 2022 sebesar 64,33 % dan ini masih dibawah target yang ditetapkan. Diharapkan tenaga kesehatan dapat mendeteksi kasus komplikasi – komplikasi neonatus sejak dini sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi.

Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2022 sebesar 95,97 %, dengan turunnya kasus COVID, posyandu sudah mulai beroperasi dan dapat melakukan pelayanan kunjungan balita sesuai standar.

5. Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

Cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten semakin menurun. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 (Triwulan III). Perkembangan Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk selama tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58.

Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR	%	101,3	99,8	88,4	99,7	89,5
2	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	120	320	83,33	120	240
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	54,1	47,0	29,33	29,8	29,5
4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	41,0	36,5	29,98	31,7	36,6
5	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	169,6	109,7	46,04	86,3	122,7
6	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	1,9	6,7	1,96	2,6	2,9
7	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	41,0	36,5	31,44	47,2	51,1
8	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	72,7	74,7	71,63	87,6	85,6
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
10	Penderita diare yang ditangani	%	11,6	9,8	4,4	3,4	3,5
11	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,8	0,4	0,003	0,77	0,6
12	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,011	0,012	0,011	0,01	0,01

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 30 Januari 2023.

Di tahun 2022 cakupan pelayanan penanganan penyakit untuk Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Tingkat prevalensi Tuberkulosis, Tingkat kematian karena Tuberkulosis, Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS, Penderita diare yang ditangani mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dan beberapa hal yang mengalami penurunan yaitu Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR, Cakupan balita pneumonia yang ditangani, Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, Angka kejadian Malaria. Sedangkan Prevalensi HIV/AIDS dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD stagnan di tahun 2021 dan 2022.

Permasalahan:

a. Masih adanya angka kematian bayi pada tahun 2022 sebesar 11,63 per 1.000 kelahiran hidup, meningkatnya angka kematian balita tahun 2022 sebesar 1,88 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian neonatal sebesar 8,63 per 1.000 kelahiran hidup;
b. Kasus kematian ibu pada tahun 2022 sebanyak 11 kasus, atau menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 45 kasus;
c. Belum optimalnya pemenuhan tenaga dokter dan medis yang tersedia pada pelayanan kesehatan, yaitu rasio dokter per satuan penduduk tahun 2022 sebesar 0,05 dan rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,71;
d. Belum semua Standar Pelayanan Minimal Kesehatan mencapai 100 %;
e. Masih ditemukannya kasus penyakit seperti DBD, Diare, Stunting, Pneumonia dan kasus penyakit tidak menular.

Solusinya:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

a. Pengendalian Covid-19 melalui pelaksanaan vaksin, penerapan protokol kesehatan, dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat;

b. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita;
c. Optimalisasi penanganan penyakit, dan peningkatan edukasi penanganan permasalahan kesehatan masyarakat;
d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana kesehatan;
e. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.

12. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, *bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat berasaskan: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Serta berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian penyelenggaraan kesejahteraan sosial*

merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Mengingat kesejahteraan masyarakat sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesejahteraan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta

aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan bantuan sosial yang harus diwujudkan.

Ukuran keberhasilan mengingkatnya kesejahteraan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator: 1) Persentase PMKS yang tertangani, 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan 3) Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat*** disajikan pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase PMKS yang tertangani	97,27	62,26	90,32	67,5	87,39	129,46	69,5	125,74
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,48	3,54	5,46	5,16	4,31	116,50	4,25	101,41
3	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,671	0,621	0,6854	0,7034	0,7034	100,00	0,6974	100,86

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update terakir 12 Januari 2022. BPS Jateng, Up date per 23 November 2022. Dispermades Up date per 17 Januari 2023.

1. Persentase PMKS yang Tertangani

Indikator PMKS yang tertangani dilihat dari capaian Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), persentase penanganan penyandang masalah sosial, dan Penguatan Kapasitas PSKS, dan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dari 26 (dua puluh enam) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teridentifikasi pada tahun 2020 sebanyak 172.857 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 144.140 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 10.433 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang. Pada tahun 2021 menjadi sebanyak 168.291 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 138.176 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 12.218 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang. Pada tahun 2022 menjadi sebanyak 148.242 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 126.108 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 3.114 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang.

b) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi Sejenis Lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2018−2022 disajikan pada Grafik 3.11.

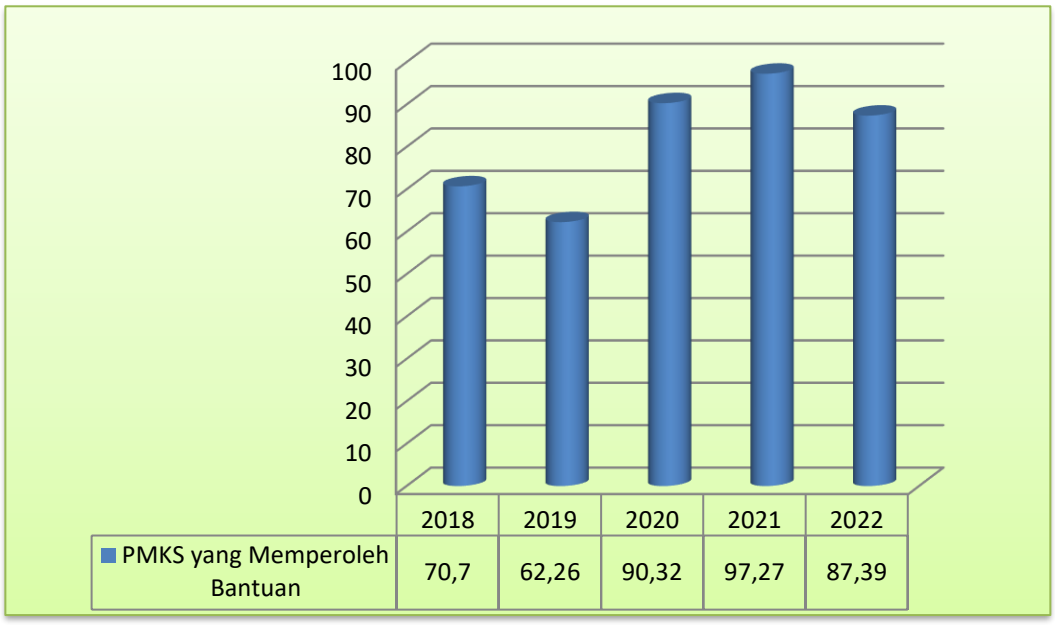

Grafik 3.11. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2018−2022.
Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2023.

Berdasarkan Grafik 3.11. sebagaimana tersebut di atas, Pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 172.857 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 156.127 orang. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 168.291 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 163.705 orang. Kondisi tahun 2022 jumlah PMKS sebanyak 148.242 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 129.546 orang. Penanganan PMKS selama ini diupayakan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

c) Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 10 (sepuluh) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 26 (dua puluh enam) Jenis PMKS di Klaten. 10 (sepuluh) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi Kelembagaan Kesejaheraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, dan 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Dari sebanyak 10 (sepuluh) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96,01% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat dengan suksesnya program-program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan

keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja, seperti pada Gambar 3.1.

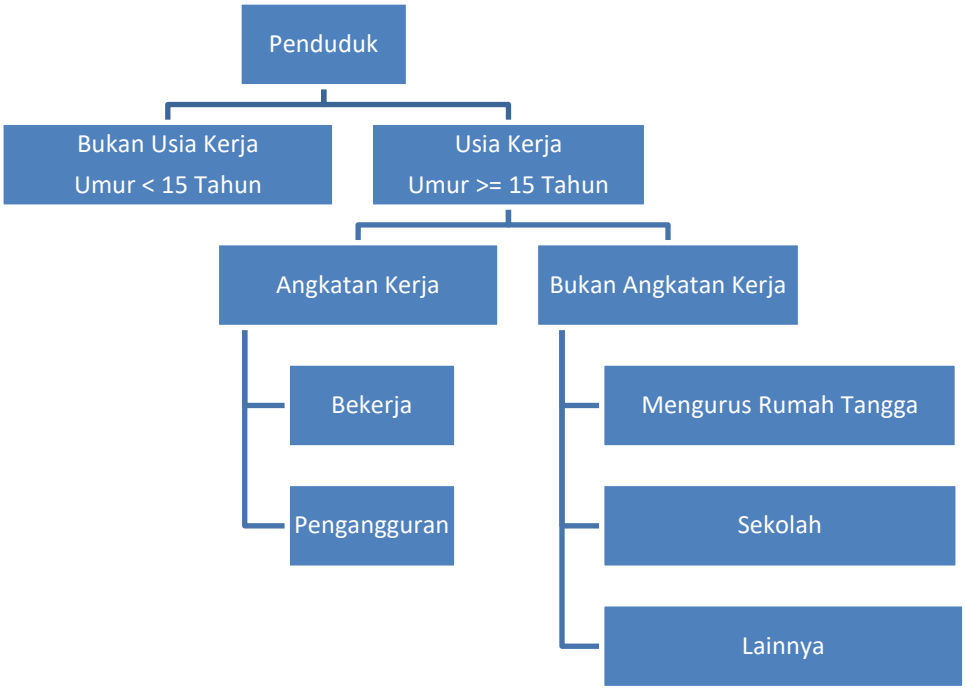

Gambar 3.1. Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Sebagai gambaran penduduk Usia Kerja berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60.

Penduduk Usia Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Tahun 2018-2022

Jenis Pekerjaan			Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Angkatan Kerja		622.450	644.689	641.245	631.245	651.177
	1	*Bekerja*	602.911	621.855	606.253	596.661	623.119
	2	*Pengangguran*	19.539	22.834	34.992	34.584	28.058
II	Bukan Angkatan Kerja		548.961	530.297	619.261	636.027	626.278
	1	*Sekolah*	219.862	217.464	253.946	254.733	257.415
	2	*Mengurus Rumah Tangga*	116.454	116.130	135.612	134.924	136.564
	3	*Lainnya*	212.644	196.704	229.703	246.370	232.299
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			67,14	69,10	68,33	66,89	68,66
Tingkatan Pengangguran Terbuka (TPT)			*3,11*	3,54	5,46	5,48	4,31

Sumber: BPS Jateng, Update Terakhir 2022. (Diolah)

Berdasarkan Tabel 3.60. di atas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja selama tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2018 sebanyak 622.450 orang, tahun 2019 menjadi sebanyak 644.689 orang, tetapi tahun 2020 turun menjadi sebanyak 641.245 orang, dan tahun 2021 turun lagi menjadi sebanyak 631.245 orang, dan tahun 2022 menjadi sebanyak 651.177 orang. Sedangkan bukan angkatan kerja juga cenderung fluktuatif. Tahun 2018 sebanyak 548.961 orang, tahun 2019 turun menjadi sebanyak 530.297 orang, tetapi tahun 2020 turun menjadi sebanyak 619.261 orang, dan tahun 2021 naik menjadi sebanyak 636.027 orang, dan pada tahun 2022 diperkirakan menjadi sebanyak 626.278 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga cenderung fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 69,10%, tahun 2020 turun menjadi sebesar 68,33%, tahun 2021 turun lagi menjadi 66,89%, tahun 2022 menjadi 68,66% Begitu juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 3,54%, tahun 2020 turun menjadi sebesar 5,46%, tahun 2021 naik menjadi 5,48%, dan tahun 2022 menjadi 4,31%.

Pengertian pengangguran terbuka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Lebih lengkapnya, BPS membagi jenis pengggangguran ini menjadi empat bagian, yaitu:

1) Orang yang sedang mencari pekerjaan atau *job seeker*.
2) Orang yang sedang mempersiapkan usaha.
3) Orang yang memilih untuk tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4) Orang yang sudah mendapatkan kontrak pekerjaan namun belum mulai bekerja. Selama tahun 2018-2022 tingkat pengangguran terbuka di Klaten fluktuatif, hal ini disebabkan karena keempat faktor tersebut. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Klaten tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 3.12.

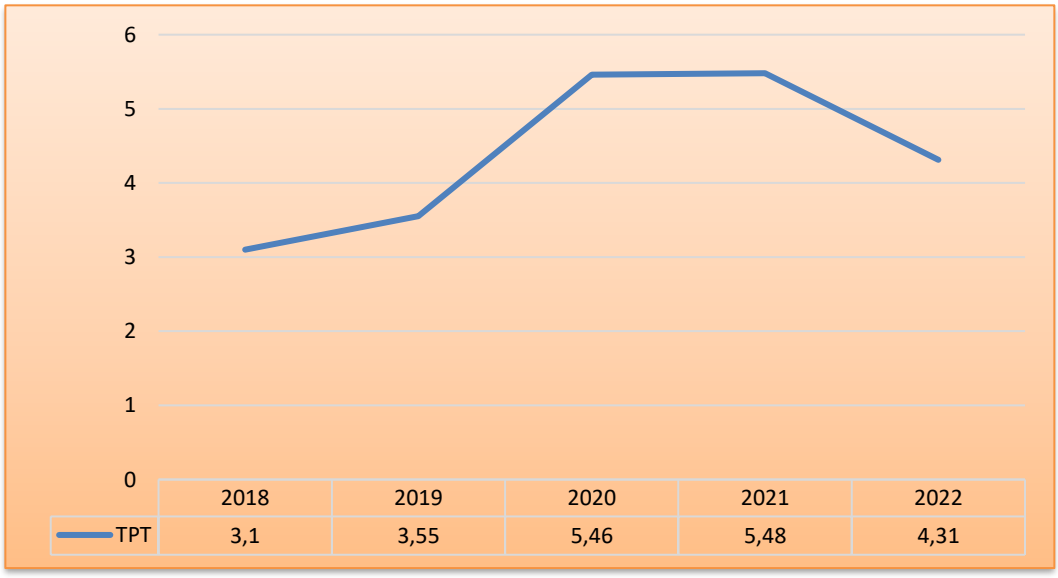

Grafik 3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Update Terakhir 21 Desember 2022.

Berdasarkan Grafik 3.12. di atas, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebanyak 3,1%, tahun 2019 menjadi sebanyak 3,55%, namun secara berturut-turut (tahun 2021-2022) turun, terakhir pada tahun 2021 sebesar 5,48% dan di tahun 2022 menjadi sebesar 4,31%. Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diperkirakan mengalami perbaikan seiring adanya program stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemulihan Ekonomi pada tahun 2022, dapat dilihat dari beberapa sektor usaha dalam bidang konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang sudah mulai bangkit dalam usahanya sehingga menyerap banyak pekerja.

3. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah pengukuran tentang klasifikasi dan status desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial (indeks ketahanan sosial), ekonomi (indeks ketahanan ekonomi) dan lingkungan (indeks ketahanan ekologi). Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi:

1. modal sosial;
2. kesehatan;
3. pendidikan; dan
4. permukiman.

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari perangkat indikator:

1. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator jenis kegiatan ekonomi penduduk.
2. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
   a) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
   b) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
   c) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
3. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator: terdapat kantor pos dan jasa logistik.
4. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
   a) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
   b) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
   c) Akses penduduk ke kredit.

Indeks Ketahanan Ekologi terdiri dari perangkat indikator:

1. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
   a) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara; dan
   b) Terdapat sungai yang terkena limbah.
2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
   a) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan); dan
   b) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam lima status, yakni:

(i) Desa Sangat Tertinggal;

(ii) Desa Tertinggal;

(iii) Desa Berkembang;

(iv) Desa Maju; dan

(v) Desa Mandiri.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: < 0,491
2. Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri: > 0,815

Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Klaten menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022, disajikan pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61.

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten

Tahun 2022

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi		No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)
1	Bayat					14	Kemalang			
	1	BANYURIPAN	0,6751	BERKEMBANG			1	BALERANTE	0,7683	MAJU
	2	BELUK	0,6462	BERKEMBANG			2	BAWUKAN	0,8056	MAJU
	3	BOGEM	0,6387	BERKEMBANG			3	BUMIHARJO	0,7905	MAJU
	4	DUKUH	0,7417	MAJU			4	DOMPOL	0,8057	MAJU
	5	GUNUNG GAJAH	0,6756	BERKEMBANG			5	KEMALANG	0,7570	MAJU
	6	JAMBAKAN	0,6632	BERKEMBANG			6	KENDALSARI	0,7237	MAJU
	7	JARUM	0,6698	BERKEMBANG			7	KEPUTRAN	0,8857	MANDIRI
	8	JOTANGAN	0,6640	BERKEMBANG			8	PANGGANG	0,7817	MAJU
	9	KEBON	0,6883	BERKEMBANG			9	SIDOREJO	0,7683	MAJU
	10	KRAKITAN	0,6684	BERKEMBANG			10	TALUN	0,8005	MAJU
	11	KRIKILAN	0,6165	BERKEMBANG			11	TANGKIL	0,7997	MAJU

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
	12	NENGAHAN	0,6752	BERKEMBANG		12	TEGALMULYO	0,7770	MAJU
	13	NGERANGAN	0,7833	MAJU		13	TLOGOWATU	0,7738	MAJU
	14	PASEBAN	0,7230	MAJU					
	15	TALANG	0,6238	BERKEMBANG					
	16	TAWANGREJO	0,6725	BERKEMBANG					
	17	TEGALREJO	0,6435	BERKEMBANG					
	18	WIRO	0,6792	BERKEMBANG					
2	Cawas				15	Klaten Selatan			
	1	BALAK	0,7598	MAJU		1	DANGURAN	0,8075	MAJU
	2	BARAN	0,6832	BERKEMBANG		2	GLODOGAN	0,7529	MAJU
	3	BAREPAN	0,8530	MANDIRI		3	JETIS	0,6840	BERKEMBANG
	4	BAWAK	0,6552	BERKEMBANG		4	KAJORAN	0,8094	MAJU
	5	BENDUNGAN	0,7552	MAJU		5	KARANGLO	0,6840	BERKEMBANG
	6	BOGOR	0,7484	MAJU		6	MERBUNG	0,7567	MAJU
	7	BURIKAN	0,6968	BERKEMBANG		7	NGALAS	0,7392	MAJU
	8	CAWAS	0,7583	MAJU		8	NGLINGGI	0,7914	MAJU
	9	GOMBANG	0,7852	MAJU		9	SUMBEREJO	0,7727	MAJU
	10	JAPANAN	0,6663	BERKEMBANG		10	TEGALYOSO	0,7603	MAJU
	11	KARANGASEM	0,7946	MAJU		11	TRUNUH	0,7156	MAJU
	12	KEDUNGAMPEL	0,7195	MAJU					
	13	MLESE	0,6997	BERKEMBANG					
	14	NANGGULAN	0,7003	BERKEMBANG					
	15	PAKISAN	0,8022	MAJU					
	16	PLOSOWANGI	0,6541	BERKEMBANG					
	17	POGUNG	0,7203	MAJU					
	18	TIRTOMARTO	0,6541	BERKEMBANG					
	19	TLINGSING	0,6575	BERKEMBANG					
	20	TUGU	0,7237	MAJU					
3	Ceper				16	Klaten Tengah			
	1	CEPER	0,7263	MAJU		1	GUMULAN	0,7041	BERKEMBANG
	2	CETAN	0,7021	BERKEMBANG		2	JOMBORAN	0,7079	MAJU
	3	DLIMAS	0,6800	BERKEMBANG		3	SEMANGKAK	0,7390	MAJU
	4	JAMBUKIDUL	0,6759	BERKEMBANG					
	5	JAMBUKULON	0,7490	MAJU					
	6	JOMBOR	0,7667	MAJU					
	7	KAJEN	0,7871	MAJU					
	8	KLEPU	0,7465	MAJU					
	9	KUJON	0,7654	MAJU					
	10	KUNCEN	0,7165	MAJU					
	11	KURUNG	0,6722	BERKEMBANG					
	12	MEGER	0,6665	BERKEMBANG					
	13	MLESE	0,6792	BERKEMBANG					
	14	NGAWONGGO	0,6060	BERKEMBANG					

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
	15	PASUNGAN	0,6854	BERKEMBANG					
	16	POKAK	0,7330	MAJU					
	17	SREBEGAN	0,7381	MAJU					
	18	TEGALREJO	0,6927	BERKEMBANG					
4	Delanggu				17	Klaten Utara			
	1	BANARAN	0,7130	MAJU		1	BELANGWETAN	0,8137	MAJU
	2	BOWAN	0,6778	BERKEMBANG		2	JEBUGAN	0,8154	MAJU
	3	BUTUHAN	0,6441	BERKEMBANG		3	JONGGRANGAN	0,8132	MAJU
	4	DELANGGU	0,7949	MAJU		4	KARANGANOM	0,8098	MAJU
	5	DUKUH	0,7765	MAJU		5	KETANDAN	0,7962	MAJU
	6	GATAK	0,8063	MAJU		6	SEKARSULI	0,7629	MAJU
	7	JETIS	0,6386	BERKEMBANG					
	8	KARANG	0,7581	MAJU					
	9	KEPANJEN	0,8116	MAJU					
	10	KRECEK	0,7060	BERKEMBANG					
	11	MENDAK	0,6737	BERKEMBANG					
	12	SABRANG	0,7949	MAJU					
	13	SEGARAN	0,6892	BERKEMBANG					
	14	SIDOMULYO	0,6306	BERKEMBANG					
	15	SRIBIT	0,7003	BERKEMBANG					
	16	TLOBONG	0,7057	BERKEMBANG					
5	Gantiwarno				18	Manissrenggo			
	1	BATURAN	0,6460	BERKEMBANG		1	BARUKAN	0,6848	BERKEMBANG
	2	CEPORAN	0,6597	BERKEMBANG		2	BENDAN	0,7567	MAJU
	3	GENTAN	0,6587	BERKEMBANG		3	BORANGAN	0,6910	BERKEMBANG
	4	GESIKAN	0,6646	BERKEMBANG		4	KEBONALAS	0,7203	MAJU
	5	JABUNG	0,7248	MAJU		5	KECEMEN	0,6327	BERKEMBANG
	6	JOGOPRAYAN	0,6014	BERKEMBANG		6	KEPURUN	0,7289	MAJU
	7	KARANGTURI	0,6770	BERKEMBANG		7	KRANGGAN	0,7276	MAJU
	8	KATEKAN	0,6746	BERKEMBANG		8	LESES	0,6813	BERKEMBANG
	9	KERTEN	0,6640	BERKEMBANG		9	NANGSRI	0,7584	MAJU
	10	KRAGILAN	0,6824	BERKEMBANG		10	NGEMPLAKSENENG	0,7852	MAJU
	11	MLESE	0,6613	BERKEMBANG		11	SAPEN	0,6738	BERKEMBANG
	12	MURUH	0,6497	BERKEMBANG		12	SOLODIRAN	0,7443	MAJU
	13	MUTIHAN	0,6630	BERKEMBANG		13	SUKORINI	0,7068	BERKEMBANG
	14	NGANDONG	0,6121	BERKEMBANG		14	TANJUNGSARI	0,7987	MAJU
	15	SAWIT	0,6746	BERKEMBANG		15	TASKOMBANG	0,7703	MAJU
	16	TOWANGSAN	0,7303	MAJU		16	TIJAYAN	0,6997	BERKEMBANG
6	Jatinom				19	Ngawen			
	1	BANDUNGAN	0,6327	BERKEMBANG		1	CANDIREJO	0,6625	BERKEMBANG
	2	BENGKING	0,6703	BERKEMBANG		2	DRONO	0,6327	BERKEMBANG
	3	BETENG	0,6575	BERKEMBANG		3	DUWET	0,6490	BERKEMBANG

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
	4	BONYOKAN	0,8141	MAJU		4	GATAK	0,7044	BERKEMBANG
	5	CAWAN	0,6270	BERKEMBANG		5	KAHUMAN	0,6837	BERKEMBANG
	6	GEDAREN	0,6590	BERKEMBANG		6	KWAREN	0,7008	BERKEMBANG
	7	GLAGAH	0,6587	BERKEMBANG		7	MANJUNG	0,6695	BERKEMBANG
	8	JEMAWAN	0,6725	BERKEMBANG		8	MANJUNGAN	0,6686	BERKEMBANG
	9	KAYUMAS	0,6568	BERKEMBANG		9	MAYUNGAN	0,6813	BERKEMBANG
	10	KRAJAN	0,7486	MAJU		10	NGAWEN	0,6552	BERKEMBANG
	11	MRANGGEN	0,7013	BERKEMBANG		11	PEPE	0,6832	BERKEMBANG
	12	PANDEYAN	0,6476	BERKEMBANG		12	SENDEN	0,6816	BERKEMBANG
	13	PULUHAN	0,7030	BERKEMBANG		13	TEMPURSARI	0,6943	BERKEMBANG
	14	RANDULANANG	0,6648	BERKEMBANG					
	15	SOCOKANGSI	0,6943	BERKEMBANG					
	16	TEMUIRENG	0,6568	BERKEMBANG					
	17	TIBAYAN	0,6575	BERKEMBANG					
7	Jogonalan				20	Pedan			
	1	BAKUNG	0,7019	BERKEMBANG		1	BEJI	0,7062	BERKEMBANG
	2	DOMPYONGAN	0,6770	BERKEMBANG		2	BENDO	0,6783	BERKEMBANG
	3	GONDANGAN	0,6719	BERKEMBANG		3	JATIMULYO	0,6913	BERKEMBANG
	4	GRANTING	0,6216	BERKEMBANG		4	JETISWETAN	0,6984	BERKEMBANG
	5	JOTON	0,7273	MAJU		5	KALANGAN	0,6740	BERKEMBANG
	6	KARANGDUKUH	0,6849	BERKEMBANG		6	KALIGAWE	0,7035	BERKEMBANG
	7	KRAGUMAN	0,7440	MAJU		7	KEDEN	0,7656	MAJU
	8	NGERING	0,6906	BERKEMBANG		8	KEDUNGAN	0,7168	MAJU
	9	PAKAHAN	0,7687	MAJU		9	LEMAHIRENG	0,6790	BERKEMBANG
	10	PLAWIKAN	0,7559	MAJU		10	NGAREN	0,7425	MAJU
	11	PRAWATAN	0,7241	MAJU		11	SOBAYAN	0,8059	MAJU
	12	REJOSO	0,7244	MAJU		12	TAMBAKBOYO	0,7743	MAJU
	13	SOMOPURO	0,6835	BERKEMBANG		13	TEMUWANGI	0,7598	MAJU
	14	SUMYANG	0,7010	BERKEMBANG		14	TROKETON	0,7051	BERKEMBANG
	15	TAMBAKAN	0,6708	BERKEMBANG					
	16	TANGKISAN POS	0,6775	BERKEMBANG					
	17	TITANG	0,6162	BERKEMBANG					
	18	WONOBOYO	0,7051	BERKEMBANG					
8	Juwiring				21	Polaharjo			
	1	BOLOPLERET	0,6825	BERKEMBANG		1	BORONGAN	0,6010	BERKEMBANG
	2	BULUREJO	0,7022	BERKEMBANG		2	GLAGAHWANGI	0,6352	BERKEMBANG
	3	CARIKAN	0,6963	BERKEMBANG		3	JANTI	0,6651	BERKEMBANG
	4	GONDANGSARI	0,6590	BERKEMBANG		4	JIMUS	0,6743	BERKEMBANG
	5	JATEN	0,6362	BERKEMBANG		5	KAHUMAN	0,7032	BERKEMBANG
	6	JETIS	0,6613	BERKEMBANG		6	KAPUNGAN	0,6327	BERKEMBANG
	7	JUWIRAN	0,6592	BERKEMBANG		7	KARANGLO	0,7414	MAJU

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
	8	JUWIRING	0,7078	MAJU		8	KEBONHARJO	0,6441	BERKEMBANG
	9	KENAIBAN	0,6443	BERKEMBANG		9	KEPRABON	0,6602	BERKEMBANG
	10	KETITANG	0,6624	BERKEMBANG		10	KRANGGAN	0,6795	BERKEMBANG
	11	KWARASAN	0,6802	BERKEMBANG		11	NGANJAT	0,7076	MAJU
	12	MRISEN	0,7073	MAJU		12	NGARAN	0,6852	BERKEMBANG
	13	PUNDUNGAN	0,7727	MAJU		13	POLAN	0,6849	BERKEMBANG
	14	SAWAHAN	0,7308	MAJU		14	PONGGOK	0,8102	MAJU
	15	SERENAN	0,6033	BERKEMBANG		15	SIDOHARJO	0,6759	BERKEMBANG
	16	TAJI	0,6867	BERKEMBANG		16	SIDOWAYAH	0,6775	BERKEMBANG
	17	TANJUNG	0,6629	BERKEMBANG		17	TURUS	0,6143	BERKEMBANG
	18	TLOGORANDU	0,7092	MAJU		18	WANGEN	0,7725	MAJU
	19	TRASAN	0,6910	BERKEMBANG					
9	Kalikotes				22	Prambanan			
	1	GEMBLEGAN	0,7340	MAJU		1	BRAJAN	0,7013	BERKEMBANG
	2	JIMBUNG	0,7708	MAJU		2	BUGISAN	0,7003	BERKEMBANG
	3	JOGOSETRAN	0,7002	BERKEMBANG		3	CUCUKAN	0,6821	BERKEMBANG
	4	KALIKOTES	0,7821	MAJU		4	GENENG	0,6514	BERKEMBANG
	5	KRAJAN	0,6832	BERKEMBANG		5	JOHO	0,6025	BERKEMBANG
	6	NGEMPLAK	0,7390	MAJU		6	KEBONDALEM KIDUL	0,6984	BERKEMBANG
	7	TAMBONGWETAN	0,7287	MAJU		7	KEBONDALEM LOR	0,6759	BERKEMBANG
						8	KEMUDO	0,8171	MANDIRI
						9	KOKOSAN	0,6924	BERKEMBANG
						10	KOTESAN	0,6870	BERKEMBANG
						11	PERENG	0,6687	BERKEMBANG
						12	RANDUSARI	0,6422	BERKEMBANG
						13	SANGGRAHAN	0,6908	BERKEMBANG
						14	SENGON	0,6876	BERKEMBANG
						15	TAJI	0,6554	BERKEMBANG
						16	TLOGO	0,6998	BERKEMBANG
10	Karanganom				23	Trucuk			
	1	BEKU	0,6767	BERKEMBANG		1	BERO	0,7543	MAJU
	2	BLANCERAN	0,7816	MAJU		2	GADEN	0,8152	MAJU
	3	BRANGKAL	0,7086	MAJU		3	JATIPURO	0,8102	MAJU
	4	GEMPOL	0,6835	BERKEMBANG		4	KALIKEBO	0,6959	BERKEMBANG
	5	GLEDEG	0,7040	BERKEMBANG		5	KARANGPAKEL	0,6832	BERKEMBANG
	6	JAMBEYAN	0,6422	BERKEMBANG		6	KRADENAN	0,8052	MAJU
	7	JEBLOG	0,7322	MAJU		7	MANDONG	0,7206	MAJU
	8	JUNGKARE	0,6590	BERKEMBANG		8	MIRENG	0,6944	BERKEMBANG
	9	JURANGJERO	0,6908	BERKEMBANG		9	PALAR	0,6837	BERKEMBANG
	10	KADIREJO	0,7000	BERKEMBANG		10	PLANGGU	0,6703	BERKEMBANG
	11	KARANGAN	0,6951	BERKEMBANG		11	PULUHAN	0,7187	MAJU

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
	12	KARANGANOM	0,7137	MAJU		12	PUNDUNGSARI	0,6427	BERKEMBANG
	13	KUNDEN	0,7184	MAJU		13	SABRANGLOR	0,6925	BERKEMBANG
	14	NGABEYAN	0,6722	BERKEMBANG		14	SAJEN	0,6727	BERKEMBANG
	15	PADAS	0,6490	BERKEMBANG		15	SUMBER	0,6963	BERKEMBANG
	16	PONDOK	0,6594	BERKEMBANG		16	TRUCUK	0,7978	MAJU
	17	SOROPATEN	0,6557	BERKEMBANG		17	WANGLU	0,7110	MAJU
	18	TARUBASAN	0,6686	BERKEMBANG		18	WONOSARI	0,7054	BERKEMBANG
	19	TROSO	0,7038	BERKEMBANG					
11	Karangdowo				24	Tulung			
	1	BABADAN	0,6922	BERKEMBANG		1	BEJI	0,6629	BERKEMBANG
	2	BAKUNGAN	0,7449	MAJU		2	BONO	0,6392	BERKEMBANG
	3	BULUSAN	0,6387	BERKEMBANG		3	COKRO	0,7800	MAJU
	4	DEMANGAN	0,6329	BERKEMBANG		4	DALANGAN	0,7819	MAJU
	5	KARANGDOWO	0,6587	BERKEMBANG		5	DALEMAN	0,8230	MANDIRI
	6	KARANGJOHO	0,6013	BERKEMBANG		6	GEDONGJETIS	0,6776	BERKEMBANG
	7	KARANGTALUN	0,6890	BERKEMBANG		7	KEMIRI	0,6870	BERKEMBANG
	8	KARANGWUNGU	0,7024	BERKEMBANG		8	KIRINGAN	0,6067	BERKEMBANG
	9	KUPANG	0,6884	BERKEMBANG		9	MAJEGAN	0,7892	MAJU
	10	MUNGGUNG	0,7095	MAJU		10	MALANGAN	0,7575	MAJU
	11	NGOLODONO	0,7040	BERKEMBANG		11	MUNDU	0,6259	BERKEMBANG
	12	PUGERAN	0,7067	BERKEMBANG		12	POMAH	0,6217	BERKEMBANG
	13	RINGINPUTIH	0,6714	BERKEMBANG		13	PUCANGMILIRAN	0,7649	MAJU
	14	SENTONO	0,7095	MAJU		14	SEDAYU	0,6176	BERKEMBANG
	15	SOKA	0,6884	BERKEMBANG		15	SOROGATEN	0,7868	MAJU
	16	TAMBAK	0,6573	BERKEMBANG		16	SUDIMORO	0,6552	BERKEMBANG
	17	TEGALAMPEL	0,6603	BERKEMBANG		17	TULUNG	0,7411	MAJU
	18	TULAS	0,6568	BERKEMBANG		18	WUNUT	0,8373	MANDIRI
	19	TUMPUKAN	0,6789	BERKEMBANG					
12	Karangnongko				25	Wedi			
	1	BANYUAENG	0,7297	MAJU		1	BIRIT	0,7033	BERKEMBANG
	2	BLIMBING	0,6457	BERKEMBANG		2	BRANGKAL	0,6994	BERKEMBANG
	3	DEMAKIJO	0,7275	MAJU		3	CANAN	0,8073	MAJU
	4	GEMAMPIR	0,7481	MAJU		4	DENGKENG	0,6313	BERKEMBANG
	5	GUMUL	0,6556	BERKEMBANG		5	GADUNGAN	0,7211	MAJU
	6	JAGALAN	0,6670	BERKEMBANG		6	JIWOWETAN	0,6641	BERKEMBANG
	7	JETIS	0,7519	MAJU		7	KADIBOLO	0,6981	BERKEMBANG
	8	JIWAN	0,6944	BERKEMBANG		8	KADILANGGON	0,7251	MAJU
	9	KADILAJO	0,7814	MAJU		9	KALIGAYAM	0,6927	BERKEMBANG
	10	KANOMAN	0,7346	MAJU		10	KALITENGAH	0,7144	MAJU
	11	KARANGNONGKO	0,7797	MAJU		11	MELIKAN	0,6362	BERKEMBANG
	12	LOGEDE	0,7219	MAJU		12	PACING	0,6643	BERKEMBANG

No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi	No	Kecamatan/Desa		IDM	Klasifikasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
	13	NGEMPLAK	0,7738	MAJU		13	PANDES	0,7341	MAJU
	14	SOMOKATON	0,6883	BERKEMBANG		14	PASUNG	0,6814	BERKEMBANG
						15	PESU	0,6906	BERKEMBANG
						16	SEMBUNG	0,6944	BERKEMBANG
						17	SUKOREJO	0,6592	BERKEMBANG
						18	TANJUNGAN	0,6330	BERKEMBANG
						19	TROTOK	0,6671	BERKEMBANG
13	Kebonarum				26	Wonosari			
	1	BASIN	0,8695	MANDIRI		1	BENER	0,6495	BERKEMBANG
	2	GONDANG	0,6856	BERKEMBANG		2	BENTANGAN	0,6617	BERKEMBANG
	3	KARANGDUREN	0,6984	BERKEMBANG		3	BOLALI	0,6660	BERKEMBANG
	4	MALANGJIWAN	0,6983	BERKEMBANG		4	BOTO	0,6259	BERKEMBANG
	5	MENDEN	0,7654	MAJU		5	BULAN	0,7576	MAJU
	6	NGRUNDUL	0,6949	BERKEMBANG		6	DUWET	0,6643	BERKEMBANG
	7	PLUNENG	0,7317	MAJU		7	GUNTING	0,6703	BERKEMBANG
						8	JELOBO	0,6778	BERKEMBANG
						9	KINGKANG	0,6721	BERKEMBANG
						10	LUMBUNGKEREP	0,7003	BERKEMBANG
						11	NGREDEN	0,6576	BERKEMBANG
						12	PANDANAN	0,6724	BERKEMBANG
						13	SEKARAN	0,6644	BERKEMBANG
						14	SIDOWARNO	0,6144	BERKEMBANG
						15	SUKOREJO	0,6011	BERKEMBANG
						16	TEGALGONDO	0,7038	BERKEMBANG
						17	TELOYO	0,6552	BERKEMBANG
						18	WADUNGGETAS	0,6606	BERKEMBANG

Sumber: Dispermades, Update Terakhir 17 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.61. sebagaimana tersebut di atas, status desa di Kabupaten Klaten dengan klasifikasi IDM, dapat disimpulkan:

1. Jumlah desa yang berstatus ***Mandiri*** ada 6 desa (atau 1,53% dari total jumlah desa);
2. Jumlah desa yang berstatus ***Maju*** ada 137 desa (atau 35,04% dari total jumlah desa); dan
3. Status desa ***Berkembang*** sebanyak 248 desa (atau 1,53% dari total jumlah desa);

13. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak.

Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak *merupakan salah satu tujuan/goals dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius.*

Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa foodborne disease merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak.Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait: (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Ukuran keberhasilan meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak diukur dengan indikator: 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan 2) Skor Kabupaten Layak Anak. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak*** disajikan pada Tabel 3.62.

Tabel 3.62.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	69,42	60,25	72,35	73,34	71,88*)	98,01	74,66	96,28
2	Skor Kabupaten Layak Anak**	Madya 650	Madya (650)	Madya (650)	725	629,80**)	86,87	785	80,13

*Sumber: *) BPS Jateng, Up date per 23 November 2022.*

***) DISSOSP3APPKB, nilai April 2022*

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

   Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari

pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.13.

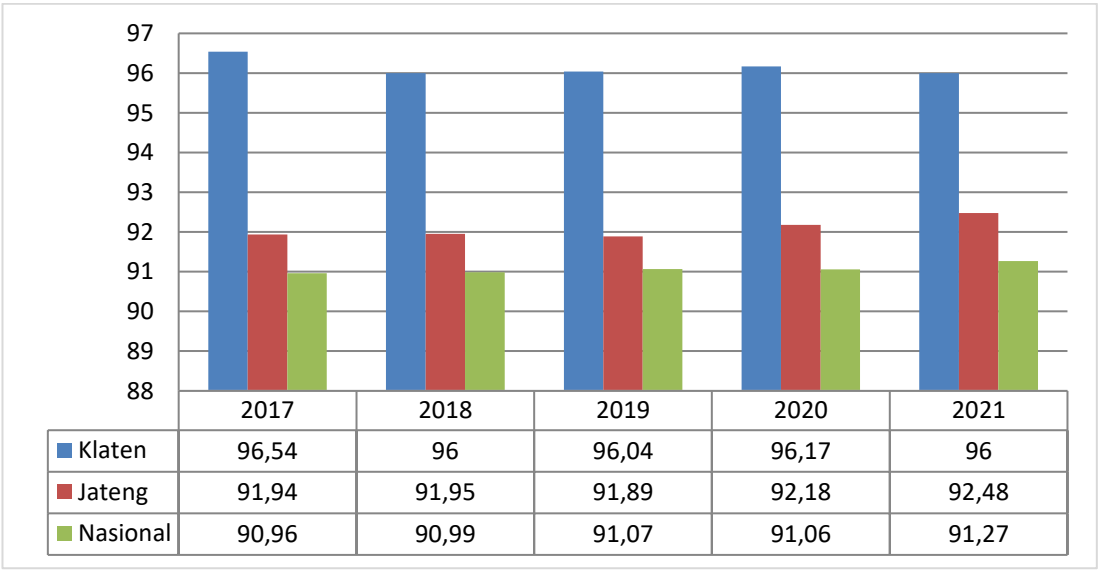

	2017	2018	2019	2020	2021
Klaten	96,54	96	96,04	96,17	96
Jateng	91,94	91,95	91,89	92,18	92,48
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Grafik 3.13. Perkembangan IPG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber: BPS, 04 Maret 2022.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Dan berdasarkan Grafik 3.13. menunjukkan bahwa capaian IPG Klaten jauh lebih baik dibanding tingkat Provinsi maupun nasional, artinya kondisi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin sebanding.

Adapun perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama Tahun 2017-2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Ada perkembangan angka harapan Hidup (AHH) Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 3.14.

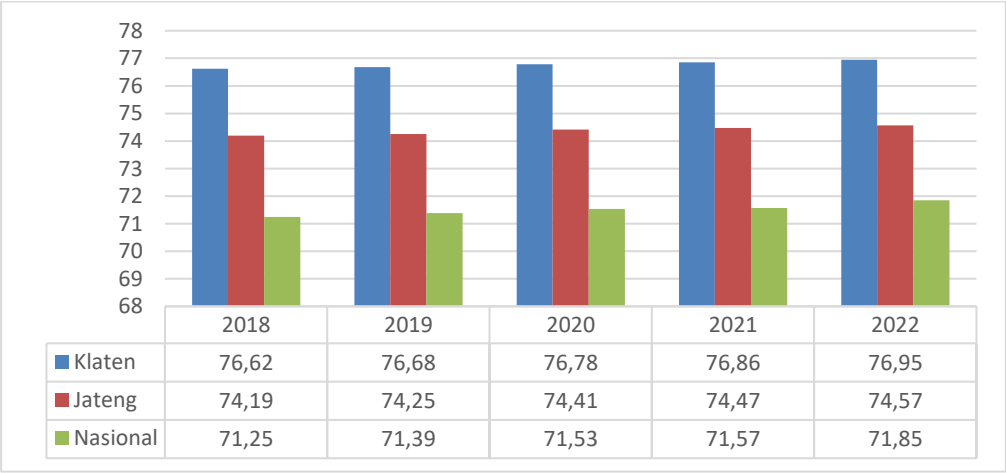

	2018	2019	2020	2021	2022
Klaten	76,62	76,68	76,78	76,86	76,95
Jateng	74,19	74,25	74,41	74,47	74,57
Nasional	71,25	71,39	71,53	71,57	71,85

Grafik 3.14. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber : BPS. Update Terakhir 18 November 2022.

Berdasarkan Grafik 3.14. di atas tampak bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Klaten naik secara konsisten setiap tahunnya. AHH tahun 2020 naik sebesar 0,1 poin dari tahun 2019, tahun 2021 naik sebesar 0,08 poin dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 naik 0,09 poin dari tahun 2021. Sedangkan Angka Harapan Hidup Menurut Kelompok Umur di Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin

Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	74,81	74,87	74,88	75,01	75,10	78,53	78,58	78,60	78,69	78,80
Jateng	72,16	72,28	72,33	72,51	72,61	76,02	76,10	76,16	76,30	76,42
Nasional	69,16	69,30	69,44	69,59	69,67	73,06	73,19	73,33	73,46	73,55

Sumber: BPS, Update Terakhir 04 Maret 2022.

Berdasarkan Tabel 3.63. di atas, Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin selama tahun 2017-2021 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, dan kondisi AHH perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki untuk semua jenjang pemerintahan dalam pencapaian kinerjanya.

Dari sisi ekonomi, pada umumnya laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di sektor ekonomi bagi rumah tangganya dibandingkan perempuan. Namun demikian, perempuan yang terlibat di sektor ekonomi menunjukkan trend yang terus meningkat. Keterlibatan perempuan dalam bekerja ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan untuk bekerja atau karena adanya motivasi lain. Adapun

Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.64.

Tabel 3.64.

Sumbangan Pendapatan Perempuan

Tahun 2017-2021

Kab/Provinsi/Nasional	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klaten	37,76	37,77	37,81	37,72	37,78
Jateng	34,13	34,28	34,31	34,29	34,60
Nasional	36,62	36,70	37,10	37,26	37,22

Sumber: BPS, April 2022

Sumbangan Pendapatan Perempuan selama Tahun 2017-2021 kondisi Klaten secara rata-rata jauh lebih tinggi dibanding Jawa Tengah maupun Nasional hal ini mengindikasikan bahwa angka partisipasi kerja perempuan juga sudah tinggi.

b. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pembangunan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender disajikan pada Tabel 3.65.

Tabel 3.65.

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator	Indeks
(1)	(2)	(3)
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan	IDG Atau GEM
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan yang duduk dalam parlemen, perempuan Pengambilan Keputusan dan perempuan ikut mendistribusi pendapatan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Adapun perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.15.

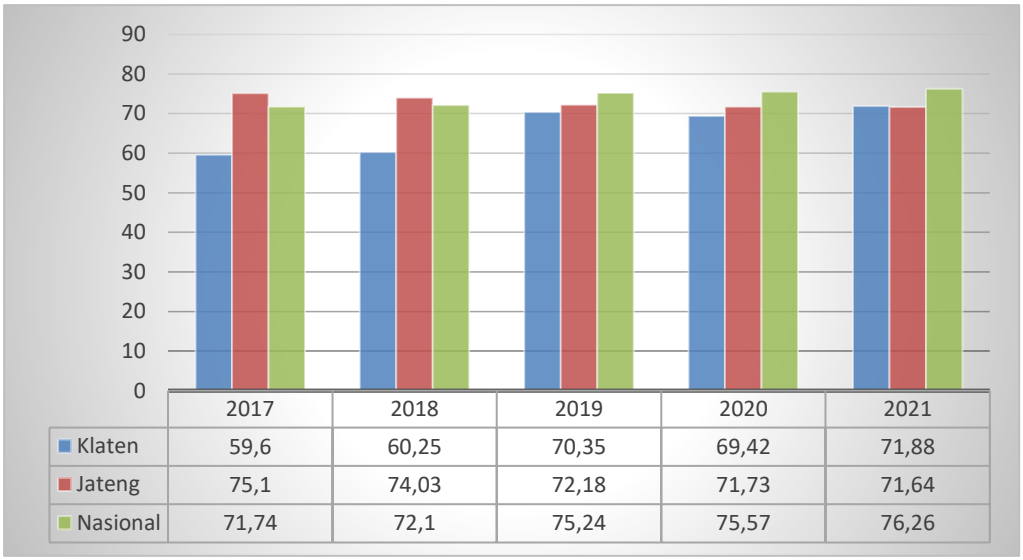

Grafik 3.15. Perkembangan IDG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Adapun perkembagan berbanding Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama Tahun 2017-2021, disajikan pada Tabel 3.66.

Tabel 3.66.

Komponen Pembentuk IDG Menurut Jenis Kelamin

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Komponen Pembentuk IPG	Klaten	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Keterwakilan perempuan dalam parlemen (Persen)	18	18,33	21,89
Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer (Persen)	58,46	50,67	49,99
Sumbangan pendapatan	37,78	34,60	37,22
IDG	71,88	71,64	76,26

Sumber: BPS, April 2022

Berdasarkan Tabel 3.66. capaian IDG Kabupaten Klaten sudah di atas rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional, hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan

pembangunan sudah tinggi, kecuali keterwakilan perempuan dalam Parlemen Klaten angkanya jauh lebih rendah dibanding Provinsi maupun nasional.

c. **Perlindungan Anak**

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 3.67.

Tabel 3.67.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2018-2022

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51
2019	6	7	9	3	5	15	4	8	0	0	57
2020	4	11	1	8	0	13	0	3	0	0	40
2021	10	4	4	6	2	16	0	0	0	0	42
2022	0	9	0	9	0	25	0	9	0	1	53

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per 12 Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 3.67. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir (tahun 2021-2022) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 11 kasus dari tahun 2021 sebesar 42 kasus menjasi 53 kasus di tahun 2022, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b. Program Perlindungan Perempuan
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
f. Program Perlindungan Khusus Anak

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1) Menurunnya capaian IPG yaitu tahun 2020 sebesar 96,17 menjadi 96,00 di tahun 2021;
2) Persentase perempuan di parlemen, berhasil ditingkatkan dari 6% menjadi 18%, namun belum memenuhi kuota 30% perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 sebanyak 42 kasus, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebanyak 53 kasus (semua korbannya perempuan).

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

1) Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diperkirakan mengalami perbaikan seiring adanya program stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemulihan Ekonomi pada tahun 2022, dapat dilihat dari beberapa sektor usaha dalam bidang konstruksi,

perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang sudah mulai bangkit dalam usahanya sehingga menyerap banyak pekerja;

2) Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
3) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
4) Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
5) Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
6) Peningkatan pendampingan ibu terhadap stunting anak.

14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menandaskan bahwa, perlunya melaksanakan *pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan*.

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran yang ditetapkan menjadi alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan.

Agar kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya perlu menjaga sumber daya alam secara optimal. Sehingga dampak lingkungan hidup atau pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan perlu diminimalisir. Salah satu upayanya adalah menjaga agar Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan dalam kondisi baik.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan diukur dengan indikator:1) Indeks Kualitas Air, 2) Indeks Kualitas Udara, dan 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*** disajikan pada Tabel 3.68.

Tabel 3.68.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kualitas Air	55,9	28,46	36,16	36,63	47,69	130,19	37,59	126,87
2	Indeks Kualitas Udara	84,95	82,29	76,82	77,80	87,85	112,92	79,76	110,14
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,54	83,3	42,54	42,90	42,55	99,19	43,62	97,56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Update Terakhir 20 Pebruari 2023.

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2022 sebesar 47,69, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 87,85, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan sebesar 42,55. Uji sampling udara menggunakan metode pasive sampler dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang. Maka, tahun 2022 dilakukan 2 kali pengambilan sampling yaitu pada musim kemarau dan musim hujan pada 11 titik sample dari 6 sungai dan 1 Rowo Jombor yang ada di Kabupaten Klaten dari target 13 titik. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut : Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Berdasarkan capaian IKA, IKU, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan selama tahun 2018-2022 capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disajikan pada Grafik 3.16.

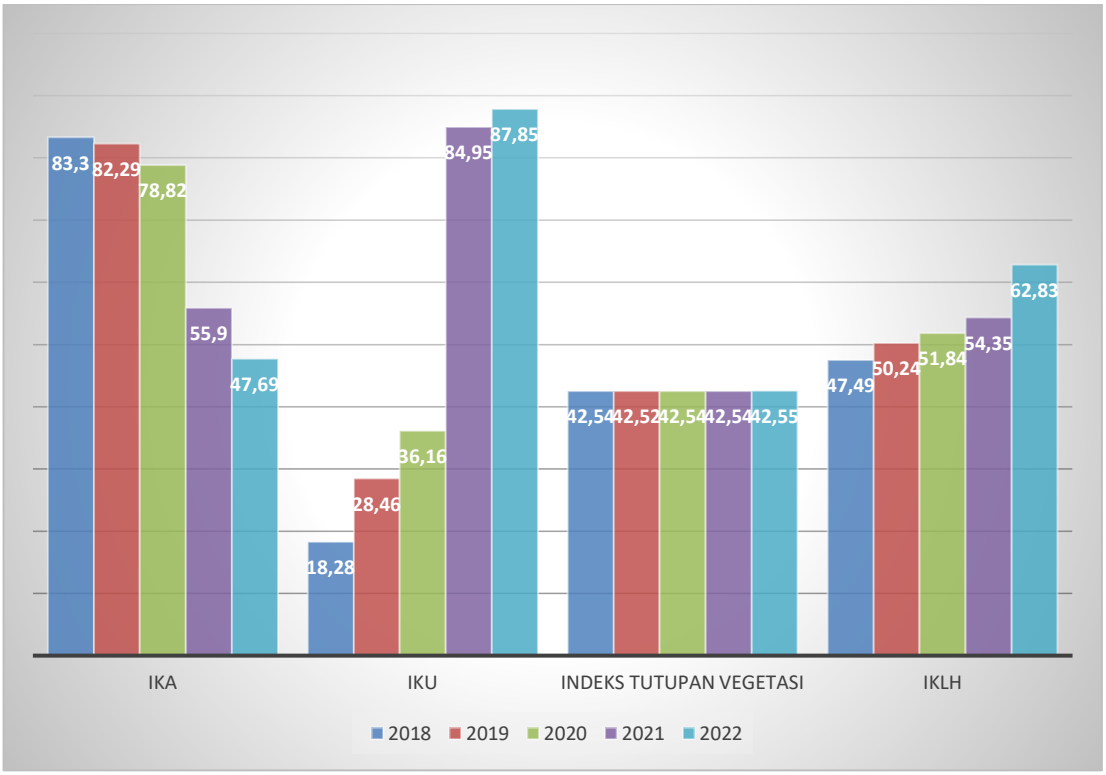

Grafik 3.16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2022
Sumber: DINAS LH, Update per 30 Januari 2023.

Berdasarkan Grafik 3.16. sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air pada tahun 2022 sebesar 47,69 dan dibanding tahun 2021 sebesar 55,9 atau mengalami penurunan sebesar 8,21 poin dan indeks udara pada tahun 2022 sebesar 87,85 dan dibanding tahun 2021 sebesar 84,95 atau mengalami kenaikan sebesar 2,9 poin. Sedangkan Indeks tutupan lahan/vegetasi Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar 42,55 dan dibanding tahun 2021 sebesar 42,54 atau mengalami kenaikan sebesar 0,01. IKLH tahun 2022 sebesar 62,83 telah memenuhi target sebesar 54,68 dan dibandingkan tahun 2021 sebesar 54,35 mengalami kenaikan sebesar 8,48 poin.

Pada tahun 2022 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 9 dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup*** dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan:

Belum optimalnya capaian Indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2022 karena disebabkan pada waktu pengisian data di website IKLH Kementerian terdapat indikator yang tidak tersedia datanya serta kurangnya penambahan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki lingkungan hidup antara lain:

1) Mengumpulkan data yang belum tersedia dari berbagai OPD baik tingkat Provinsi, Kementrian dan lainnya.
2) Serta menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

15. Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, *bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.*

Sehingga pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien**.** Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus berbasis hak agar penanganan sampah dapat tuntas, yakni :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) diukur dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)*** disajikan pada Tabel 3.69.

Tabel 3.69.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,95	N/a	56,95	59,95	56,08	93,54	66,95	83,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana tugas dan fungsi persampahan yang semula di DPUPR dipindah Ke Dinas Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2022 realisasi IKPS sebesar 56,08 atau sebesar 93,54% dari target 59,95. Bila dibanding dengan kondisi awal RPJMD 2021-2026 dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan yang mana IKPS sebesar 58,95 atau sebesar 1 poin. Hal ini dikarenakan terbatasnya armada dan ritasi pengangkutan sampah.

Capaian kinerja **Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)** ini didukung dengan Program :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3); dan
2. Program Pengelolaan Persampahan.

Permasalahan:

1) Belum optimalnya penanganan sampah yang ditangani di TPA, capaian tahun 2022 sebesar 30,68% (atau 35.366,31 kg/hari), dan pengurangan sampah sebesar 24,99% (atau 58.649,87 kg/hari).
2) Terbatasnya sarana dan prasarana angkutan sampah, saat ini baru memiliki 21 dump truck, 4 truck armroll dan 14 mobil pick-up yang harus menjangkau sasaran 26 kecamatan.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki lingkungan hidup antara lain:

1) Peningkatan kesadaran masyarakat dan layanan sosial dalam pengendalian air limbah domestik;
2) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait sehingga dapat berkerjasama mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai;
3) Peningkatan penataan lingkungan dan penghijauan lahan serta pengawasan pemanfaatan lahan sesuai ketentuan tata ruang; dan

4) Meningkatkan pengelolaan sampah baik pengurangan (yang melibatkan peran serta seluruh lapisan masyaraat) maupun penanganan sampah di TPA.

16. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana, menandaskan bahwa memiliki kondisi Daerah secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.*

Serta memperhatikan potensi terjadinya bencana, baik: yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Oleh karena itu, mengingat Kabupaten Klaten termasuk daerah yang rawan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sehingga setiap warga wajib: 1) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan

hidup. 2) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan 3) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*** disajikan pada Tabel 3.70.

Tabel 3.70.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92	N/A	0,92	0,92	0,94	102,17	0,92	102,17

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana.Berdasarkan atas penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang direkomendasi oleh BPBD Jawa Tengah, pada tahun 2022 IKD Klaten diperoleh hasil sebagai mana Tabel 3.71.

Tabel 3.71.

Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Parameter IKD	Capaian
(1)	(2)	(3)
1	Perkuatan kebijakan kelembagaan	1
2	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	1
3	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0,99
4	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	1
5	Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	1
6	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,85
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,94
	Skor IKD	0,94

Sumber: BPBD Jateng, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Penilaian IKD selanjutnya akan digabungkan dengan dokumen kapasitas masyarakat untuk menghasilkan peta kapasitas. Bersama dengan tiga dokumen lainnya, yaitu peta kerentanan, peta bahaya dan rencana penanggulangan bencana, kemudian pemerintah daerah dapat menyusun peta risiko bencana.

Mengingat kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi yang ada, seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam yang sangat komplek, diantaranya:

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam, dan beberapa kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut:

a. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi:

1) Kecamatan Bayat;
2) Kecamatan Cawas;
3) Kecamatan Gantiwarno;
4) Kecamatan Kemalang;
5) Kecamatan Manisrenggo;
6) Kecamatan Prambanan; dan
7) Kecamatan Wedi.

Adapun peta kawasan rawan bencana tanah longsor Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 3.2.

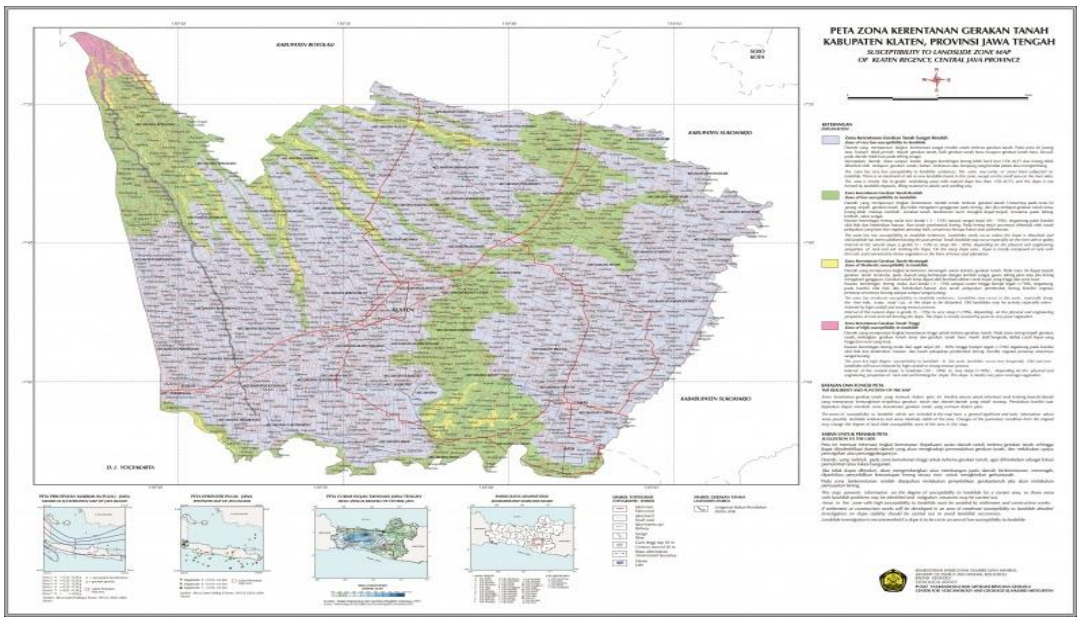

Gambar 3.2. Peta Rawan Gerakan Tanah

b. Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi:

1) Kecamatan Bayat;
2) Kecamatan Cawas;
3) Kecamatan Ceper;
4) Kecamatan Gantiwarno;
5) Kecamatan Juwiring;
6) Kecamatan Karangdowo;
7) Kecamatan Pedan;
8) Kecamatan Prambanan;

9) Kecamatan Trucuk;

10) Kecamatan Wedi; dan

11) Kecamatan Wonosari.

Adapun Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 3.3

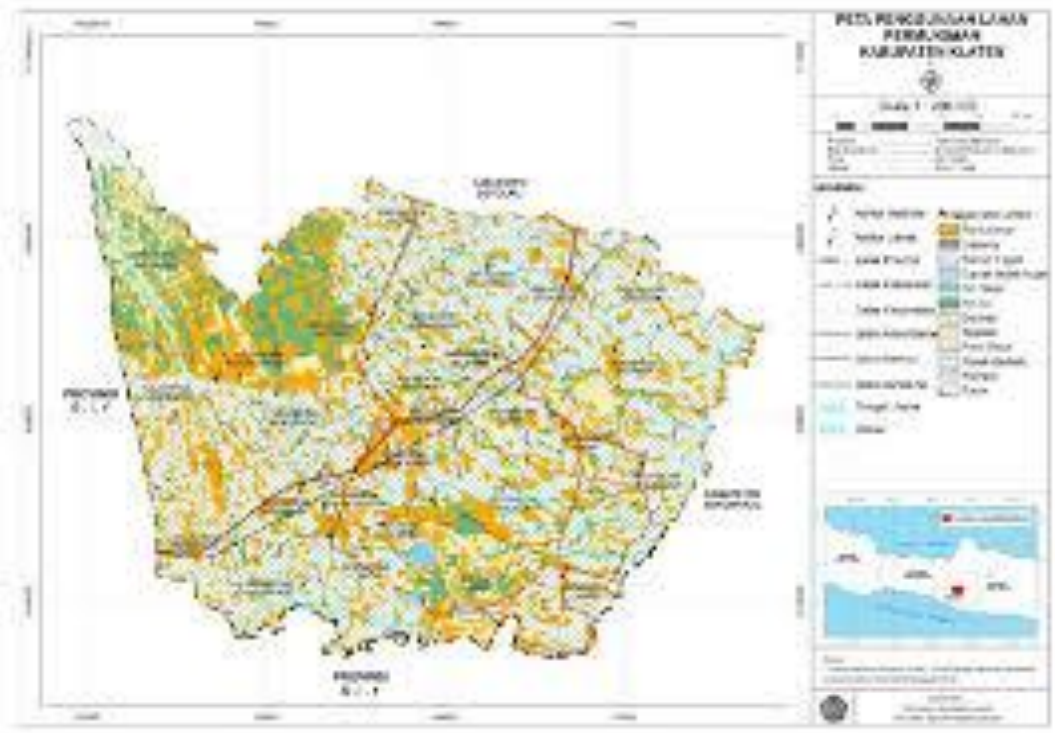

Gambar 3.3. Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten

c. Kawasan rawan bencana angin topan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Potensi ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat dalam bidang: perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana.

d. Kawasan rawan bencana angin topan dan gempa bumi yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Potensi ancaman bencana akan semakin meluas seiring meningkatnya kerentanan masyarakat dibidang perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang. Kejadian bencana di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2018 - 2022 mengalami fluktuatif. Perkembangan kejadian bencana di Kabupaten Klaten tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.72.

Tabel 3.72.

Perkembangan Kejadian Bencana Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Banjir	3	7	10	6	88
2	Tanah Longsor	8	5	8	15	62
3	Puting Beliung	54	100	116	82	217
4	Kekeringan	-	51	-	195	168
5	Letusan gunung Merapi	-	-	1	-	2
	Jumlah	65	163	135	298	537

Sumber: BPBD, Update Terakhir 12 Januari 2023.

Guna meminimalisir kejadian bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan mitigasi bencana baik secara struktural maupun non struktural, mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Upaya mitigasi yang telah dilakukan antara lain dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan siaga bencana, pembangunan taman kebencanaan, pelatihan tanggap bencana, pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana, penyelenggaraan sekolah sungai, pembentukan desa tangguh rencana, pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Capaian kinerja **Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana** ini didukung dengan Program Penanggulangan Bencana.

Permasalahan:

1) Luasnya cakupan pelayanan bencana yang harus ditangani, sementara kejadiannya tidak bisa diperediksi;
2) Belum semua desa rawan bencana, memiliki kesiapan menjadi desa tangguh bencana, dan sampai dengan tahun 2021 baru 12 desa tangguh bencana, dan pada tahun 2022 menjadi 17 desa.

Solusi:

Mengingat luasan cakupan bencana di Kabupaten Klaten perlunya antisipasi kejadian bencana, dan perlindungan perempuan, anak dan kaum rentan dari bencana sehingga Klaten menjadi Kabupaten tangguh menghadapi bencana. Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten menyiapkan 2 aplikasi :

1) sivabel (sistem evakuasi bencana ramah divabel) dan
2) Sipena (sistem pelaporan bencana dari masyarakat).

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.2.550.512.308.850,- (*dua trilyun lima ratus lima puluh milyar lima ratus dua belas juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)*, dan terealisasi sebesar Rp. 2.587.693.432.935,- *(dua trilyun lima ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tiga*

juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.329.129.377.686,- (*Tiga ratus dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*), dan teralisasi sebesar Rp. 358.048.103.989,-. (*tiga ratus lima puluh delapan milyar empat puluh delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), atau melampaui target sebanyak Rp. 28.918.726.303,- (*Dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah*).

1.2. Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.2.208.342.931.164,- (*dua trilyun dua ratus delapan milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp. 2.214.576.328.946,- (*dua trilyun dua ratus empat belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)* atau melampaui target sebanyak Rp. 6.233.397.782,- (*enam milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).*

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.13.040.000.000,- *(tiga belas milyar empat puluh juta rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.15.069.000.000,- (*lima belas milyar enam puluh sembilan*

juta rupiah) atau melampaui target sebanyak Rp.2.029.000.000,- *(dua milyar dua puluh sembilan juta rupiah).*

2. Belanja Daerah

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.3.020.031.884.691,28 *(tiga trilyun dua puluh milyar tigapuluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma dua delapan rupiah*), dan terserap sebanyak Rp. 2.527.619.332.474,28 *(dua trilyun lima ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus Sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat koma dua puluh delapan rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.044.963.721.077,28 *(dua trilyun empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan rupiah),* dan terealisasi sebanyak Rp. 1.619.377.441.227,28 (*satu trilyun enam ratus sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat pulu satu ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh delapan rupiah).* Atau terserap 79,19%

2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 292.081.947.049,- (*dua ratus sembilan puluh dua milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp. 246.670.020.742,- (*dua ratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*). Atau terserap 84,45%

2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 25.945.719.619,- (*dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah*) dan terealisasi sebanyak Rp 7.794.077.100,- (*tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah*) atau terserap 30,04%

2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 657.040.496.946,- (*enam ratus lima puluh tujuh milyar empat puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*) dan terealisasi sebanyak Rp 653.777.793.405,- (*enam ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah*) atau terserap 99,50%.

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran daerah langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 493.720.575.841,28 *(empat ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu koma dua puluh delapan rupiah).*
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2022 sebanyak Rp. 24.201.000.000,- (*dua puluh empat milyar dua ratus satu juta rupiah*).

**) Catatan: input data per: tanggal 1 Maret 2023.*

Tabel 3.73.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	100	**100**	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-	82.121.000	76.723.900	93,00
								Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh wawasan kebangsaan (%)	1	1,04	104	-	-	-
								Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan (%)	15	11,67	77,78	-	-	-
							Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	-	-	-	-	1.186.849.500	1.184.569.050	99,8

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Etika Serta Budaya Politik							
								Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu (%)	65	100	154	-	-	-
								Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik (%)	2	2	100	-	-	-
							Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan (%)	100	81,63	81,63	684.832.500	684.632.500	99,8
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	95,89	95,89	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	2.975.738.640	2.893.451.992	97,23
								Persentase gangguan Trantibum yang	92	92	100			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								dapat diselesaikan (%)						
								Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	95,80	95,80			
								Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (%)	42	42	100			
								Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada (%)	100	100	100			
							Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama tk. Desa terbentuk (%)	34	100	294,12	53.007.160	50.984.100	96,20
								Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar (%)	6	5,83	97,17	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial (%)	85	100	117,6	949.242.500	894.541.200	94,24
								Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan (%)	100	100	100	-	-	
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71	75,91	**106,92**	Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	-	-	925.210.000	518.684.830	56,06
								Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 (%)	100	114,25	114,25	-	-	-
								Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 (%)	100	114,25	114,25	-	-	-
								Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 (%)	100	114,25	114,25	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4 (%)	100	114,25	114,25	-	-	-
								Persentase pelaksanaan pengawasan khusus (%)	100	90,19	90,19	-	-	-
		Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62	65,14	105,06	Program Administrasi Umum (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	-	-	-	-	475.825.000	410.709.717	86,32
								Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun (%)	100	100	100			
								Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi (%)	100	100	100			
								Persentase kepatuhan OPD	100	100	100			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik (%)						
								Pesentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik (%)	100	100	100	2.383.475.000	2.286.700.148	95,94
								Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik (%)	100	100	100	43.269.438.935	36.058.189.977	83,33
								Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP (%)	100	100	100			
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	-	-	1.608.845.000	1.263.939.372	78,56

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembangunan Daerah							
								Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100			
								Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD (%)	77	88,04	114,34			
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	686.743.908.565	660.342.732.418	96,16
								Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir) (%)	100	100	100	-	-	-
								Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati) (%)	100	100	100	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84,00	78,81	93,8	-	-	-
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2	N/A	N/A	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-	-	-	-	5.636.314.203	5.233.027.027	92,84
								Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo (%)	58,82	58,82	100	-	-	-
								Persentase penambahan akses internet di ruang publik (%)	67,50	67,50	100	-	-	-
								Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	62,96	62,96	100	-	-	-
		Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks	202	258	127,72	Program Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	2.614.344.000	2.001.700.677	76,57

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi (%)	80	213	266,25	-	-	-
								Persentase Kinerja ASN bernilai baik (%)	90	94,14	104,60	-	-	-
								Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan (%)	90	100	111,11	-	-	-
								Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah (%)	75	247	329,33	-	-	-
							Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	80	42,78	53,48	4.622.960.000	4.602.861.749	99,57
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	83,46	**101,78**	Program Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	635.889.000	619.248.019	97,38
								Persentase perekaman KTP elektronik (%)	99.02	99,14	100,13	-	-	-
								Cakupan kepemilkan KK (%)	97.90	94,28	96,31	-	-	-
								Persentase anak usia 0-17 tahun	50	63,87	127,73	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)						
							Program Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	-	344.370.000	306.354.432	88,96
								Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	49.962	50.745	101,57	-	-	-
								Persentase perpustakaan (desa/sekolah) yang dibina (%)	21	25,32	120,57	-	-	-
							Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	-	-	-	68.161.000	64.398.000	94,48
								Arsip usul musnah (meter lari)	60,00	2,00	3,33	-	-	-
								Persentase arsip yang dialihmediakan (%)	20,00	60,40	302,00	-	-	-
							Program Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan	100	97,42	97,42	1.367.505.393.590	1.055.755.654.535	77,20

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)						
							Program Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) (%)	100	97.79	97,79	139.717.760	121.834.750	87,20
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif (%)	95	93,81	98,75	1.863.041.486	1.756.244.365	94,27
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan (%)	98	86,76	88,53	3.271.298.573	3.131.531.380	95,73
							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani (%)	98	96,45	98,42	1.681.573.875	1.522.102.838	90,52
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan	92	90.84	98,74	1.441.908.567	1.341.399.100	93,03

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								pelaporan tepat waktu (%)						
								Persentase desa tertib administrasi (%)	95	92,91	97,80	-	-	-
							Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	1.030.000.000	754.652.579	73,27
								Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. (%)	54,80	55,00	100,36			
								Pertumbuhan inovasi perangkat daerah (%)	14,68	78,42	534,20			
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	-	-	-	20.604.597.000	16.730.407.282	81,19
								Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi	75	75	75			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Pembentukan Perda (%)						
								Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran (%)	100	100	100			
								Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan (%)	100	100	100			
4	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	1,47	3,91	265,99	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina (%)	17,31	11,29	65,22	4.872.572.600	4.268.493.840	87,60
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	1,24	4,03	325	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	3.167.814.600	2.722.198.195	85,93

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi (%)	42,00	42,00	100,00			
								Persentase PKL yang terbina (%)	43,80	6	24,35			
								Jumlah pendapatan retribusi pasar (Rp.)	4.650.000.000	7.156.689.298	153,91			
							Program Pengembangan Ekspor	Jumlah komoditas yang mampu ekspor (Jenis)	2	2	100,00	275.000.000	157.709.000	57,35
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63	1,61	98,77	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	-	5.316.638.428	4.096.071.299	95,75
								Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kw/Ha)	66.99	71,42	106,61			
								Produktivitas cabe (Kw/Ha)	8.98	9,59	106,79			
								Produktivitas tembakau rajang (Kw/Ha)	12,2	12,00	98,36			
								Produktivitas tembakau asepan (Kw/Ha)	9,83	10,00	101,73			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	543	372,86	68,67	25.000.000	23.375.000	93,50
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	29.165	30.300,49	103,89	560.000.000	536.463.630	91,76
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,13	64,14	2049,20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola (%)	73,00	73,00	100	7.247.638.140	6.680.299.928	92,17
							Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat intensitas promosi pariwisata (%)	68,00	68,49	100,72	165.849.000	160.311.804	96,66
5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50	158	316,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi (%)	80,00	80	100,00	253.006.000	223.957.150	90,67
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	1	139	13900,00	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan (%)	80	80	100,00	428.430.250	391.667.390	91,42

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal (%)	80,00	80,00	100,00	201.937.700	164.745.920	81,58
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (%)	80,00	80,00	100,00	270.627.500	237.557.475	87,78
6	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06	91,11	100,05	Program Penyelenggaraan Jalan	-	-	-	-	140.386.870.000	117.229.798.201	83,50
								Persentase jalan kondisi baik (%)	67,72	26,03	38,44			
								Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	64,22	56,55	88,06			
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47	61,99	100,85	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik (%)	61,47	61,99	100,85	1.251.369.000	1.181.626.000	94,43

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5	44,91	108,22	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	0,31	0,358	115,48	8.023.214.000	6.819.229.498	84,99
7	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32	97,68	99,35	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	0,05	0,059	100	1.538.036.000	1.331.166.200	86,55
							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%)	95.23	95,73	100,50	7.230.000.000	7.159.451.900	99,02
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak (%)	94,02	93,19	99,12	3.948.212.000	3.548.075.996	89,87
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	1,27	1,32	103,94	4.049.942.000	3.710.384.142	91,62

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,4	95,03	107,50	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	-	1.234.043.000	800.082.796	64,83
								Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun (%)	70.50	70	99,29			
								Persentase pelayanan ketataruangan (%)	100	100	100			
								Persentase pengendalian pemanfaatan ruang (%)	100	100	100			
							Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penataan gunaan tanah yang tersusun (%)	100	100	100	802.232.000	754.714.800	94,10
9	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas *(Level Of Service)*	Nilai	0,62	0,62	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kecelakaan lalu lintas (%)	0,80	0,44	145	5.790.583.000	5.324.994.930	91,96

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52	13,40	**99,11**	Program Pengelolaan Pendidikan	-	-	-	-	40.391.529.000	37.418.257.850	92,64
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85	9,09	102,71		APM SD/MI/Paket A (%)	88,7	84,15	94,87			
								APM SMP/MTs/Paket B (%)	71,35	68,12	95,47			
								APK PAUD (%)	80,9	83,38	103,07			
								Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	99,65	99,61	99,96			
								Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV (%)	88,1	90,11	102,28			
								Persentase SD berakreditasi minimal B (%)	97,9	97,58	99,67			
								Persentase SMP berakreditasi minimal B (%)	86,5	86,44	99,93			
								Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B (%)	36,75	53,32	145,09			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								APK SD/MI/Paket A (%)	96,45	91,5	94,87			
								APK SMP/MTs /Paket B (%)	98	93,55	95,46			
								APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun (%)	1,5	10,7	713,33			
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	**%**	**5**	5	100	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan (%)	20	20	100	1.649.999.632	1.639.881.304	99,39
							Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan (%)	14	14	100	423.000.000	417.669.808	98,74
							Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan (%)	0	0	0	0	0	0
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,84	76,95	100,14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	75.683.577.266	68.133.791.106	90,02
								Persentase Ibu Hamil yang	100	100	100			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil (%)						
								Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	99,99	99,99			
								Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100			
								Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	95,16	95,16			
								Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	94,03	94,03			
								Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100			
								Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100			
								Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100			
								Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100			
								Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100			
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)	11,30	11,70	96,46			
								Cakupan STBM (%)	70	100	142,86			
								Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100	100			
								Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100			
								Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	12,00	27,1	225,83			
								Penderita diare yang ditangani (%)	6,00	35,7	595			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Angka Kejadian HIV (/1000 penduduk)	0,19	0,12	136,84			
								Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	35,00	136	390			
								Angka kejadian Malaria (/100.000 penduduk)	‹1	0,55	145			
								Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) (%)	10,00	91,18	911,8			
								Angka Kejadian DBD (/100.000 penduduk)	20,00	42,3	-11,5			
								Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC *(Universal Health Coverage) %*	95,00	95,40	100,42			
								Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya (%)	100	97,00	97,00			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya (%)	100	100	100			
								Persentase Puskesmas terpenuhi obat dan vaksin (%)	100	81,75	81,75			
								Persentase pelayanan lab klinis dan lab air (%)	100	98,62	98,62			
								Persentase Sistem Informasi Kesehatan (%)	100	100	100			
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-	-	-	-	8.814.218.000	5.942.532.508	67,52
								Angka pemakaian kontrasepsi/CPR (%)	71,50	65,14	91,10			
								Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi *(unmetneed)*	15,95	17,87	87,96			
							Program Pemberdayaan dan Peningkatan	-	-	-	-	5.840.105.000	3.219.197.286	55,12

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Keluarga Sejahtera (KS)							
								Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB (%)	82	69,69	84,26			
								Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB (%)	75,42	46,72	61,95			
								Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB (%)	64,88	22,74	35,05			
								Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB (%)	63,29	41,60	65,73			
								Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0,00	N/A	N/A			
12	Meningkatnya kesejaheraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5	87,39	129,46	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas (%)	97	96,01	98,98	1.647.298.000	1.461.464.202	88,72
							Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi	65,50	87,18	133,09	2.438.992.000	2.268.279.816	93,00

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								sosial diluar panti (%)						
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16	4,31	116.50	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	3,75	0,72	19,20	1.169.445.000	1.121.094.938.	95,87
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	21	35,30	168,10	4.269.336.000	2.731.883.145	63,99
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7034	0,7034	100	Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	4.120.059,200	3.890.428.764	94,43
								Persentase BUMDes berkembang dan Maju (%)	12,79	12,28	96,01			
								Persentasei desa yang telah menerapkan aplikasi	100	100	100			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan (%)						
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,34	71,88	98,01	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	0,4	0,76	190	165.341.440	156.753.608	94,81
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725	629,80	86,87	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa/kelurahan layak anak (%)	70,10	100	142,65	335.998.560	331.800.686	98,75
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indek	36,63	47,69	130,19	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					493.100.000	411.820.222	84,52
		Indeks kualitas udara	Indeks	77,80	87,85	112,92		Cakupan pemantauan kualitas air (%)	100	100	100			
		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	42,90	42.55	99,19		Cakupan pemantauan kualitas udara (%)	100	100	100			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Presentase kampung iklim yang terbentuk (%)	30	30	100			
15	Meningkatnya penanganan dan pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95	56,08	93,54	Program Pengelolaan Sampah	-	-	-	-	17.199.438.000	14.913.084.739	86,71
								Persentase timbulan sampah yang terkurangi (%)	26	22,57	86,81			
								Persentase timbulan sampah yang tertangani (%)	74,09	66,63	89,93			
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,94	102,17	Program Penanggulangan Bencana					2.467.858.500	2.213.509.560	89,69
								Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	100	100	100			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								evakuasi korban bencana (%)						
								Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	72,78	72,78	100			
								Persentase kelompok relawan bencana yang aktif (%)	50	50	100			
								Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi (%)	61	61	100			
Jumlah Anggaran Prioritas I (*program untuk membiayai visi dan misi Bupati*)									4.650.089.326	7.156.781.038	153,91	2.512.830.434.529	2.113.280.005.635	84,10
Jumlah Belanja Operasi												2.023.083.564.694,00	1.646.805.464.313,00	81,40
Jumlah Belanja Modal												996.948.319.997,28	729.366.815.024,28	73,16
Jumlah Belanja Transfer												2.208.342.931.164	2.116.246.233.725	95,83
Jumlah Total Belanja Daerah									-	-	-	3.020.031.884.691,28	2.376.172.279.337,28	78,68

3.4 Efektifitas Sumber Daya

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2022, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan 2) efektifitas penggunaan sumber daya aparatur. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ditetapkan 16 (empat belas) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2022, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Danbelanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 137 program (berdasarkan jumlah program yang ada OPD) dengan 274 kegiatan dan subkegiatan 782 Realisasi fisik tercapai 78,81% dari target rencana 93,8%. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.3.020.031.884.691,28 dan terserap sebesar Rp. 2.524.601.172.404,28 (atau 83,70%). Secara rinci tingkat pencapaian efektifitas sumber daya antara sasaran dan realisasi keuangan dapat disajikan pada Tabel 3.74.

Tabel 3.74.

Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-		-	76.723.900	93,00	Efisien
						Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh wawasan kebangsaan	%	104	-	-	
						Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	77,78	-	-	
					Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-		-	1.184.569.050	99,8	Efisien
						Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ	%	154	-	-	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						bantuan keuangan parpol yang tepat waktu					
						Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	100	-	-	
					Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	81,63	684.632.500	99,8	Efisien
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95,89	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	2.893.451.992	97,23	Tidak efisien
						Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100			
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95,80			
						Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	%	100			
						Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	%	100			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama tk. Desa terbentuk	%	294,12	50.984.100	96,20	Efisien
						Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	%	97,17	-	-	
					Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	117,6	894.541.200	94,24	Efisien
						Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	%	100	-		
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	**106,92**	Program Penyelenggaraan Pengawasan	-		-	518.684.830	56,06	Efisien
						Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	%	114,25	-	-	
						Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	%	114,25	-	-	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	%	114,25	-	-	
						Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	%	114,25	-	-	
						Persentase pelaksanaan pengawasan khusus	%	90,19	-	-	
		Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	105,06	Program Administrasi Umum (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	-		-	410.709.717	86,32	Efisien
						Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun (	%	100			
						Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	%	100			
						Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	%	100			
						Pesentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi	%	100	2.286.700.148	95,94	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pimpinan terlaksana dengan baik					
						Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	%	100	36.058.189.977	83,33	
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	%	100			
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-		-	1.263.939.372	78,56	Efisien
						Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	100			
						Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	86,96			
		Opini Laporan Keuangan	Opini	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	660.342.732.418	96,16	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	-	-	
						Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100	-	-	
						Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	93,8	-	-	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	N/A	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-		-	5.233.027.027	92,84	N/A
						Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	-	-	
						Persentase penambahan akses internet di ruang publik	%	100	-	-	
						Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	-	-	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks	127,72	Program Kepegawaian Daerah	-		-	2.001.700.677	76,57	Efisien
						Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	266,25	-	-	
						Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	104,60	-	-	
						Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	111,11	-	-	
						Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	329,33	-	-	
					Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	%	53,48	4.602.861.749	99,57	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	101,78	Program Pendaftaran Penduduk	-		-	619.248.019	97,38	Efisien
						Persentase perekaman KTP elektronik	%	100,13	-	-	
						Cakupan kepemilkan KK	%	96,31	-	-	
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	127,73	-	-	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Program Pembinaan Perpustakaan	-		-	306.354.432	88,96	Efisien
						Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	eksemplar	101,57	-	-	
						Persentase perpustakaan (desa/sekolah) yang dibina	%	120,57	-	-	
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-		-	64.398.000	94,48	Efisien
						Arsip usul musnah (meter lari)	meter lari	3,33	-	-	
						Persentase arsip yang dialihmediakan	%	302,00	-	-	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	97,42	1.055.755.654.535	77,20	Efisien
					Program Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	%	97,79	121.834.750	87,20	Efisien
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	98,75	1.756.244.365	94,27	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	88,53	3.131.531.380	95,73	Efisien
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	98,42	1.522.102.838	90,52	Efisien
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	98,74	1.341.399.100	93,03	Efisien
						Persentase desa tertib administrasi	%	97,80	-	-	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-		-	754.652.579	73,27	Efisien
						Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100,36			
						Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	534,20			
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-		-	16.730.407.282	81,19	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	%	75			
						Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran (%)	%	100			
						Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan (%)	%	100			
4	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	265,99	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina (%)	%	65,22	4.268.493.840	87,60	Efisien
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	325	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	2.722.198.195	85,93	Efisien
						Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi	%	100,00			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase PKL yang terbina	%	24,35			
						Jumlah pendapatan retribusi pasar	Rp.	153,91			
					Program Pengembangan Ekspor	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	Jenis	100,00	157.709.000	57,35	Efisien
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	98,77	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-		-	4.096.071.299	95,75	Efisien
						Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	106,61			
						Produktivitas cabe	Kw/Ha	106,79			
						Produktivitas tembakau rajang	Kw/Ha	98,36			
						Produktivitas tembakau asepan	Kw/Ha	101,73			
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	68,67	23.375.000	93,50	Efisien
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	103,89	536.463.630	91,76	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	2049,20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	%	100	6.680.299.928	92,17	Efisien
					Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat intensitas promosi pariwisata	%	100,72	160.311.804	96,66	Efisien
5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	316,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	100,00	223.957.150	90,67	Efisien
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	13900,00	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	100,00	391.667.390	91,42	Efisien
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	%	100,00	164.745.920	81,58	Efisien
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	100,00	237.557.475	87,78	Efisien
6	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	100,05	Program Penyelenggaraan Jalan	-		-	117.229.798.201	83,50	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase jalan kondisi baik	%	38,44			
						Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	88,06			
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	100,85	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	100,85	1.181.626.000	94,43	Efisien
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	108,22	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	115,48	6.819.229.498	84,99	Efisien
7	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	99,35	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	100	1.331.166.200	86,55	Efisien
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	100,50	7.159.451.900	99,02	Efisien
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	99,12	3.548.075.996	89,87	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	103,94	3.710.384.142	91,62	Efisien
8	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	107,50	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-		-	800.082.796	64,83	Efisien
						Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	99,29			
						Persentase pelayanan ketataruangan	%	100			
						Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	100			
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penataan gunaan tanah yang tersusun	%	100	754.714.800	94,10	Efisien
9	Meningkatnya kualitas	Kinerja Lalu Lintas *(Level Of Service)*	Nilai	100	Program Penyelenggaraan Lalu	Persentase kecelakaan lalu lintas	%	145	5.324.994.930	91,96	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan				Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
10	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	**99,11**	Program Pengelolaan Pendidikan	-		-	37.418.257.850	92,64	Efisien
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	102,71		APM SD/MI/Paket A	%	94,87			
						APM SMP/MTs/Paket B	%	95,47			
						APK PAUD	%	103,07			
						Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96			
						Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	%	102,28			
						Persentase SD berakreditasi minimal B	%	99,67			
						Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	99,93			
						Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	145,09			
						APK SD/MI/Paket A	%	94,87			
						APK SMP/MTs /Paket B	%	95,46			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	%	713,33			
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	**%**	100	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	%	100	1.639.881.304	99,39	Efisien
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan (%)	%	100	417.669.808	98,74	Efisien
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan (%)	%	0	0	0	
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	100,14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-		-	68.133.791.106	90,02	Efisien
						Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	%	93,19			
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,99			
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,30			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95,16			
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,12			
						Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,78			
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95,22			
						Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86,77			
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	97,38			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	49,82			
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	93,58			
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	103,54			
						Cakupan STBM	%	142,86			
						Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI))	%	100			
						Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100			
						Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	104,15			
						Penderita diare yang ditangani	%	731,00			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Angka Kejadian HIV	/1000 penduduk	63,16			
						Insiden Tuberkulosis (ITB)	/1000 penduduk	342,86			
						Angka kejadian Malaria	/1000 penduduk	199,5			
						Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	%	911,9			
						Angka Kejadian DBD (/100.000 penduduk)	/1000 penduduk	211,00			
						Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC *(Universal Health Coverage)*	%	100,42			
						Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	%	97,00			
						Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	%	100			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	%	81,46			
						Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	%	98,62			
						Persentase Sistem Informasi Kesehatan	%	100			
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-		-	5.942.532.508	67,52	Efisien
						Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	91,10			
						Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi *(unmetneed)*	%	87,96			
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-		-	3.219.197.286	55,12	Efisien
						Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB	%	84,26			
						Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	61,95			
						Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB	%	35,05			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	65,73			
						Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	N/A			
12	Meningkatnya kesejaheraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	129,46	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	98,98	1.461.464.202	88,72	Efisien
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	%	133,09	2.268.279.816	93,00	Efisien
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	116.50	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	19,20	1.121.094.938.	95,87	Efisien
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	168,10	2.731.883.145	63,99	Efisien
		Indeks Desa Membangun	Indeks	100	Program Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	3.890.428.764	94,43	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase BUMDes berkembang dan Maju	%	96,01			
						Persentasei desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan	%	100			
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	98,01	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	%	190	156.753.608	94,81	Efisien
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	86,87	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa/kelurahan layak anak	%	142,65	331.800.686	98,75	Tidak efisien
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indek	130,19	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				411.820.222	84,52	Efisien
		Indeks kualitas udara	Indeks	112,92		Cakupan pemantauan kualitas air	%	100			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	99,19		Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100			
						Presentase kampung iklim yang terbentuk	%	100			
15	Meningkatnya penanganan dan pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	93,54	Program Pengelolaan Sampah	-		-	14.913.084.739	86,71	Efisien
						Persentase timbulan sampah yang terkurangi	%	86,81			
						Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	89,93			
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	102,17	Program Penanggulangan Bencana				2.213.509.560	89,69	Efisien
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	%	100			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator KInerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100			
						Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	%	100			
						Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100			

Berdasarkan Tabel 3.74. untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya dengan membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran dengan realisasi pencapaian serapan anggaran indikator kinerja program. Apabila ***realisasi pencapaian indikator kinerja* sasaran *lebih besar*** daripada ***realisasi serapan anggaran pencapaian indikator kinerja* anggaran program**, maka dinyatakan ***efisiensi***. Begitu juga ***sebaliknya, apabila realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran lebih kecil*** daripada ***realisasi serapan pencapaian indikator kinerja* anggaran program**, maka dinyatakan ***tidak efisiensi***. Atas dasar pengukuran tersebut, dari 34 (tiga puluh empat) indikator sasaran dengan sebanyak 62 (enam puluh dua) program pendukung visi-misi bupati dan 1 (satu) program yang tidak dianggarkan yaitu Program Pengelolaan Permuseuman sehingga diperoleh hasil yang efisiensi sebanyak 59 program (atau 95,16%), yang tidak efisiensi sebanyak 2 program (atau 3,23%) yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan yang N/A sebanyak 1 program (atau 1,61%) yaitu pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

1.4.2. Efektifitas Sumber Daya

Pengertian efektif adalah [1] ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); [2] dapat membawa hasil; [3] berhasil guna. Menurut [2], efektivitas adalah suatu keadaan dimana kemampuan suatu sistem sesuai dengan keinginan pengguna. Menurut [3] efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Menurut Richard Steer, efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991) seperti pada Tabel 3.75.

Tabel 3.75.

Rasio Efektifitas Sumber Daya

No	Rasio Efektifitas	Tingkat Capaian	Kodefikasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	< 40	Sangat Tidak Efektif	
2	40 – 59,99	Tidak Efektif	
3	60 – 79,79	Efektif	
4	> 80	Sangat Efektif	

Sumber: Litbang Depdagri (1991).

Sehingga untuk mengukur tingkat sumber daya berdasarkan capaian indikator sasaran strategis tahun 2022 dengan mengacu Tabel 3.76 disandingkan dengan Tabel 3.75, maka tingkat efektifitas sumber daya dapat disajikan pada Tabel 3.76.

Tabel 3.78.

Efektifitas Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Efektifitas
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1.1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya *(Ipoleksosbud)* yang diselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat efektif
		1.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	95,89	95,89	Sangat efektif
2	Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71	75,91	106,92	Sangat efektif
		2.2	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62	65,14	105,06	Sangat efektif
		2.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	Sangat efektif
		2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2	N/A	N/A	N/A
		2.5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	202	258	127,72	Sangat efektif
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	83,46	101,78	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Efektifitas
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Mengoptimalkan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	4.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,47	3,91	265,99	Sangat efektif
		4.2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	1,24	4,03	325	Sangat efektif
		4.3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63	1,61	98,77	Sangat efektif
		4.4	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	3,13	64,14	2049,20	Sangat efektif
5	Meningkatnya Investasi Daerah	5.1	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	50	158	316,00	Sangat efektif
		5.2	Persentase Peningkatan Investasi PMA	%	1	139	13900,00	Sangat efektif
6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	6.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06	91,11	100,05	Sangat efektif
		6.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47	61,99	100,85	Sangat efektif
		6.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5	44,91	108,22	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Efektifitas
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)	7.1	Persentase Capaian *Universal Access* (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32	97,68	99,35	Sangat efektif
8	Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang	8.1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,40	95,03	107,50	Sangat efektif
9	Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan	9.1	Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*)	Nilai	0,62	0,62	100,00	Sangat efektif
10	Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing	10.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52	13,40	99,11	Sangat efektif
		10.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,85	9,09	102,71	Sangat efektif
		10.3	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	5	100,00	Sangat efektif
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	11.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76.84	76,95	100,14	Sangat efektif
12	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	12.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5	87,39	129,46	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Efektifitas
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16	4,31	116.50	Sangat efektif
		12.3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7034	0,7034	100,00	Sangat efektif
13	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	13.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,34	71,88	98,01	Sangat efektif
		13.2	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725	629,80	86,87	Sangat efektif
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	14.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	36,63	47,69	130,19	Sangat efektif
		14.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,80	87,85	112,92	Sangat efektif
		14.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,90	42,55	99,18	Sangat efektif
15	Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)	15.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95	56,08	93,54	Sangat efektif
16	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	16.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,94	102,17	Sangat efektif

Sumber: Capaian RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 3.76. dapat disimpulkan tingkat efektifitas sumber daya, dengan perincian:

1. Sangat efektif sebanyak 33 (atau 97,06% dari 34 indikator sasaran),
2. Tidak ada hasil (N/A) 1 (atau 2,94% indikator sasaran).

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, partisipatif, kearifan lokal, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (*tiga puluh empat)* yang terdiri dari: 33 (*tiga puluh tiga*) indikator yang sifatnya progresif, dan 1 (*satu)* indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. **Indikator Progresif**, dengan hasil:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** ***(***atau interval nilai realisasi kinerja **≥** ***90,01)*** sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 91,18%

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Tinggi, atau interval nilai realisasi kinerja 75,01 ≤ 90,00 sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 2,94%.

c. Ada 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mempunyai nilai kinerja baik di tahun 2021 sebesar 2,74 sehingga di tahun 2022 tidak diikutkan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena yang diikutkan dalam penilaian Indeks SPBE bagi instansi dengan nilai di bawah 2,60.

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Tercapai (Berhasil Menekan)***, atau interval nilai realisasi kinerja skala <50,00% sebanyak 1 (satu) indikator.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan sasaran jangka menengah Daerah, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun berkenaan, dan ditindaklanjuti dengan penetapan APBD tahun 2022 dengan sebanyak 137 program dengan 274 kegiatan dan subkegiatan 782 dengan dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp 3.020.031.884.691,28,- dan terserap sebesar Rp 2.524.601.172.404,28,- (atau 83,60 %).

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasar tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: dari 34 (tiga puluh empat) indikator sasaran dengan sebanyak 62 (enam puluh dua) program pendukung visi-misi bupati dan 1 (satu) program yang tidak dianggarkan yaitu Program Pengelolaan Permuseuman sehingga diperoleh hasil yang efisiensi sebanyak 55 (atau 88,71%) program dan yang tidak efisiensi sebanyak 7 (atau 11,29%) program. Tingkat efektifitas sumber daya, dengan perincian: 1. Sangat efektif sebanyak 31 (atau 91,18% dari 34

indikator sasaran), 2. Efektif sebanyak 2 (atau 5,88% dari 34 indikator sasaran), dan 3. Tidak ada hasil (N/A) 1 (atau 2,94% indikator sasaran). Sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat-saat masyarakat memerlukan pelayanan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

a. Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 hasil LKjIP tahun berkenaan wajib dipakai sebagai *bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program* terkait dengan: (a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
b. Berpedoman pada pencapaian kinerja sasaran tahun 2022, kiranya yang menjadi penekanan dan perhatian tetap fokus pada target jangka menegah Daerah tahun 2023, diantaranya:
    a) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) target 0,68;
    b) Indeks Reformasi Birokrasi target 60,62;
    c) Pertumbuhan ekonomi target 3,51%;
    d) Infrastruktur wilayah kondisi baik target 76,72;
    e) Indeks Pembangunan Manusia target 76,88, dan angka kemiskinan pada kisaran 11,69%.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan **Visi Daerah** ***: Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Klaten, 20 Februari 2023

BUPATI KLATEN,

Hj. SRI MULYANI, S.M.

Capaian kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2022 ditandai dengan berbagai penghargaan di banyak bidang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Tentu, harus disertai rasa syukur dan tetap fokus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah untuk menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja jangka menengah Daerah, serta untuk mewujudkan: ***Masyarakat Kabupaten Klaten Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Klaten, 20 Februari 2023

BUPATI KLATEN,

Hj. SRI MULYANI, S.M.

LAMPIRAN I
Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2022

1. Sertifikat Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada Tim Kesenian Kabupaten Klaten sebagai Juara Pertama dalam Parade Tari Kreasi Daerah Tingkat Jawa Tengah. (09/06/2022)
2. Piagam Penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada Kabupaten Klaten sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelporan (SIMEP) Perlindungan Anak. (21/07/2022)
3. Piagam Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2022. (23/07/2022)
4. Sertifikat Penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Kampung KB Sejahtera Kuncen Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai Juara III Kreasi Menu Bergizi Dashat dalam Memperingati Hari Keluarga Nasional 2022.
5. Piagam Penghargaan dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan PD IBI Provinsi Jawa Tengah kepada PD IBI Kabupaten Klaten sebagai Terbaik I Tingkat Provinsi Jawa Tengah Gebyar Pelayanan KB dalam Rangka HUT IBI Ke-71 Tahun 2022.
6. Piagam Penghargaan dari Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten Klaten sebagai Juara Harapan I Lomba Kreasi Olahan Pangan Lokal Tahun 2022. (19/10/2022)
7. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten sebagai Juara Harapan III Stan Terbaik Pameran Kearsipan Virtual Jawa Tengah Tahun 2022. (21/10/2022)
8. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Desa Wisata Bugisan sebagai Juara Harapan II Kategori Digital dan Kreatif Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022.
9. Sertifikat Penetapan Payung Juwiring dari Provinsi Jawa Tengah sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (21/10/2022)
10. Sertifikat Penetapan Putaran Miring Gerabah Melikan dari Provinsi Jawa Tengah sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (21/10/2022)
11. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Perpustakaan Daerah

Kabupaten Klaten Terstandardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Tahun 2022 dengan Peringkat Madya. (25/11/2022)

12. Piagam Penghargaan dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah atas dukungan “Gerakan Indonesia Inklusif – Ramah Disabilitas” dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. (20/12/2022)
13. Piagam Penghargaan Pariwisata Indonesia Terbaik dipersembahkan kepada Gir Pasang Kabupaten Klaten sebagai Juara I Dataran Tinggi Terbaik / Best Highland dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2022. (25/12/2022)
14. Piagam Penghargaan Pariwisata Indonesia Terbaik dipersembahkan kepada Kali Talang Bike Park Kabupaten Klaten sebagai Juara III Olahraga & Petualangan Terbaik/ Best Sport & Adventure Tourism dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2022. (25/12/2022)
15. Piagam Penghargaan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Wisata Sidowarno, Kabupaten Klaten sebagai Juara Harapan 1 Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2022. (26/12/2022)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SERTIFIKAT

Nomor : 422.6/15702

Diberikan kepada

Tim Kesenian Kabupaten Klaten

Sebagai:

Juara Pertama

Atas partisipasinya dalam mengikuti Parade Tari Kreasi Daerah Tingkat Jawa Tengah yang diselenggarakan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 09 Juni 2022, di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita.

Semarang, 09 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760230 200112 2 003

No. 022380

Piagam Penghargaan

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Memberikan Penghargaan Kepada :

KABUPATEN KLATEN

sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis Sistem Infomasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak

Jakarta, 21 Juli 2022

Dr. Susanto, M.A.

Ketua

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Nomor : 858/MEN/TK.05/7/2022

Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kabupaten Klaten

Sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2022

Jakarta, 23 Juli 2022

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si

SERTIFIKAT

diberikan kepada

KAMPUNG KB SEJAHTERA KUNCEN

KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH

sebagai

JUARA 3

KREASI MENU BERGIZI DASHAT

DALAM MEMPERINGATI HARI KELUARGA NASIONAL 2022

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN

Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH

bekerja sama dengan

PD IBI PROVINSI JAWA TENGAH

memberikan:

PIAGAM PENGHARGAAN

Kepada

PC IBI KABUPATEN KLATEN

Sebagai:

TERBAIK 1

TINGKAT PROINSI JAWA TENGAH

GEBYAR PELAYANAN KB DALAM RANGKA HUT IBI KE-71

TAHUN 2022

Ketua PD IBI,

Sumarsih, S.ST., MH

Kepala,

drg. Widwiono, M.Kes

Diunduh dengan CamS

DINAS KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 5943 . 3 / 0985 . 30

Diberikan Kepada

KABUPATEN KLATEN

Sebagai

JUARA HARAPAN I

Lomba Kreasi Olahan Pangan Lokal Tahun 2022 yang diselenggarakan tanggal 19 Oktober 2022 di Asrama Haji Donohudan

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. Dyah Lukisari, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196610161992032006

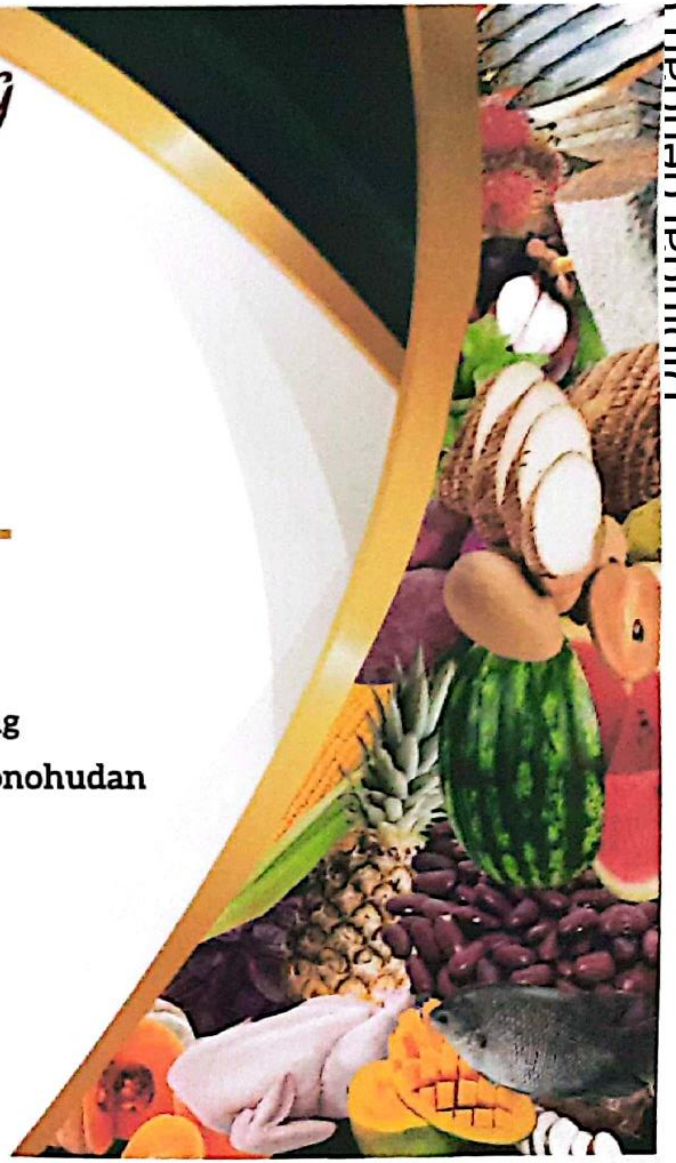

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0016615

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 045/18 tanggal 20-10-2022 Tentang Stan Terbaik Pameran Kearsipan Virtual Jawa Tengah Tahun 2022.

Diberikan kepada :

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KLATEN

Sebagai:

JUARA HARAPAN III

STAN TERBAIK PAMERAN KEARSIPAN VIRTUAL JAWA TENGAH TAHUN 2022

Semarang, 21 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Anugerah
DESA WISATA
INDONESIA
2022
HARAPAN II
KATEGORI DIGITAL & KREATIF
DESA WISATA
BUGISAN
Rp 10.000.000,-
ANUGERAH DESA WISATA INDONESIA 2022
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

MTRAAA4247

Nomor: 3039/F4/KB.09.06/2022

Sertifikat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Menetapkan

PAYUNG JUWIRING

dari Provinsi Jawa Tengah
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 21 Oktober 2022
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A.,M.B.A.

MTRAAA4248

Nomor: 3039/F4/KB.09.06/2022

Sertifikat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Menetapkan

PUTARAN MIRING GERABAH MELIKAN

dari Provinsi Jawa Tengah
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 21 Oktober 2022
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A.,M.B.A.

Penghargaan dan Apresiasi
Kepada
Perpustakaan Daerah
Kabupaten Klaten
TERSTANDARDISASI
Kategori
MADYA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
Sertifikat
NOMOR. 289/D.PHA.3/KP.06.07/11/2022
Dengan ini memberikan penghargaan kepada:
Perpustakaan Daerah Kabupaten Klaten
TERSTANDARDISASI
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) Tahun 2022
dengan Peringkat
MADYA
Jakarta, 25 November 2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia

ANUGERAH PRAKARSA INKLUSI

Nomor : 08/KND/PB.04/12/2022

Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia,
dengan ini memberikan penghargaan kepada:

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Provinsi Jawa Tengah

Atas dukungan "Gerakan Indonesia Inklusif – Ramah Disabilitas" dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

Jakarta, 20 Desember 2022
Ketua Komisi Nasional Disabilitas

Dr. Dante Rigmalia, M. Pd

Anugerah Pesona Indonesia

wonderful indonesia

PIAGAM PENGHARGAAN
PARIWISATA INDONESIA TERBAIK

DIPERSEMBAHKAN KEPADA

Gir Pasang

Kabupaten Klaten

SEBAGAI

Juara 1

DATARAN TINGGI TERBAIK / *Best Highland*

DALAM AJANG

Anugerah Pesona Indonesia 2022

BANDA ACEH, 25 NOVEMBER 2022

Hiro Kristanto, SE.
Chairman

M. Syafa'at, SE.
Founder

DR (c) Patrice Rio Capella, SH., MKn.
Advisor

Diapresiasi oleh:

ayo jalanjalan

Dipindai dengan CamScanner

Anugerah Pesona Indonesia

wonderful indonesia

PIAGAM PENGHARGAAN
PARIWISATA INDONESIA TERBAIK

DIPERSEMBAHKAN KEPADA

Kali Talang Bike Park

Kabupaten Klaten

SEBAGAI

Juara 3

OLAHRAGA & PETUALANGAN TERBAIK /
Best Sport & Adventure Tourism

DALAM AJANG

Anugerah Pesona Indonesia 2022

BANDA ACEH, 25 NOVEMBER 2022

Hiro Kristanto, SE.
Chairman

M. Syafa'at, SE.
Founder

DR (c) Patrice Rio Capella, SH., MKn.
Advisor

Diapresiasi oleh:

ayo jalanjalan

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 556/ 3986

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada:

DESA WISATA SIDOWARNO, KAB. KLATEN

Sebagai

JUARA HARAPAN 1 GELAR DESA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2022

"Gumregah, Jumangkah, Hanggayuh Mukti"

Semarang, 26 November 2022

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. SINOENG N RACHMADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006

LAMPIRAN II
Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

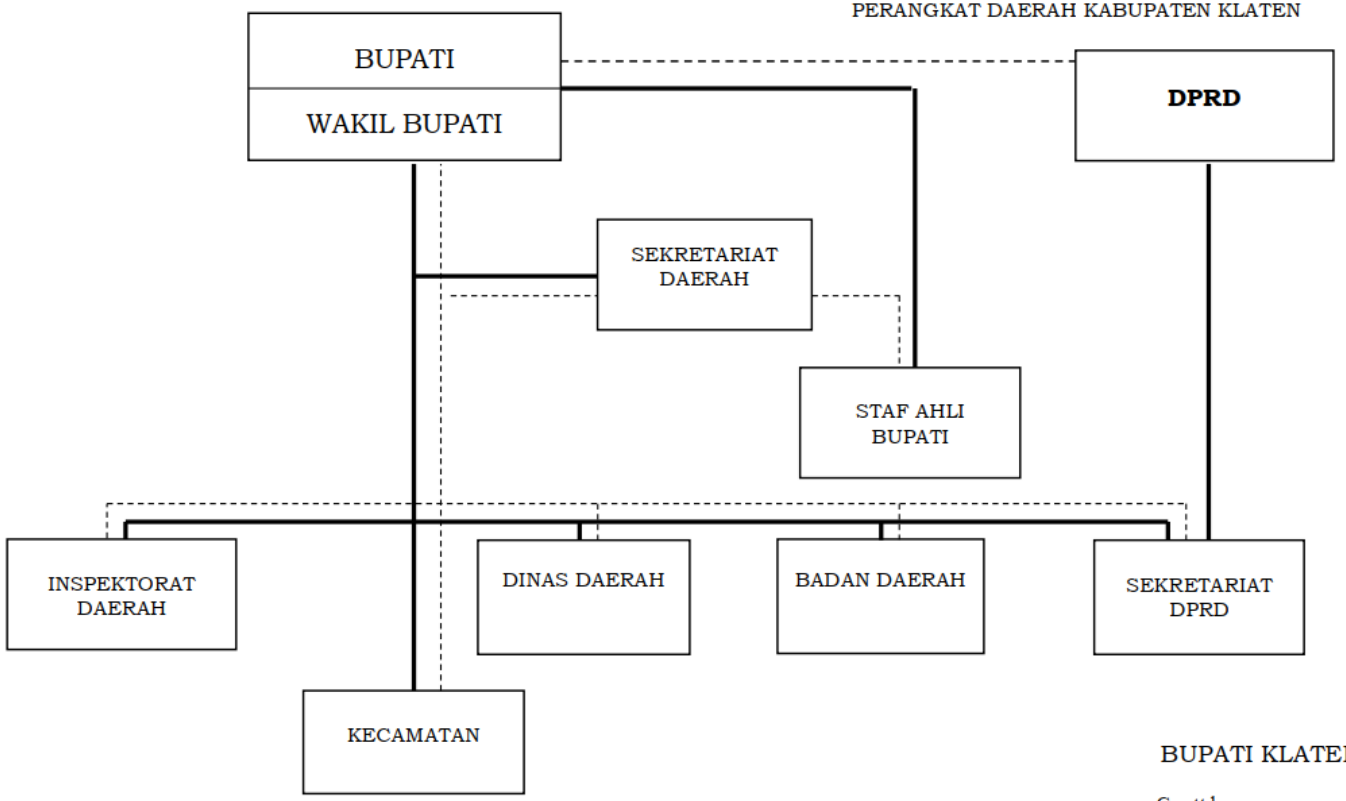

BUPATI KLATEN,

Cap ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001